Penduduk dan Pembangunan merupakan dua aspek penting dalam suatu kehidupan bernegara. Penduduk merupakan subjek pembangunan dan pembangunan diperlukan dalam rangka kepentingan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar, sosial dan kehidupan sosial lainnya. Kesejahteraan dipandang sebagai suatu kebutuhan manusia, dan keterpenuhannya kebutuhan manusia. Maka kesejahteraan keterpenuhannya itu bisa dipenuhi, jika ketersediaan (*budget*) yang dimiliki lebih tinggi dari kebutuhan maka itu kondisi yang dipandang sebagai kesejahteraan dalam aspek rumah tangga. Dan untuk lain produsen akan sejahtera jika harga pasar yang berlaku diatas harga pokok produksi produk barang dan jasa yang disediakan. Menciptakan tingkat kemakmuran tinggi dalam logika ini bisa dicapai dengan modal manusia dan modal sosial yang tinggi.

Ada pertanyaan dasar yang diajukan, kenapa antara seseorang berbeda pendapatnya?, kalau masa klasik, jawabannya karena warisan tanah yang mereka miliki berbeda, atau daerah jajahan dan penguasaan yang berbeda, namun akhir-akhir ini bisa dijawab dengan perbedaan *human capital* dan *social capital* yang mereka miliki. Seseorang yang memiliki pendidikan, keahlian, sikap, perilaku dan modal sosial yang baik, cenderung akan mendapatkan penghasilan dan kekayaan yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan orang yang memiliki *human capital* dan *social capital* yang lebih rendah.

Pembentukan modal manusia dan modal sosial dapat dilakukan dengan proses yang sistematis melalui pendidikan formal, namun juga dapat dilakukan dengan proses alami "alam takambang jadikan guru" yakni pengalaman merantau, atau proses lama hidup "jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak drosok". Dan kemudian proses pembentukan modal sosial (*social capital*) itu merupakan proses pembentukan relasi sosial, saling percaya, kerjasama antara individu, kelompok dan organisasi, norma, budaya, jaringan (*networking*) yang dimiliki oleh individu dalam kehidupan masyarakat. Buku ini mencoba membahas tentang penduduk dan pembangunan, modal manusia, modal sosial, kesejahteraan bangsa, dan bagaimana upaya pembentukan modal manusia dan modal sosial tersebut, dalam lain perkataan bagaimana pembangunan bersektif pembangunan modal manusia dan modal sosial.

PT NAGARASUMA MEDIA KREATIF
Menara Cawang Lantai Bawah Blok A No. 1
Jl. SMA 14 Cawang Kramatjati
Jakarta Timur 13630
Tlp. 021 36501501
Site: www.nagamedia.co.id
Surel: penerbit@nagamedia.co.id

LECTURE
PUBLISHER

LECTURE
PUBLISHER

Dr. Yulhendri

PEMBANGUNAN
Modal Manusia dan Modal Sosial

PEMBANGUNAN

Modal Manusia dan Modal Sosial

Dr. Yulhendri

PEMBANGUNAN

Modal Manusia dan Modal Sosial

Dr. Yulhendri

Dr. Yulhendri

PEMBANGUNAN

“MODAL MANUSIA DAN MODAL SOSIAL”

Diterbitkan oleh:

LECTUR
PUBLISHER

PT. NAGAKUSUMA MEDIA KREATIF

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pembangunan Modal Manusia dan Modal Sosial

© Dr. Yulhendri

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan I, Desember 2013

Diterbitkan oleh :
LECTURE PUBLISHER
KELOMPOK PT. NAGAKUSUMA MEDIA KREATIF
Anggota IKAPI No.469/DKI/XI/2013
Menara Cawang Lantai Dasar Blok A No.1
Jl. SMA 14 Cawang Kramat Jati Jakarta Timur 13630
Telepon: +62-21-36501501
E-Mail: penerbit@nagamedia.co.id
Website: www.nagamedia.co.id

Penulis : Dr. Yulhendri
Koreksi Typo : Asriyah
Tata Letak : Rizal Zakaria
Desain Sampul : Ujang Prayana
Pra-cetak : Zuprianto
Ukuran : 14,8 x 21 cm
Halaman : xviii+166

Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Yulhendri, Dr., PEMBANGUNAN MODAL MANUSIA DAN MODAL SOSIAL
Cetakan 1-Jakarta: Lecture Publisher - PT. Nagakusuma Media Kreatif,
Desember 2013

xviii-166 Hal, 14,8 X 21 cm
ISBN : 978-602-17769-3-3

1. Sosial

I. Judul

II. Yulhendri, Dr.

PRAKATA PENERBIT

Sebuah negara mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, demikian pula Indonesia. Sejauh ini, perkembangan di Indonesia dapat dirasakan meskipun di berbagai aspeknya masih “tertatih”, akan tetapi mencapai kesejahteraan ini bukanlah hal mudah. Banyak permasalahan-permasalahan yang terus dihadapi bangsa dan negara ini dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk lepas dari permasalahan klasik yang telah ada sejak jaman penjajahan. Ditambah lagi dengan geografis Indonesia yang cukup luas dan melingkupi pulau-pulau besar dan kecil, serta sistem pemerintahan yang menganut sistem sentralisasi, sehingga pemerataan penduduk dari dulu hingga saat ini masih terus mengalami kendala yang serius. Belum lagi masalah-masalah lainnya, dimana kebudayaan yang ada sangat beragam sehingga melahirkan perbedaan pemahaman yang beragam pula. Permasalahan inilah yang menjadi pokok pembahasan

dalam buku yang berjudul: Pembangunan "Modal Manusia dan Modal Sosial" karya Dr. Yulhendri.

Buku ini di antaranya mengulas pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus meningkat tiap tahun. Melihat kondisi ini, pada tahun 1970 pemerintah mencanangkan sebuah program yaitu Keluarga Berencana sebagai usaha menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Program ini sempat sangat populer di kalangan masyarakat sehingga setelah program ini disosialisasikan, maka tahun-tahun berikutnya pertumbuhan penduduk mulai dapat ditekan. Akan tetapi permasalahan yang ada di Indonesia bukan hanya pada laju pertumbuhan penduduk semata, akan tetapi penyediaan lapangan kerja, kemadirian sosial dan berbagai permasalahan sosial lainnya juga menjadi permasalahan yang hingga kini masih terus dicari solusinya.

Dr. Yulhendri sebagai penulis buku Pembangunan "Modal Manusia dan Modal Sosial" menawarkan beberapa solusi untuk permasalahan tersebut, melalui pendekatan sosial keagamaan, Dr. Yulhendri menjelaskan bahwa meski pertumbuhan penduduk di Indonesia mampu ditekan akan tetapi bila Modal manusia dan modal sosial yang ada di masyarakat tidak berkembang maka dengan sendirinya kesejahteraan masih merupakan permasalahan utama yang akan di hadapi oleh pemerintah dan rakyat itu sendiri. Oleh sebab itu, ia memaparkan berbagai penjelasan mengenai ide tentang Modal Manusia dan Modal Sosial yang perlu diketahui oleh rakyat Indonesia. Selamat Membaca!

Cawang,
Desember 2013

PENGANTAR PENULIS

"Ya Allah, Lapangkan dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku"
(Q.S. Thaahaa: 25-28)

Rakyat yang sejahtera merupakan cita-cita, sejak negara ini mulai didirikan kesejahteraan itu merupakan tujuan. Usaha untuk mencapai kesejahteraan itu telah mulai dan sedang dilakukan yakni dengan proses pembangunan. Pembangunan merupakan proses perubahan secara sistematis atas bentuk fisik, kelembagaan, perilaku, pengetahuan, nilai, etos kerja, dan hubungan sosial antara warga negara sehingga tercapai kepuasan dan keharmonisan.

Negara memiliki suatu sistem pemerintahan dimana di dalamnya terdapat aturan, hukum, administrasi, sumber daya manusia, kelembagaan, tatanilai, budaya dan lain-lain yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat atau pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam negara juga terdapat sejumlah sumber daya diantaranya teritorial wilayah laut, darat, udara dan di dalam itu terkandung isi bumi yang memiliki nilai dan bermafaat untuk kemaslahatan warga negara. Warga negara juga menjadi modal dasar pembangunan, penduduk adalah subjek dan orang yang aktif dalam proses pembangunan dan karena merekalah sesungguhnya negara itu ada dan diadakan. Penduduk Indonesia memiliki keberagaman dan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan. Penduduk menjadi subjek pembangunan dan juga menjadi objek pembangunan.

Buku ini akan memfokuskan kajian pada pembangunan manusia dan interaksi sosial sebagai upaya untuk mensejahterakan penduduk Indonesia.

Padang,
November 2013

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih, kupersembahkan ini pada yang ku Sayangi Ayah/Ibundaku, dan Sanak saudara di kampung halaman. Buku merupakan hasil inspirasi dan dukungan yang tinggi dari berbagai pihak maka dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Yunia Wardi, Dr. Idris, MS., Dr. Susi Evanita, MS., Drs. Zul Azhar, M.Si. Sebagai Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Prof. Dr. Suparno, Prof. Dr. Wahjoedi, ME., Prof. Dr. H. Agus Suman, DEA., Prof. Dr. H. Sa'dun Akbar, M.Pd., Dr. Sunaryanto, M.Ed., Prof. Dr. J.G Nirbito, M.Pd., almarhum Prof Dr. Salladien, M.Sc., Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi., Dr. Harry Wahyono, M.Pd., yang banyak memberikan bimbingan di PPs. UM Malang.

Prof. Dr. Z Mawardi Effendi, M.Pd., Prof. Dr. Syamsul Amar B., MS., Prof. Dr. Phil Yanuir Kiram, Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed., Prof. Dr. Syafruddin Karimi, MA., dan Prof. Dr. Nursyirwan Effendi, MA. yang telah banyak membimbing dan memfasilitasi penulis dalam berkarya di Universitas Negeri Padang. Ucapan terima

kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D., yang telah memfasilitasi penulis mengikuti program Sandwich di *The University of Queensland* Australia. Dan juga selalu memberikan motivasi untuk bisa berbuat. Seiring dengan itu juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Iean Russell, Dr. Krissantini, Dr. Greg Baxter, Dr. Annie Ross, Dr. Don Cameron, Dr. Suzanne Haverman, yang telah berkenan menjadi suverpisor pada pelatihan *Research Methodologies* di *The University of Queensland* dan juga membantu membimbing arah dan fokus penelitian yang penulis lakukan ini dan Mas Gatut Sudaryanto, Ph.D dan keluarga yang telah banyak memfasilitasi belajar, dan menelusuri kota-kota di Queensland. Dan semua staff dosen Fakultas Ekonomi UNP Padang.

Terima kasih saya ucapkan kepada senior, teman, dan adik-adik seperjuangan di Dekopin, khususnya kepada Drs. Agung Sudjatmoko, MM., Drs. H.A. Nurdin Halid, Dra. Hj. Kofifah Indar Parawansa, Ir.Rahmad Handoyo, MM., Dedy Setiadi, Ilham Nasai, Yusuf Budi Sartono, Romi Pernando, Muhamad Azhar, Sudjatmiko, Soeroto, Henry Teja, Asep Palahuddin, Fanni Erda Tasia, para pengurus Kopindo, P3SD Padang, Riswandy, S.Pd., Sondri B.S, HMI, Kopma se-Indonesia, BKPK Dekopin nasional, Dr. H. Dasril dan keluarga, Direktorat PNFI Jakarta, Hamid Muhammad, Ph.D., Dr. Triyadi, Dra. Pahlupi S., M.AP, Drs. Angger Pramono, dan para pimpinan dan staff di Bimtek-Distara-Kemdiknas. Dan juga saya ucapkan terima kepada mahasiswa saya di Fakultas Ekonomi UNP.

Akhirnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan, semoga Allah SWT meridhai. Amin.

Buku ini Kupersembahkan Kepada
Keluarga yang Kusayangi

Istri yang Sabar, Nora Susanti.
Anakku yang ceria: Ify, Rama, Achsan dan Ifa.

DAFTAR ISI

PRAKATA PENERBIT	v
PENGANTAR PENULIS	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
BAB I PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN	1
Karakteristik Penduduk Indonesia	1
BAB II PEMBANGUNAN MODAL MANUSIA	15
A. Persoalan kependudukan	16
B. Penduduk dan Pembangunan Ekonomi	22
BAB III MODAL MANUSIA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	31
A. Pembentukan Modal Manusia	31
B. Pendidikan dan Modal Manusia	33
C. Migrasi, Transmigrasi dan Merantau dalam Pembentukan Modal Manusia	48
D. Investasi Modal Manusia	53
E. Investasi rumah tangga	55
F. Modal Manusia dan Produktivitas	55

G. Modal Manusia dan Tingkat Upah	56	B. Upaya untuk memperbaiki tingkat kemakmuran bangsa	120
H. Modal manusia dan Status Sosial	58	Bagaimana mencapai kemakmuran tinggi?	129
I. Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi	60	Beberapa permasalahan pembangunan	131
BAB IV MODAL SOSIAL DAN PEMBANGUNAN	69	BAB VII DISKUSI PEMBANGUNAN	131
A. Pengertian Modal Sosial	73	Kegagalan koperasi di Indonesia (kasus kerjasama)	132
B. Bentuk dan Wujud Modal Sosial	76	Loyalitas dan Partisipasi anggota Koperasi terhadap Performance Usaha	135
C. Pembentukan Modal Sosial	78	Surplus Produsen dan Surplus Konsumen.	136
D. Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi	82	Fakta berkoperasi di Indonesia	137
E. Budaya dan Pengembangan Ekonomi	92	Partisipasi rakyat dalam pembangunan	139
F. Eksternalitas Modal Sosial	93	DAFTAR RUJUKAN	153
BAB V MEMBANGUN MODAL MANUSIA DAN MODAL SOSIAL	99	RIWAYAT PENULIS	161
A. Pendidikan dan Modal Manusia	99		
B. Peran orang tua dalam pendidikan	102		
C. Modal Sosial dan Kesuksesan pekerjaan	103		
D. Modal Manusia dan keahlian	104		
E. Membangun networking, trust, norm, dan kerjasama tim	105		
F. Upaya untuk meningkatkan kapabilitas diri atau modal manusia (keahlian, keterampilan, sikap, kepemimpinan).	106		
G. Upaya mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia	106		
BAB VI MEMBANGUN KEMAJUAN BANGSA	109		
A. Sumber kemajuan Bangsa	109		
Bagaimana dengan Indonesia	111		
Politik dan Negara Kesejahteraan.	113		

PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN

Karakteristik Penduduk Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Kondisi ini patut kita banggakan namun tentu saja kebanggaan tidaklah cukup tatkala kesejahteraan penduduk masih harus diusahakan secara maksimal. Penduduk yang besar disatu sisi menjadi potensi pembangunan, karena penduduk memiliki akumulasi modal manusia (human capital) dalam bentuk sejumlah keahlian, keterampilan dan sikap positif untuk menghasilkan inovasi dan produktivitas pembangunan. Penduduk yang pintar, cerdas dan berperilaku baik akan melahirkan berbagai modifikasi, imitasi, dan kreativitas untuk menghasilkan produk-produk inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan juga keterampilan yang tinggi akan menghasilkan kemampuan menghasilkan output tinggi (produktivitas).

Inovasi dan produktivitas yang tinggi menjadi sumber kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain penduduk yang besar, dengan tingkat kepintaran (human capital) yang rendah bisa

menjadi beban pembangunan. Modal manusia yang rendah inilah yang akan menghasilkan tingkat kesejahteraan yang rendah, karena produktivitas yang rendah dan tingkat inovasi yang rendah pula.

Hasil pencatatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa dengan komposisi 119.630.913 jiwa laki-laki dan 118.010.413 jiwa perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) tinggal di kota dan 119.321.070 jiwa (50,21 persen) tinggal di desa, sementara itu Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 adalah sebesar 250 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Indonesia mendiami pulau Jawa yang luasnya hanya 6,8% dari luas seluruh wilayah Indonesia, dimana pulau ini dihuni oleh 57,5% penduduk, sedangkan Kalimantan yang luasnya 28,5% dihuni oleh 5,8% penduduk, pulau Sumatera yang luasnya 25,2% dihuni oleh 21,3% penduduk, Papua yang luasnya 21,8% dihuni oleh 1,5% penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9% dihuni oleh 7,3% penduduk dan Maluku yang luasnya 4,1% dihuni oleh 1,1% penduduk.

Dalam catatan pemerintahan Hindia Belanda tahun 1930, pulau Jawa tetap menjadi pulau yang memiliki penduduk terbesar dalam kepulauan Nusantara. Namun dari waktu ke waktu penduduk pulau Jawa persentasenya mulai berkurang, seiring dengan adanya proses pembangunan di pulau-pulau lain di Indonesia. Sehingga pada tahun 2005, penduduk yang berada di pulau Jawa berkurang menjadi 58,8%. Pola perpindahan penduduk antar pulau ini disatu sisi perlu terus dilakukan dengan maksud agar pulau Jawa tidak terlalu tinggi bebannya dan pembangunan di pulau lain bisa dilakukan.

Indonesia memiliki luas wilayah yang luas sehingga dengan pola migrasi alamiah akan menyebabkan pola distribusi penduduk akan lebih merata. Pola alamiah yang dimaksud adalah perpindahan penduduk secara sukarela dari suatu pulau ke pulau yang lain, atau dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud untuk memperbaiki standar hidupnya masing-masing. Sebagian kalangan menyebut ini dengan istilah merantau. Merantau menjadi sebuah tradisi proses budaya dan juga di sebagian daerah menjadi ritual kehidupannya sebelum dewasa. Ketika suatu pulau dibangun, pertumbuhan ekonomi terjadi di daerah itu sebagai suatu aglomerasi ekonomi, maka penduduk dari pulau padat akan pindah ke pulau tersebut untuk bekerja, mengabdikan dan seterusnya.

Untuk lebih rinci, trend distribusi penduduk berdasarkan pulau, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 : Persentase Luas Wilayah dan Persentase Jumlah Penduduk 1930- 2005

Pulau	Luas Area (%)	Penduduk (%)					
		1930	1961	1980	1990	2000	2005
Jawa Madura	6,9	68,7	65,0	61,9	60,0	59,1	58,8
Sumatera	24,7	13,5	16,2	19,0	20,3	20,7	21,0
Kalimantan	28,1	3,6	4,2	4,5	5,1	5,5	5,5
Sulawesi	9,9	6,9	7,3	7,1	7,0	7,3	7,2
Pulau lainnya	30,4	7,3	7,3	7,5	7,6	7,4	7,5
Total	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, dan berbagai sumber, 2010

Dalam proses pembangunan, penduduk yang jumlahnya

besar ini, merupakan modal dasar yang patut diperhitungkan, direncanakan, dikembangkan dan diberdayakan sehingga menjadi modal dan sumber pertumbuhan ekonomi. Penduduk Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun nilai persentasenya relative menurun. Pada periode 1971-2005, mengalami penurunan, dari 2,7 % pertahun pada tahun 1971, di akhir tahun 2005 pertumbuhan penduduk Indonesia tinggal 1,3%. Penurunan ini tidak terlepas dari keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia. Program keluarga berencana merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk dan ledakan penduduk. Walaupun pengendalian kelahiran itu masih banyak ditentang oleh sebagian besar kelompok di Indonesia, namun upaya ini adalah upaya yang semestinya harus dilakukan khususnya bagi keluarga miskin. Sejak tahun 1970, Indonesia mulai mengembangkan program keluarga berencana sebagai usaha untuk mengendalikan kelahiran.

Grafik 1.1: Komposisi Penduduk berdasarkan Pulau

Penduduk yang berada di Pulau Jawa kelihatannya sudah mulai berangsur pindah ke Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan pulau lainnya sehingga, dan barangkali semakin sedikit orang berpindah ke pulau Jawa, akibat pulau di luar Jawa sudah berjalan pula sektor industrinya.

Grafik 1.2: Distribusi Penduduk Berdasarkan Pulau Tahun 2010.

Sumber: Data diolah dari sumber, BPS 2010

Dalam proses pembangunan, penduduk yang jumlahnya besar ini, merupakan modal dasar yang patut diperhitungkan, direncanakan, dikembangkan dan diberdayakan sehingga menjadi kekuatan. Penduduk Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun nilai persentasenya relative menurun. Pada periode 1971-1980, laju pertumbuhan penduduk Indonesia 2,30%, periode 1980-1990 turun menjadi 1,97%, periode 1990-2000 kembali mengalami penurunan menjadi 1,49% dan pada periode 2000-2010 laju pertumbuhan Indonesia tetap bertahan pada angka 1,49% sementara itu, Kepala Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menargetkan laju pertumbuhan penduduk pada 2012 sebesar 1,3 persen atau menurun dibanding 2011 yang mencapai 1,49 persen.

Penurunan ini tidak terlepas dari keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia. Program keluarga berencana merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk dan ledakan penduduk. Walaupun pengendalian kelahiran tersebut masih banyak ditentang oleh sebagian besar kelompok masyarakat di Indonesia, namun upaya ini adalah upaya yang semestinya harus dilakukan khususnya bagi keluarga miskin. Sejak tahun 1970, Indonesia mulai mengembangkan program keluarga berencana sebagai usaha untuk mengendalikan kelahiran.

Tabel 1.2 : Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun

Keterangan	Periode / Period				Grafik
	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	
Indonesia	2.30	1.97	1.49	1.49

Sumber/Source : Sensus penduduk (1971,1980,1990,2000,) dan Supas 2010.

Dalam bidang Ekonomi, BPS mencatat jika pertumbuhan ekonomi 1% sebelum tahun 2000 bisa menyerap 250.000 orang tenaga kerja baru namun, pertumbuhan ekonomi 1% setelah tahun 2000 hanya bisa menyerap 45.000 orang angkatan kerja baru, artinya Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 11% pertahun untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja sebesar 2.835.122 orang pertahun. Ini merupakan pekerjaan yang sulit,

karena rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada pada kisaran 5%-6% pertahun. Maka logikanya penduduk Indonesia mestilah dikendalikan pertumbuhannya agar tercapai kesejahteraan tersebut.

Perbaikan kesejahteraan penduduk dengan kecukupan nutrisi, gizi dan kesehatan mengakibatkan harapan hidup penduduk Indonesia membaik, BPS mencatat tahun 1970 rata-rata harapan hidup penduduk Indonesia hanya 47,7 tahun, namun setiap tahunnya selalu membaik, pada tahun 1996 di Indonesia adalah 60 tahun (laki-laki) dan 64 tahun (perempuan), tahun 2008 menjadi 69,7 tahun dan tahun 2012 menjadi 71,62 dimana usia harapan hidup perempuan di Indonesia lebih tinggi, 74,29 tahun, dibandingkan pria yang hanya 69,07 tahun (The World Factbook, Central Intelligence Agency). Data yang dipublikasikan di www.bankdata.depkes.go.id. Sementara itu, Laporan tahunan yang dirilis oleh organisasi *Save the Children*, menyatakan bahwa Indonesia berhasil mengurangi angka kematian bayi sebesar 48 persen antara tahun 1990 dan 2011. Namun, Indonesia menempati urutan 106 dari 176 negara sebagai lingkungan terbaik bagi Ibu. Berdasarkan Program PBB mengenai indeks pengembangan gender, angka kematian Ibu di Indonesia saat ini dari tiap 100.000 kelahiran terjadi sekitar 228 kematian Ibu. Dan angka ini masih menempati urutan tertinggi di Asia Tenggara.

Walaupun persentase pertumbuhan penduduk di Indonesia sudah mulai turun namun secara total, jumlah orang yang lahir setiap tahunnya akan semakin besar, karena membaiknya kondisi kesehatan masyarakat. Disamping itu persentase tersebut adalah tingkat pertumbuhan tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Membaiknya kondisi kesehatan penduduk menyebabkan

setiap tahunnya penduduk Indonesia semakin bertambah jumlahnya. BKKBN(2012) menjelaskan turunnya LPP (laju pertumbuhan penduduk) ini tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia menurunkan angka kelahiran secara bermakna. Menurut SDKI (2012) Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dapat diturunkan dari 2,8 per wanita Tahun 1997 menjadi 2,6 per wanita Tahun 2012.

Disamping itu, pengurangan pertumbuhan penduduk juga disebabkan karena semakin tingginya angka umur menikah penduduk Indonesia. Data BPS mencatat pada tahun 1992 usia menikah perempuan adalah 22.0 tahun dan usia menikah laki-laki adalah 25.8 tahun, namun pada tahun 2005, terjadi perubahan rata-rata perempuan menikah pada usia 23.2 tahun sementara itu laki-laki menikah pada usia 26.9. Untuk tahun 2013, BKKBN menjelaskan bahwa usia yang ideal bagi seorang laki-laki untuk menikah adalah 25 tahun sedangkan usia ideal perempuan untuk menikah adalah 20 tahun.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3 : Rata-rata Umur Perkawinan menurut Daerah dan jenis kelamin, Indonesia, 1992-2005

Singulate Mean Age at Marriage by area and sex, Indonesia, 1992-2000.

Tahun Year	Perkotaan/Urban		Perdesaan/Rural		Total	
	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male
1992	24,0	27,2	20,9	24,9	22,0	25,8
1993	23,9	27,4	20,8	24,8	22,3	26,0
1994	24,5	27,7	21,7	25,2	22,7	26,1
1995	24,1	27,4	21,0	24,9	22,3	25,9
1996	24,4	27,6	21,1	24,9	22,5	26,0

Tahun Year	Perkotaan/Urban		Perdesaan/Rural		Total	
	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male
1997	24,6	27,7	21,2	25,1	22,6	26,2
1998	24,7	27,9	21,2	25,1	22,7	26,3
1999	24,8	28,1	21,5	25,6	23,0	26,7
2000	24,6	28,0	21,5	25,5	22,9	26,7
2001	24,0	27,4	21,0	25,2	22,4	26,2
2002	24,4	27,6	21,4	25,4	22,9	26,5
2003	24,5	27,8	21,7	25,7	23,0	26,7
2004	24,3	27,6	21,6	25,7	22,9	26,6
2005	24,6	27,9	21,9	26,1	23,2	26,9

Sumber/Source : Susenas 1992-2005

Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa prevalensi umur perkawinan pertama antara 15-19 tahun sebanyak 41,9%. Menurut SDKI Tahun 2007, 17% wanita yang saat ini berumur 45-49 tahun menikah pada umur 15 tahun, sedangkan proporsi wanita yang menikah pada umur 15 tahun berkurang dari 9 persen untuk umur 30-34 tahun menjadi 4 persen untuk wanita umur 20-24 tahun. Menurut data Susenas Tahun 2010, secara nasional rata-rata usia kawin pertama di Indonesia adalah 19.70 tahun dan rata-rata usia kawin daerah perdesaan 18.94 tahun. Data BPS tahun 2010, menunjukkan rata-rata perempuan di daerah perkotaan menikah pada usia 20-22 tahun, hal ini disebabkan karena partisipasi perempuan dalam karir dan pekerjaan sebelum perkawinan sehingga dapat menunda usia perkawinan.

Karakteristik penduduk Indonesia, sebagian besar berada pada usia muda (produktif), 39,05% penduduk berada pada usia 0-19 tahun, 33,81% berada pada umur 20 hingga 39 tahun, 22,86%

berada pada umur 40 hingga 60 tahun dan penduduk yang berumur lebih dari 60 tahun hanya 4,29%. Artinya lebih dari 72% penduduk Indonesia merupakan penduduk usia muda 0-40 tahun, ini artinya penduduk Indonesia merupakan penduduk yang memiliki potensi dan harapan masa depan yang masih panjang. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4 : Penduduk Menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin

NO	Kelompok Umur	Perkotaan	Perdesaan	Satuan Jiwa
1	0-4	11.025.060	11.653.642	22.678.702
2	5--9	11.061.095	12.237.385	23.253.480
3	10--14	10.542.267	12.128.914	22.671.081
4	15-19	10.755.586	10.125.148	20.880.734
5	20-24	10.903.811	8.987.822	19.891.633
6	25-29	11.447.502	9.862.941	21.310.443
7	30-34	10.476.109	9.354.576	19.830.685
8	35-39	9.521.824	8.987.307	18.505.131
9	40-44	8.400.678	8.124.174	16.524.852
10	45-49	6.936.515	7.104.467	14.040.982
11	50-54	5.599.670	5.961.651	11.561.321
12	55-59	4.010.840	4.437.730	8.448.570
13	60-64	2.664.404	3.394.357	6.085.761
14	65-69	2.030.370	2.663.661	4.694.031
15	70-74	1.435.408	2.020.932	3.456.331
16	75-79	815.975	1.161.930	1.977.905
17	> 80	459.569	683.462	1.143.170

Sumber (source): BPS 2010

Gambar 1.2: Piramida Penduduk Indonesia, Sumber diolah dari BPS, 2010

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa penduduk merupakan potensi besar dalam pembangunan, menjadi total konsumsi nasional sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, ia juga sebagai sumber tenaga kerja yang bisa meningkatkan konsumsi. Namun penduduk juga bisa menjadi beban, tatkala terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya pengangguran.

Kalau digambarkan piramida penduduk Indonesia, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Pengangguran merupakan persoalan utama di Negeri ini. BPS mencatat bahwa pada Februari 2013, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia Sebesar 5,92 Persen, atau sekitar 18,9 juta penduduk tidak bekerja, maka arah kebijakan pemerintah mengenai kependudukan adalah bagaimana upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, kualitas penduduk dan kesempatan kerja bagi angkatan kerja baru. Mengadopsi formula

demografi dalam memperkirakan penduduk, jika tahun 2005 sebagai tahun dasarnya dan pertumbuhan ekonomi 1,3%, maka penduduk Indonesia 10 tahun dan 20 tahun ke depan adalah : $P_t = P_0 (1+r)^n$. Diperkirakan penduduk tahun 2015 = 248.154.877 dan 2025 = 282.369.164, jumlah ini di satu sisi adalah potensi dan modal dasar pembangunan nasional namun di sisi lain dapat menjadi beban pembangunan apabila persoalan kependudukan tidak dikelola dengan baik. Khususnya persoalan kesempatan kerja, kualitas kesehatan, distribusi penduduk dan lain-lain.

Tabel 1.5 : Jumlah Penduduk menurut Provinsi Sumber/Source: SP (1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010)

No	Provinsi	1971	1980	1990	1995	2000	2010
1	NAD	2.008.595	2.611.271	3.416.156	3.847.583	3.930.905	4.494.410
2	Sumatera utara	6.621.831	8.360.894	10.256.027	11.114.667	11.649.655	12.982.204
3	Sumatera barat	2.793.196	3.406.816	4.000.207	4.323.170	4.248.931	4.846.909
4	Riau	1.641.545	2.168.535	3.303.976	39.000.534	4.957.627	5.538.367
5	Jambi	1.006.084	1.445.994	2.020.568	2.369.959	2.413.846	3.092.265
6	Sumatera selatan	3.440.573	4.629.801	6.313.074	7.207.545	6.899.675	7.450.394
7	Bengkulu	519.316	768.064	1.179.122	1.409.117	1.567.432	1.715.518
8	Lampung	2.77.008	4.624.785	6.017.573	6.657.759	6.741.439	7.608.405
9	Bangka belitung	-	-	-	-	900.197	1.223.296
10	Kepulauan riau	-	-	-	-	-	1.679.163
11	DKI jakarta	4.579.303	6.503.449	8.259.266	9.112.652	8.389.443	9.607.787
12	Jawa barat	21.623.529	27.453.525	35.384.352	39.206.787	35.729.537	43.053.732
13	Jawa tengah	21.877.136	25.372.889	28.520.643	29.653.266	31.228.940	32.382.657
14	DIY	2.489.360	2.750.813	2.913.054	2.916.779	3.122.268	3.457.491

15	Jawa timur	25.516.999	29.188.952	32.503.991	33.844.002	34.783.640	37.476.757
16	Banten	-	-	-	-	8.098.780	10.632.166
17	Bali	2.120.322	2.469.930	2.777.811	2.895.649	3.151.162	3.890.757
18	Nusa tenggara barat	2.203.465	2.724.664	3.369.649	3.645.713	4.009.261	4.500.212
19	Nusa tenggara timur	2.295.287	2.737.166	3.268.644	3.577.472	1.857.000	4.683.827
20	Kalimantan barat	2.019.936	2.486.068	3.229.153	3.635.730	2.985.240	4.395.983
21	Kalimantan tengah	701.936	954.353	1.396.486	1.627.453	1.857.000	2.212.089
22	Kalimantan selatan	1.699.105	2.064.649	2.597.572	2.893.477	2.985.240	3.626.616
23	Kalimantan timur	733.797	1.218.016	1.876.663	2.314.183	2.455.120	3.553.14
24	Sulawesi utara	1.718.543	2.115.384	2.478.327	2.649.093	2.012.098	2.270.596
25	Sulawesi tengah	913.662	1.289.635	1.711.327	1.938.071	2.218.435	2.635.009
26	Sulawesi selatan	5.180.575	6.062.212	6.981.646	7.558.368	8.059.627	8.034.776
27	Sulawesi tenggara	714.120	942.302	1.349.619	1.586.917	1.821.284	2.232.586
28	Gorontalo	-	-	-	-	835.044	1.040.164
29	Sulawesi barat	-	-	-	-	-	1.158.651
30	Maluku	1.089.565	1.411.006	1.857.790	2.086.516	1.205.539	1.533.506
31	Maluku utara	-	-	-	-	785.059	1.038.087
32	Papua barat	-	-	-	-	-	760.422
33	Papua	923.440	11.173.875	1.648.708	19.412.627	2.220.934	2.833.381
Indonesia		119.208.229	147.490.298	179.378.946	194.754.808	206.264.595	238.641.326

Sumber, BPS - SP 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010)

Berdasarkan data tahun 2010, bisa terlihat bahwa Jawa Barat merupakan Propinsi yang memiliki penduduk paling besar, disusul oleh Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara sementara itu Provinsi yang memiliki penduduk terkecil adalah Papua Barat, Maluku Utara, dan Gorontalo.

PEMBANGUNAN MODAL MANUSIA

Pembangunan sumber daya manusia dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi isu nasional. Sejak tahun 1970 Indonesia mulai mengembangkan program pembangunan dengan memperhatikan aspek kependudukan, pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan dalam dimensi manusia lebih banyak terfokus pada keluarga berencana (KB)/(family planning) sebagai usaha untuk mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk. Ketika mengucapkan keluarga berencana, orang Indonesia sudah familiar dengan alat kontrasepsi, pil KB, 2 anak cukup dan lain-lain. Dan patut kita syukuri karena program tersebut cukup berhasil mengurangi laju pertumbuhan penduduk dari 3% akhir tahun 1965-an menjadi 1,7% pada akhir tahun 2005.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengendalian jumlah penduduk yang paling tepat adalah dengan meningkatkan pendidikan perempuan sehingga umur pernikahan perempuan akan meningkat serta potensi melahirkan anak akan berkurang dan

dengan sendirinya pertumbuhan fertility juga akan menurun. Dengan demikian, perluasan pendidikan untuk perempuan dirasa penting sebagai usaha untuk memperlama usia perkawinan dan mengurangi potensi kelahiran anak. Bisa diilustrasikan jika perempuan menikah pada usia 17 tahun, lalu hingga umur kesuburan 40 tahun dia bisa melahirkan 11 orang anak apabila setiap dua tahun melahirkan satu anak. Namun jika perempuan menikah pada usia 23 tahun, dan kelahiran bisa dikendalikan dengan menyusui anaknya selama 2 tahun maka potensi anak yang mungkin lahir adalah 5 orang.

Sumber daya manusia (SDM) sudah menjadi isu politik, banyak partai dan banyak kandidat pimpinan daerah menjadikan isu ini sebagai jargon politiknya, umpamanya dengan slogan "pendidikan gratis" dan lain-lain. Paling tidak pada akhir tahun 2004, pendidikan politik yang dilakukan oleh media massa, institusi pendidikan dan para akademisi berhasil meyakinkan politisi dan kalangan birokrasi akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi dasar untuk mencapai kemajuan. Dan momentum pembangunan sumber daya manusia sebagai landasan pembangunan dengan dimasukkannya aturan yang mengharuskan negara mengalokasikan minimal 20% dana APBN untuk sektor pendidikan.

A. Persoalan Kependudukan

Penduduk pada satu sisi merupakan modal dasar pembangunan. Penduduk juga merupakan objek dan subjek pembangunan. Namun di sisi lain penduduk bisa menjadi beban pembangunan, beban rumah tangga, beban bagi orang yang bekerja dalam sebuah keluarga hingga

pada akhirnya menjadi persoalan sosial dan mengurangi tingkat kesejahteraan.

Ada beberapa persoalan kependudukan, khususnya di Indonesia, diantaranya adalah :

Pertama berkaitan dengan kualitas penduduk, rendahnya produktivitas sebagai akibat dari rendahnya modal manusia dan modal sosial, sehingga pendapatan rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan investasi pada pendidikan anak menjadi rendah. Produktivitas rendah mengakibatkan pendapatan rendah, pendapatan rendah menyebabkan investasi untuk anak rendah, sehingga terjadi kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta orang (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta orang. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih banyak dibandingkan dengan penurunan penduduk miskin di daerah pedesaan. Selama periode Maret 2009-2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta, sementara di daerah pedesaan berkurang 0,69 juta orang. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2009, 63,38 persen penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan, sementara pada bulan Maret 2010 persentase penduduk miskin di daerah pedesaan 64,23 persen.

Berikut ini dilukiskan trend kemiskinan di Indonesia yang dipublikasikan oleh Bappenas tahun 2008 yang diolah dari data BPS tahun 2007.

Grafik 2.1: Trend Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin tahun 1976 - 2007

Tahun 1976, penduduk miskin mencapai 40,01 % dari total penduduk, namun setiap periode selalu mengalami penurunan, tahun 1996 tinggal 22,5%, namun pada awal tahun 1997, 1998 tingkat kemiskinan kembali naik ke 17,70% dan 24,2% sebagai akibat dari krisis moneter, bencana alam dan kenaikan harga BBM namun sejak tahun 1999 tingkat kemiskinan mulai turun hingga tahun 2007 tinggal 16,58%.

Tabel 2.1: Persentase Penduduk Miskin Beberapa Provinsi Di Indonesia Tahun 2010.

No	Provinsi	Jumlah penduduk miskin(000)			Jumlah penduduk miskin (persen)		
		Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
1	DKI Jakarta	165,40	711,10	876,60	12,47	20,97	18,58

2	Jawa Barat	669.40	709.10	1378.40	10.28	10.53	10.41
3	Jawa Tengah	124.30	273.60	397.90	6.45	8.99	8.00
4	DI Yogyakarta	156.40	324.90	481.30	6.68	8.94	8.05
5	Jawa Timur	105.30	164.70	270.10	10.53	7.29	8.28
6	Banten	367.60	674.40	1042.00	13.29	13.58	13.48
7	Bali	92.70	217.80	310.50	16.89	17.80	17.51
8	Nusa Tenggara Barat	237.90	981.10	1219.00	11.88	16.96	15.65
9	Nusa Tenggara Timur	24.00	46.20	70.20	3.73	6.69	5.37
10	Kalimantan Barat	106.60	24.60	131.20	6.77	7.08	6.83
11	Kalimantan Tengah	366.80		366.80	3.70	0.00	3.70
12	Kalimantan Selatan	2560.00	1861.50	4421.50	8.71	12.13	9.89
13	Kalimantan Timur	1946.50	2916.50	4863.40	13.11	16.55	14.98
14	Sulawesi Utara	306.50	255.60	562.10	13.10	21.29	15.88
15	Sulawesi Tengah	1606.00	3354.60	4960.50	8.90	16.88	13.08
16	Sulawesi Selatan	333.50	314.80	648.30	4.41	8.31	5.71
17	Sulawesi Tenggara	93.20	67.70	161.00	3.81	4.17	3.95
18	Gorontalo	415.40	412.90	828.30	21.65	14.41	18.02
19	Sulawesi Barat	117.40	882.90	1000.30	12.21	22.41	20.41
20	Maluku	74.20	281.50	355.70	5.49	9.04	7.96
21	Maluku Utara	32.30	109.60	141.90	4.21	7.19	6.19
22	Papua Barat	56.50	132.70	189.20	3.56	6.07	5.01
23	Papua	91.50	154.60	246.10	3.82	10.56	6.38
24	Indonesia	66.80	110.70	177.50	6.63	8.69	7.64
Indonesia		10507.80	18086.90	28594.60	8.60	14.70	11.66

Sumber: Susenas, 2010

BPS mengkategorikan penduduk miskin adalah penduduk yang berpenghasilan kurang dari \$1 perhari. Dengan demikian, penduduk yang berpenghasilan kurang dari \$1 perhari tersebut sangat rentan dengan efek eksternalitas perekonomian nasional dan global. Ketika terjadi kenaikan harga maka, jumlah penduduk miskin langsung bertambah, karena penduduk miskin tidak bisa adaptif dengan perubahan harga pada sisi pendapatannya, sebagai akibat dari rendahnya human capital, sosial capital dan produktivitas kerjanya.

Rata-rata penduduk miskin, khususnya kepala rumah tangga latar belakang pendidikannya juga rendah sehingga, pengetahuan, keterampilan dan sikap beradaptasi dengan lingkungan juga rendah. Di samping itu penduduk miskin juga memiliki sumber daya fisik yang terbatas, lahan yang terbatas bagi petani, modal kerja kecil bagi usaha kecil, dan peralatan yang sederhana bagi nelayan serta tingkat keterampilan yang rendah bagi pekerja. Penduduk miskin di perkotaan adalah para penghuni daerah kumuh perkotaan atau para urban yang migran dari desa. Biasanya di perkotaan mereka bekerja pada sektor informal, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pengumpul sampah, tukang cukur, buruh lepas, buruh bangunan, dan pekerja lainnya yang tidak memiliki modal manusia yang memadai. Sementara itu di pedesaan adalah petani atau nelayan yang hidup dengan lahan yang terbatas kurang dari 0,2 ha atau buruh pertanian atau nelayan yang bekerja dengan patron-nya atau toukenya (Elfindi, 2002)

Kedua, berkaitan dengan distribusi penduduk, dimana suatu daerah atau pulau amat padat namun daerah lain atau pulau lain penduduknya masih jarang sehingga sumber daya tidak bisa terdistribusi dengan baik. Berikut disajikan distribusi penduduk berdasarkan pulau

Gambar 2.1: Distribusi Penduduk berdasarkan Pulau

Dari gambar di atas terlihat bahwa pulau Jawa memiliki penduduk terbanyak yakni 57,5 %, disusul oleh Sumatera 21,3 %, Sulawesi 7,3 %, Kalimantan hanya 5,8 % dan pulau lainnya 7,5%. Padahal luas wilayah Jawa lebih kecil dari pulau lain yang penduduknya lebih luas.

Ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga lapangan kerja yang tersedia belum mampu untuk menyerap angkatan kerja yang ada dan timbullah pengangguran. Pada tahun 2012, pengangguran terbuka masih berjumlah 6,14% (BPS,2010). BPS mencatat Jika pertumbuhan ekonomi 1% itu sebelum tahun 2000, bisa menyerap 250.000 orang tenaga kerja baru namun pertumbuhan 1%, ekonomi setelah tahun 2000 hanya bisa menyerap angkatan kerja baru 45.000 orang, artinya Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 11% pertahun untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja sebesar 2.835.122 orang pertahun.

Keempat, persoalan layanan publik. Masih terbatasnya layanan publik yang murah untuk melayani kebutuhan pokok masyarakat

diantaranya adalah layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, air bersih, sarana ekonomi dan lain-lain sehingga penduduk sulit untuk mendapatkan layanan tersebut. Pada layanan air bersih, penduduk yang mendapatkan layanan air bersih di salah satu kota di Indonesia yaitu kota Bandung hanya 9,41%. Sedangkan untuk layanan pendidikan sendiri, Pemerintah mengalokasikan Rp 331,8 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013. RAPBN-nya tahun 2013, tapi implikasinya tahun 2010?

B. Penduduk dan Pembangunan Ekonomi

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang dominan dalam penentuan kinerja dan produktivitas suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Kuantitas produk yang akan dihasilkan dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, modal, tenaga kerja, teknologi dan lain-lain. Cobb Douglas menjelaskan tentang fungsi produksi ini disederhanakan dalam bentuk hubungan matematis antara output (Q) yang dihasilkan dengan input produksi. Q merupakan total produksi yang dihasilkan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja, lahan, teknologi dan lain-lain dan secara matematis bisa dituliskan $Q = F(K, L, M, \dots, N_i)$. Namun dalam analisis biasanya disederhanakan menjadi dua variabel saja yang mempengaruhi output, yakni output (Q) yang dihasilkan disebabkan oleh akumulasi modal (K) dan tenaga kerja (L).

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan output ekonomi, sehingga analisis ekonomi yang dipelopori oleh Adam Smith, Jhon Stuart Mill, Theodore Schultz, Hervey Leibenstein dan Garry S Becker (1960-an), Schultz (1960), Boli-Bernet (1977), Collins (1979), Robinson (1985),

(Todaro, 2003) dalam Sanderson, 2003; 500, menguraikan bahwa faktor manusia atau tenaga kerja merupakan faktor yang amat penting dalam pembentukan output dalam perekonomian nasional, termasuk dalam skala rumah tangga.

Kajian ekonomi tentang sumber daya manusia dalam perekonomian diletakkan fondasinya oleh Malthus dan Gary S. Becker (1962) dalam artikelnya berjudul "*Investasi in Human Capital: A Theoretical analysis*" yang diterbitkan oleh jurnal of political economy LXX. Dan tahun 1964 Becker mempublikasikan tulisan itu dalam bentuk buku berjudul "*Human Capital 1 st ed*", yang diterbitkan di New York: Columbia University Press. Kemudian kajian tentang tenaga kerja juga ditelaah oleh Jacob Mincer (1962), Theodore W. Schultz (1963), *The Economic Value of Education* dan Jacob Mincer (1974) juga memberikan kontribusi pemikiran tentang education, experience dan Earning (1974) dan George Psacharopoulos (1975) tentang Earning and Education in OECD Countries. Sementara itu, pada tahun 2002 Psacharopoulos juga memberikan kontribusi empiris pada penelitian "*Return to Investment in education: A Further update*" yang diterbitkan oleh world bank.

Proses pendidikan akan memberikan bekal kepada manusia untuk lebih ahli, lebih cermat dan lebih teliti sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja di perusahaan dan lapangan perekonomian lainnya. Sementara itu dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk atau akumulasi modal manusia maka akan semakin tinggi tingkat output nasional suatu negara, termasuk juga semakin mapan suatu negara dalam mencapai tingkat pertumbuhannya. Indonesia sebagai sebuah bangsa terlahir dalam sebuah perjuangan yang panjang, lebih dari 353,5 tahun di bawah

kendali bangsa Portugis, Inggris, Belanda, dan bangsa Jepang, selama itu pula proses eksploitasi ekonomi, politik, sosial dan budaya terjadi sehingga terjadi perubahan budaya dan etos kerja manusia Indonesia. Potensi positif yang telah ada dan berkembang di tengah komunitas masyarakat berubah menjadi potensi negatif sebagai akibat dari politik pecah belah penjajah sehingga menimbulkan budaya kerja yang kurang baik. Namun proses penjajahan itu efek baiknya bagi bangsa adalah terbangunnya nasionalisme dan rasa kebangsaan serta solidaritas sesama terjajah dan pada akhirnya menjadi spirit untuk bangkit dan merdeka menjadi negara yang bermartabat.

Rasionalnya, pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan dan diperhatikan kualitasnya sehingga tetap menjadi modal dasar bagi pembangunan. Program kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana semestinya adalah program prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga agar penduduk tetap menjadi potensi pembangunan dan modal dasar pembangunan untuk kejayaan dan kesejahteraan serta keadilan bersama, berbangsa dan bernegara, di samping itu perlu dikembangkan kembali semangat dan nilai-nilai sosiokultural sebagai dasar dan model pembangunan yang relevan untuk memperkuat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh termasuk dalam hal mengurangi kemiskinan. Kemiskinan dan rendahnya daya saing bangsa merupakan persoalan utama dalam perekonomian Indonesia. Rendahnya produktivitas rumah tangga di Indonesia kuat dugaan disebabkan oleh beberapa faktor, yang kita kenal dengan lingkaran kemiskinan, dimana rendahnya pendapatan karena rendahnya produktivitas, rendahnya produktivitas karena rendahnya modal,

rendahnya modal karena rendahnya nilai tabungan dan rendahnya nilai tabungan karena rendahnya pendapatan.

Pada dasarnya Indonesia memiliki peluang yang amat besar untuk menjadi negara makmur, besar dan bermartabat. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, beragam dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Manusia atau sumber daya manusia merupakan faktor yang aktif dalam pembangunan dan variabel yang amat penting dalam eksistensi bangsa. Empat indikator pembangunan manusia menunjukkan bahwa data dari lembaga kesehatan dunia (WHO) menyebut angka harapan hidup penduduk Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2010 angka harapan hidup usia di atas 60 tahun mencapai 20,7 juta orang kemudian naik menjadi 36 juta orang. Kenaikan tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai 71 juta orang pada tahun 2050.

Berdasarkan data UNDP, IPM Indonesia mengalami kemajuan dalam 40 tahun terakhir. Antara tahun 1980 hingga 2012, nilai IPM Indonesia meningkat sebesar 49 persen atau peningkatan rata-rata 1,3 persen per tahun dari 0,422 menjadi 0,629. Pada periode yang sama, harapan hidup orang Indonesia naik 12,2 persen per tahun dari 57,6 persen menjadi 69,8 persen untuk saat ini. Peningkatan juga terjadi pada harapan lama sekolah sebesar 4,6 tahun dari 8,3 tahun pada 1980 menjadi 12,9 tahun pada tahun 2012. Sedangkan PDB per kapita tahun 2012 sebesar 4,154 persen atau naik sebesar 225 persen.

Membangun sistem pendidikan yang mapan, dengan berorientasi pada keunggulan bersaing merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM. Pendidikan merupakan usaha untuk menciptakan manusia yang siap untuk memasuki zaman

yang selalu berubah. Potensi dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia membuat manusia dapat berfikir dan selalu belajar sebagai salah satu tugas kemanusiaannya. Ahli sosiologi dan antropologi membagi beberapa jenis aktivitas dan kemampuan manusia untuk bisa beradaptasi, transformasi kebudayaan dan evolusi kebudayaan dengan lingkungan di antaranya adalah sosialisasi (*socialization*), internalisasi (*internalization*) dan enkulturasi (*enculturation*), (Koentjaraningrat, 2002).

Perbaikan layanan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kebijakan yang amat penting dilakukan, dalam bentuk peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan program lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM tersebut (Todaro, 2003). Implikasi dari pemikiran ini adalah bagaimana upaya rumah tangga dan upaya pemerintah bisa bersinergi untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, terlebih lagi dalam konstitusi negara telah mengamanatkan sektor pendidikan minimal dibiayai 20% dari total Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Visi pembangunan sumber daya manusia mesti mempertimbangkan potensi dan aspek kepribadian dan kemanusiaannya. (Syam 2006:79) menjelaskan terdapat tiga potensi manusia yakni pertama, potensi jasmaniah yang menampilkan citra keunggulan terutama dalam hal panca indera seperti mata, hidung, mulut, telinga dan anggota badan. Kedua, potensi kerohanian yang berkembang mulai dari mental intelektual, rasa, karsa, cipta, karya, budi, nurani hingga cinta dan kebijakan dalam dimensi horizontal maupun vertikal. Ketiga, potensi kerohanian dalam makna tumbuhnya suatu kesadaran penghayatan kepercayaan (iman), ketulusan, cinta dan pengabdian, kepasrahan dan harapan atas amanat dan anugerah

yang dikaruniakan maha penciptanya.

Wawasan kodrat, potensi dan filosofi kemanusiaan ini diperlukan sebagai usaha untuk menciptakan suatu system pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan dan kompetensi pada pengetahuan tentang hakekat diri sebagai makhluk pribadi dan hamba Tuhan serta sebagai diri (individual), sebagai anggota masyarakat dan bangsa yang memiliki tugas-tugas kemanusiaan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan sebagai tujuan hakekat hidup (*redho-Nya*) dan keharmonisan sesama manusia sebagai bagian dari tujuan hidup pada proses kehidupan di dunia.

Terciptanya manusia Indonesia yang bertaqwa, berbudi luhur dan memiliki kecakapan hidup dalam meningkatkan produktivitas diri, keluarga, masyarakat dan bangsa merupakan visi yang harus dijalankan oleh institusi pendidikan baik formal maupun non formal, sehingga Indonesia dimasa mendatang memiliki keunggulan bersaing dalam pergaulan internasional dan memiliki ketahanan dan ketangguhan dalam terjaganya Negara kesatuan Republik Indonesia dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara dan juga menjadi spirit serta motivasi dalam pergaulan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat.

Secara legal menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika (beradab dan berwawasan budaya bangsa Indonesia) memiliki nalar (maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab), berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif serta demokratis)

dan berbadan sehat sehingga menjadi manusia yang mandiri.

Upaya pendidikan pada jenjang sekolah, diharapkan bisa membangkitkan karsa generasi muda, mengurangi sifat kemalasan dan meningkatkan etos kerja serta semangat kerja yang tinggi dan meningkatkan angka melek huruf, kemampuan teknologi dan informasi. Sistem pendidikan pada jenjang sekolah seharusnya memiliki karakteristik lokal, nilai kebangsaan dan membangun paradigma pada kecerdasan finansial. Pembangunan paradigma kecerdasan finansial ini merupakan solusi atas rendahnya karsa, rendahnya produktivitas masyarakat dan terbiasanya generasi muda saat ini dengan kebiasaan konsumtif atau pola hidup berhura-hura.

Pemimpin dunia dari 189 negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations), tahun 2000 mencanangkan program Millenium Development Goals (MDGs) dengan visi sebagai berikut : (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangai HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi persoalan kependudukan.

Bappenas dan PBB, 2007 mempublikasikan pencapaian MDGs Indonesia mengalami peningkatan, dan secara umum dapat digambarkan dalam gambar berikut ini:

Sumber : Bappenas, 2007

MODAL MANUSIA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Pembentukan Modal Manusia

Modal sebenarnya merujuk pada pengertian pada sejumlah kekayaan, aset yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, masyarakat atau bangsa. Dalam hal kaitannya dengan pembentukan kekayaan sebenarnya harus dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:

1. Mengurangi konsumsi sekarang dan menyisihkan penghasilan untuk disimpan dalam bentuk tabungan.
2. Meningkatkan jam kerja sehingga waktu yang digunakan untuk menghasilkan output semakin tinggi.
3. Meningkatkan waktu yang digunakan untuk mencari harga jual barang yang tinggi dan harga beli yang rendah.
4. Mengorbankan uang yang dimiliki untuk menggaji orang lain yang bekerja dalam rangka meningkatkan output barang dan jasa.
5. Meningkatkan inovasi produk sehingga pelanggan tetap pada membeli produk yang dijual atau mengganti dengan produk baru.

6. Dan menggunakan tabungan yang dimiliki untuk membeli kekayaan yang selalu bertambah, bukan berkurang atau bukan aset yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi.

Dalam bentuk kekayaan manusia (*human capital*), Becker (1975) merupakan salah satu ahli ekonomi yang mendalami kajian tentang pembentukan modal manusia dan peran modal manusia dalam perekonomian. Beliau menjelaskan bahwa pembentukan modal manusia itu bisa dilakukan dengan tiga cara yakni: pendidikan formal yang berjenjang (*Schooling*), pendidikan dan latihan kerja (*job training*), migrasi (*migration*), proses mencari kerja atau mencari harga yang lebih kompetitif (*searching dan hunting*).

Keempat proses tersebut bisa dilakukan sinergi antara upaya rumah tangga dan upaya negara. Pemerintah bisa mengalokasikan sumber daya (anggaran) publik pada investasi SDM, rumah tangga juga bisa mengurangi konsumsi sekarang untuk investasi modal manusia. Namun tentu saja sama halnya dengan investasi ke dalam aset fisik, investasi pada modal manusia pada akhirnya akan mendapatkan hasil, manfaat ekonomi, manfaat sosial dan dampak pada perbaikan kehidupan masyarakat di masa mendatang (*output, benefit, outcomes dan impact*). Fakta menunjukkan bahwa semakin tinggi investasi dalam bentuk dana dan waktu yang digunakan oleh individu maupun rumah tangga pada investasi modal manusia, maka peluang untuk mendapatkan pengembalian investasi (*rate of return*) juga akan semakin tinggi. Bentuk-bentuk pembiayaan investasi modal manusia bukan hanya pembiayaan pendidikan tetapi juga termasuk makanan dan kesehatan yang cukup untuk anak.

B. Pendidikan dan Modal Manusia

Secara filosofis sesungguhnya dalam kitab suci kita masing-masing telah diberikan sinyal oleh Allah SWT, misalnya dalam al-Quran ratusan ayat yang menjelaskan perlunya kita berfikir rasional, dan mengutamakan ilmu pengetahuan dan menuntut ilmu serta tingginya derajat orang yang berilmu. Dalam surat al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman :

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Modal manusia merupakan salah satu modal atau kekayaan yang bisa dan harus dimiliki oleh individu, rumah tangga dan negara. Konsep modal manusia secara empiris mulai didalami lebih mendalam oleh Adam Smith, Jhon Stuart Mill, Theodore Schultz, Hervey Leibenstein dan Garry S Becker (1960-an), Schultz (1960), Collins (1979), Todaro, (2003), Boli-Bernet (1977), dan lain-lain.

Becker (1975) merupakan salah satu ahli ekonomi yang mumpuni dan menekuni lebih mendalam dan meletakkan fondasi yang kuat dalam kajian modal manusia. Becker berkontribusi pemikirannya bahwa manusia bisa meningkatkan nilai dalam

dirinya melalui proses pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan dan pelatihan kerja, program dan pemeliharaan kesehatan serta proses mencari kerja dan mencari harga yang lebih tinggi bagi produsen atau lebih murah bagi konsumen, sehingga dengan proses tersebut, manusia akan lebih banyak mendapatkan pengetahuan, informasi dan keterampilan dalam mengarungi kehidupannya.

Kemudian diperoleh sebuah hipotesis bahwa tinggi rendahnya kepemilikan aset dan pendapatan orang di dunia ini sesungguhnya ditentukan oleh sejauh mana atau sebesar apa mereka memiliki modal manusia tersebut. Ada orang yang berpenghasilan milyaran rupiah perbulan, namun juga ada orang yang berpenghasilan \$1 perhari. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan tingkat modal manusia yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Sejalan dengan Becker, Yacob Mincer (1972), Edward Denison (1962) dan Psacharopoulos (1994) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan seseorang amat menentukan tingkat produktivitas dan pendapatannya di kemudian hari. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan pendapatan dimana, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi modal yang dimilikinya dan semakin tinggi pula kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Di samping itu, modal manusia dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi akan mendapatkan pendapatan permanen atau pasif income yang lebih tinggi di masa tua, karena memiliki sejumlah aset fisik dan aset non fisik yang masih menghasilkan pendapatan.

Ketika manusia telah berumur pensiun yakni di atas 55 tahun, kekuatan fisik sudah mulai menurun karena kondisi kesehatan sudah mulai turun, tulang mulai keropos dan fungsi-fungsi panca indra

juga sudah mulai berkurang maka produktivitas tenaga dan pikiran juga akan berkurang. Namun bagi seseorang yang memiliki modal manusia yang lebih tinggi, investasi modal manusia yang dimiliki masih relatif tinggi nilai dan produktivitasnya dibandingkan dengan seseorang yang memiliki modal manusia yang lebih rendah.

Contoh, X adalah seseorang yang tamatan SD, pada masa mudanya bekerja sebagai tukang becak setiap hari di sebuah pasar. Orang tuanya hanya melakukan investasi selama 6 tahun di sekolah dasar, kemudian karena tidak memiliki skills dan pengetahuan yang cukup akhirnya memilih becak sebagai sumber kehidupan. Setiap hari X rata-rata mendapatkan penghasilan Rp 30.000,- . X bekerja 24 hari sebulan karena 6 hari digunakan untuk libur (leisure) dan acara keluarga, sehingga rata-rata perbulan X mendapatkan penghasilan Rp 720.000,-. Penghasilan itu tidak akan naik lagi, karena hanya mengandalkan kemampuan fisik, dan semakin tua umur X, dia tidak bisa lagi menggunakan waktunya saat ini sama seperti dengan masa mudanya dahulu, dia harus mengurangi jam kerja karena fisiknya sudah mulai lemah dan adanya kebutuhan waktu istirahat sehingga penghasilan tadi mulai turun dan bisa jadi turun seperduanya ($\frac{1}{2}$) karena waktu untuk bekerja sudah mulai berkurang. Sampai pada umur tua lebih dari 55 tahun, X yang kakek sudah tidak bisa lagi menggunakan waktu tua-nya untuk mendayuh becak, sehingga otomatis penghasilannya juga hilang.

Beda halnya dengan seorang Y, yang juga anak petani, pada masa kecil orang tuanya menginvestasikan uang yang cukup besar terhadap Y, sehingga Y berhasil menamatkan pendidikan di sekolah kejuruan. Orang tua Y, mengurangi konsumsi-nya dan menginvestasikan sebagian penghasilan terhadap Y, mulai dari

Sekolah Dasar selama 6 tahun, SLTP 3 tahun, SMK 3 tahun sehingga total waktu Y yang digunakan untuk investasi modal manusia adalah selama 12 tahun. Y menggunakan waktu 1 tahun untuk mencari kerja sehingga total investasi modal manusianya 13 tahun. Kemudian Y pada umur 19 tahun mendapatkan pekerjaan di sebuah Bank, karena memiliki keahlian khusus dalam bidang pembukuan, rata-rata penghasilan Y sebulan Rp 800.000,- dan setiap tahunnya meningkat Rp 50.000,- sehingga pada umur 40 tahun Y telah memiliki penghasilan Rp 2.800.000,-. Dari penghasilan tersebut Y masih sempat menabungkan gajinya Rp 50.000/bulan. Pada umur 40 tahun bank menawarkan Y pensiun muda dengan pesangon Rp 200 juta. Lalu Y memilih untuk pensiun muda dan dengan uang tersebut Y mulai berbisnis sehingga penghasilannya tetap ada.

Pada umur 30 tahun Y, menambah investasinya dengan meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi dan mengambil akta IV/AA, sehingga pada masa senggangnya Y mengajar di beberapa sekolah dan hal ini dapat menambah penghasilannya.

Dapat digambarkan secara grafis perbedaan X dan Y sebagai berikut :

Grafik : Perbedaan Pendapatan dan Investasi Antara tamat SD, SLTA, dan Perguruan Tinggi.

Psacharopoulos (1995) memformulasikan pengembalian (*retur on investment of human capital*) sebagai berikut :

$$\sum_{t=1}^{4z} \left(\frac{(W_u - W_s)^t}{(1+r)^t} - \sum_{t=1}^z (W_s + C)(1+r)^t \right)$$

Dimana $W_u - W_s$ merupakan pendapatan tamatan perguruan tinggi dikurangi dengan pendapatan tamatan pendidikan menengah dan C merupakan biaya langsung pendidikan dalam bentuk biaya SPP/DPP (*tuition fee*), biaya buku, biaya pembuatan tugas makalah, r merupakan tingkat suku bunga atas *oppourtunity cost* atas investasi pendidikan.

Sementara itu benefit sosial bisa dihitung dengan formula :

$$\text{Sosial } r = \frac{Wu - Ws}{5(Ws + Cu)} \dots \dots \dots \text{Psacharopoulos (1995)}$$

Inilah contoh perbedaan penghasilan yang disebabkan karena investasi modal manusia sehingga bisa dikatakan bahwa investasi modal manusia amat diperlukan bagi manusia agar potensi diri yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT berfungsi secara maksimal. Pembangunan modal manusia amat dipentingkan, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga sosial, perusahaan, dan pemerintah. Keluarga merupakan pilar utama dalam proses pembangunan modal manusia. Orang tua sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan anak-anaknya untuk memenuhi tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangannya. Orang tua seharusnya menyediakan makanan dan gizi yang cukup sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya dan juga gizi yang cukup dapat menjamin anak akan tumbuh dengan sehat. Orang tua juga harus menyediakan kebutuhan pendidikan bagi anak sebagai bekal anak di kemudian hari.

Pendidikan kepada anak merupakan salah satu investasi yang mesti dilakukan oleh orang tua. Ibu memiliki peran yang signifikan dalam mendidik anak di rumah, kemudian menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan formal. Dengan demikian, anak memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Anak mesti memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan mendengar. Dengan kemampuan dasar tersebut anak akan dapat menangkap data dan menterjemahkan data itu sehingga menjadi informasi, dengan informasi itu anak akan bisa menentukan pilihan dan keputusan yang tepat dalam bertindak.

Pendidikan atau belajar akan mengasah anak untuk berfikir

rasional sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang rugi mana yang untung, mana yang tepat mana yang tidak tepat. Kemampuan rasional juga mengarahkan anak agar berfikir dan memecahkan fenomena alam dan sosial ini secara masuk akal, tidak lagi langsung cepat menyerah dan kembali kepada mitos dan dogma.

Contohnya ketika terjadi banjir di desa, anak bisa berfikir kenapa terjadi banjir. Banjir terjadi ketika turun hujan, lalu permukaan tanah tidak bisa menyerap air, maka air berusaha mencari tempat yang rendah, ketika air dihambat oleh suatu media (tembok, tumpukan tanah, dll) maka air akan mencari celah ke bawah dan ke samping, namun ketika ke bawah dan ke samping juga tidak bisa, maka air akan berkumpul, dan ketika kekuatannya sudah melebihi dari kekuatan media tadi maka air akan menghancurkan media tersebut dan tetap mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tatkala tanah yang lebih rendah tidak tersedia saluran air yang memadai, maka air akan menggunakan permukaan tanah sebagai tempat tergenang atau jalan untuk menuju tempat yang paling rendah. Kemudian jika volume air lebih besar dari pada volume sungai maka air akan melimpah dan terjadilah banjir.

Atau dalam pendekatan beberapa kasus, banjir terjadi karena penebangan hutan, karena dam irigasi jebol, karena rusaknya drainase kota dan lain-lain. Artinya fenomena tersebut dibaca dengan akal, kemudian anak akan mencari solusi yang tepat pula untuk memecahkan permasalahan banjir. Jangan sampai terlalu banyak generasi kita yang berfikir bahwa banjir terjadi karena kutukan, lalu pergi ke pohon besar atau kuburan untuk meminta sesuatu agar diampunkan kesalahannya dan meminta kepada roh terdahulu untuk

tidak menurunkan hujan dan membanjirkan kota atau desa.

Benar, bahwa ada keterbatasan manusia, dengan keterbatasan itu manusia perlu menyerah, maka penyerahan itu hanya kepada yang Satu yakni Tuhan semesta Alam, Allah SWT. Dialah penyerahan kita yang sempurna. Namun juga bukan berarti kita begitu cepat untuk menyerah, karena Tuhan menciptakan dunia ini dalam sebuah sistem yang seimbang dan dalam sebuah hubungan kausalitas. Tatkala keseimbangan itu terganggu oleh manusia maka alam akan mencari keseimbangan baru dan terkadang dalam proses pencarian keseimbangan tersebut akan mengalami guncangan atau bencana yang membuat kerusakan yang dahsyat, seperti banjir bandang, gempa, tsunami, hujan, dan lain-lain.

Maka dengan demikian, orang tua harus dapat berusaha agar anaknya dapat beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Lingkungan merupakan alam di sekitar kita dan di luar kemampuan anak untuk bisa mempengaruhi lingkungan tersebut, serta terdapat banyak faktor eksternal yang tidak bisa dipengaruhi oleh anak, sehingga anak mesti menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya merupakan kegunaan dan fungsi untuk mempersiapkan anak dalam proses pembelajaran pada usia sekolah, dalam bentuk kegiatan bersekolah. Sekolah formal dimulai dari sekolah dasar 9 tahun (SD, SLTP), sekolah menengah 3 tahun (SLTA) dan Pendidikan tinggi dalam bentuk diploma 1-3 tahun, sarjana, 3,5 – 5 tahun dan pascasarjana 2-5 tahun.

Proses pendidikan berjenjang itu disesuaikan dengan umur dan tugas-tugas perkembangan anak. Seorang anak yang melewati proses pendidikan yang memadai, akan mampu berfikir dan menggunakan

sumber daya yang efisien sehingga kepuasannya akan tercapai. Contohnya dahulu orang tua kita melakukan pola pertanian ladang berpindah-pindah sebagai usaha untuk mempertahankan produktivitas pertanian. Ladang berpindah-pindah memerlukan lebih dari 7 hektar lahan perkeluarga untuk dipergilirkan masa tanamnya, karena dalam pengalaman orang tua dulu, jika suatu lahan telah dipakai maka kesuburannya akan berkurang, dan jika tetap dipakai pada tahun kedua akan berdampak pada pengurangan hasil pertanian, karena unsur hara tanah sudah berkurang, gulma dan rumput-rumput kecil amat banyak yang tumbuh sehingga penyiangannya amat sulit. Rata-rata dalam masa penen diperlukan 3-5 kali penyiangan. Sehingga orang tua kita punya solusi dengan ladang berpindah. Suatu lahan baru bisa digunakan kembali setelah lahan tersebut tidak dipakai selama 7 tahun, dengan dasar pemikiran bahwa tingkat kesuburannya akan kembali membaik dan proses penyiangannya juga tidak sulit sehingga produksi pertanian dapat meningkat.

Namun pola tersebut sudah ditinggalkan, ternyata dengan pola pemupukan atau pengolahan tanah dengan mencangkul, atau menaikkan humus tanah yang dibawa ke permukaan tanah juga membantu meningkatkan kesuburan, dan dengan mengairi lahan, melakukan penyiraman secara teratur juga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Sehingga kita sekarang tidak lagi memerlukan lahan yang luas untuk dipergilirkan tetapi cukup dengan satu lokasi dengan pola intensif dan produktivitas lahan tetap dapat terjaga.

Inilah beberapa contoh perlunya anak dipersiapkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengarungi kehidupan yang selalu berubah. Banyak tujuan, fungsi dan makna

pendidikan bagi kehidupan anak di kemudian hari, dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek kehidupan ekonomi, kehidupan sosial dan keagamaan, kehidupan keluarga dan hubungannya dengan tugas-tugas kemanusiaannya di kemudian hari sebagai khalifah di muka bumi.

Dalam kehidupan ekonomi, anak dapat memahami bagaimana berperilaku lebih rasional secara ekonomi. Sebagai konsumen, anak dapat memilih sumber daya yang terbatas untuk mendapat barang dan jasa yang dibutuhkan sehingga tercapai kepuasan yang maksimal, menggunakan waktu produktif dan waktu liburan dengan efisien. Sebagai produsen, anak mampu memilih sumber daya yang terbatas untuk mencapai profit yang optimum.

Dalam perilaku konsumen, bagaimana anak berperilaku rasional dalam menggunakan uang, tatkala anak memiliki uang Rp 1.000.000,- barang apa yang dipilih sehingga kepuasannya bisa tercapai secara maksimal. Biasanya semakin banyak jenis atau atribut yang dipilih maka semakin tinggi kepuasan ekonomi yang akan diperoleh oleh seorang konsumen. Tetapi konsumen yang rasional juga mesti mempertimbangkan apakah dengan membelanjakan uang tersebut, dia akan menambah kekayaannya atau justru mengurangi kekayaannya.

Banyak barang-barang pemuas kebutuhan kita sekarang tatkala kita beli dari uang jerih payah kita, akhirnya akan menambah beban kita atas penguasaan barang tersebut yaitu sejumlah biaya tambahan untuk memelihara dan menjaga fungsi barang, maka barang tersebut akhirnya akan memiskinkan konsumen pada konteks tertentu. Umpamanya, Handphone (HP) bagi pelajar. HP sebenarnya bagi pelajar tidak memiliki fungsi yang relevan dalam proses belajarnya,

fakta menunjukkan HP bagi pelajar tidak banyak digunakan untuk berkomunikasi yang dapat mempertinggi hasil belajarnya, namun HP hanya digunakan untuk gaya hidup baru, bercakap-cakap, ngobrol, bersanda gurau, dan sejenisnya. Kepemilikan HP akan menimbulkan biaya seperti biaya pulsa, biaya pemeliharaan, biaya listrik dan biaya penyusutan atas kepemilikan HP tersebut sehingga anak dan orang tuanya meningkatkan kebutuhan dana untuk HP dan tentu saja berhubungan negatif (*trade off*) dengan kepemilikan buku dan sumber belajar lain karena alokasi dana akan menjadi lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibandingkan alokasi dana untuk peningkatan modal manusia.

Modal manusia bisa dipandang dalam dua perspektif yakni perspektif individu atau rumah tangga dan perspektif agregatif atau nasional. Dalam perspektif individu, modal manusia merupakan suatu konsep yang di dalamnya melekat ukuran dan indikator secara individual (*micro*). Modal manusia merupakan kapabilitas pribadi dalam bentuk sejumlah pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, sikap yang dimiliki dan dengan hal tersebut, mereka bisa meningkatkan nilai pribadinya dengan lebih baik.

Sementara itu dalam perspektif nasional atau makro, para ahli ekonomi menghitung modal manusia dalam bentuk jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu seperti jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA dan perguruan tinggi (lama sekolah) karena dengan menamatkan pendidikan SLTA ke-atas diasumsikan bahwa seseorang akan memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk meningkatkan dirinya dan secara agregatif keahlian tersebut diukur dalam bentuk jumlah orang yang menamatkan pendidikan tertentu.

Pendidikan merupakan upaya sistematis yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah akumulasi modal manusia dalam suatu negara. Di Indonesia sekarang ini nampaknya sudah menjadi kesadaran bersama sehingga proses politik untuk menghasilkan kebijakan pro-pendidikan sudah mulai terlihat. Hal ini terlihat dari amandemen UUD 1945 yang mewajibkan minimal 20% dari total Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) harus dialokasikan pada sektor pendidikan. Di negara maju, kesadaran akan pentingnya pendidikan lebih dulu ratusan tahun yang lalu dibandingkan dengan Indonesia.

Potensi dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia membuat manusia bisa berfikir dan selalu belajar sebagai salah satu tugas kemanusiaannya. Ahli sosiologi dan antropologi membagi beberapa jenis aktivitas dan kemampuan manusia untuk bisa beradaptasi, melakukan transformasi kebudayaan dan evolusi kebudayaan dengan lingkungan di antaranya adalah sosialisasi (*socialization*), internalisasi (*internalization*) dan enkulturasi (*enculturation*), (Koentjaraningrat, 2002).

Proses ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah sistem pendidikan (*education*) yang lebih sistematis sebagai sistem budaya atau *interaksi intelektual* yang formal atau informal. Collins (1977, dalam Sanderson, 2003) mengemukakan terdapat 3 tipe dasar pendidikan yang ditemukan di seluruh masyarakat dunia yakni pendidikan dan keterampilan praktis, pendidikan untuk keanggotaan kelompok status dan bisnis serta pendidikan birokratis. Lebih lanjut Collins (dalam, Sanderson, 2003) menjelaskan sistem pendidikan keterampilan praktis dirancang untuk memberikan keterampilan dan kemampuan teknis tertentu, yang dipandang

penting dalam melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan dan lain-lain (pendidikan kursus/magang keahlian). Pendidikan kelompok status dilakukan bertujuan untuk simbolisasi memperkuat prestise dan hak-hak istimewa (*privilege*) kelompok elit dalam masyarakat yang memiliki strata sosial (pendidikan informal). Kemudian, pendidikan birokrasi diciptakan oleh pemerintah untuk melayani salah satu atau kedua tujuan, untuk seleksi rekrutmen posisi-posisi pemerintahan, penekanan pada ujian, syarat kehadiran, peringkat dan derajat (Pendidikan formal).

Dalam penerapannya, masyarakat agraris dan industri menggabungkan tiga bentuk sistem pendidikan tersebut dan kemudian dalam fase selanjutnya pendidikan mengalami perkembangan (*expansional*). Di Eropa muncul sistem pendidikan mobilitas yang disponsori (*Sponsored mobility*), dimana para peserta didik (siswa) ditempatkan pada jalur/jenjang pendidikan berdasarkan pertumbuhan dan perkembangannya. Di Unisoviyet (Rusia) dan Jepang timbul suatu sistem pendidikan mobilitas kontes (*Contes-mobility*), tidak memiliki penyaluran yang resmi secara informal dan tersembunyi serta terdapat kompetisi yang terbuka untuk mencapai pendidikan yang maju, (Collins, 1979, dalam Sanderson, 2003).

Di Amerika Serikat berkembang sistem pendidikan berdasarkan jenjang sekolah, pra sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi sebagai implikasi dari teori fungsional. Pendidikan berkembang karena kebutuhan masyarakat industri dengan perubahan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. (Collins, 1979, dalam Sanderson, 2003).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dan kualitas modal manusia. Karena pendidikan

merupakan proses yang sistematis, yang dalamnya terjadi interaksi sosial antara pendidik dan peserta didik, dimana pendidik berfungsi sebagai fasilitator belajar dan mengarahkan peserta didik untuk belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku, sikap dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari yang tidak kompeten menjadi kompeten, dari yang tidak pandai membaca huruf menjadi pandai membaca huruf, dari yang tidak pandai menulis menjadi pandai menulis, dari yang tidak pandai mengungkapkan menjadi pandai mengungkapkan dan pandai mendengar serta dapat menerima pengertian. Kemudian, semakin lama umur peserta didik, maka semakin tinggi tingkat perkembangan psikologisnya dan semakin cepat peserta didik tersebut untuk mulai berfikir rasional, dapat menjelaskan, dapat menguraikan, dapat memikirkan sebab akibat, dapat membandingkan dan dapat memberikan penilaian baik dan buruk, tinggi-rendah, hitam-putih, dan dapat menentukan pilihan sehingga pilihan tersebut tepat, akurat dan bisa dipercaya.

Proses pendidikan memungkinkan manusia memiliki kebiasaan belajar yang baik, karena pendidikan membiasakan orang untuk membaca, menulis, mendengar, berbicara, menganalisa dan menghasilkan suatu kesimpulan, membuat prosedur dan langkah kerja, bisa menentukan mana yang dimulakan (*start*) dan mana yang diakhirkan (*finishing*). Dalam pendidikan dasar, diawali dengan bagaimana peserta didik dapat mengenali huruf dan angka, kemudian peserta didik dikenalkan dengan fungsi-fungsi perkembangannya, dan mulai diberikan pengetahuan dasar tentang ilmu pengetahuan serta diperkenalkan tentang bagaimana berbudaya dan bersikap.

Kemudian, dalam pendidikan menengah peserta didik sudah

mulai dirangsang untuk berfikir, menganalisis dan merumuskan suatu persoalan agar dapat dipecahkan secara lebih efisien dan juga diterampilkan dengan prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat menyelesaikan suatu produk tertentu. Contohnya, mengkombinasikan beberapa bahan, lalu diproses dan kemudian menghasilkan suatu produk yang bisa mempertinggi kepuasan manusia. Dan di pendidikan tinggi peserta didik diperkenalkan konsep dasar, diberikan pengetahuan yang memadai, bisa melakukan sesuatu, menganalisis dan menghasilkan suatu kesimpulan atas pendekatan-pendekatan keilmuan seperti *positivism*, *constructivism*, *critical theory*, *post-modern*, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif.

Proses pendidikan tersebut akhirnya menciptakan suatu produk pendidikan yang dinamakan dengan "tamatan pendidikan" dalam bentuk tamatan SD, tamatan SLTP, Tamatan SMA/SMK/MA dan tamatan perguruan tinggi. Kumpulan tamatan-tamatan itulah yang dinamakan dengan akumulasi modal manusia nasional. Individu yang menamatkan pendidikan tersebut memiliki sejumlah kompetensi, keahlian dan kemampuan dasar yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Organization For Economic Co-operation and Development (OECD, 2008) mengemukakan, berbagai ragam elemen dalam menyusun modal manusia seperti atribut pribadi, keterampilan, pendidikan, bakat, dan bahkan kesehatan. Beberapa pengetahuan, keterampilan dan kapabilitas individu dapat dijadikan sebagai ukuran modal manusia di antaranya adalah: 1) Komunikasi (*Communication*) (termasuk penguasaan bahasa asing) mendengar, mengucapkan, membaca dan menulis, 2) Kemampuan berhitung (*Numeracy*), 3)

Keterampilan Intra-personal seperti motivasi untuk belajar, termasuk belajar sendiri, kemampuan untuk berbuat adil dengan nilai etika yang relevan dengan tujuan hidupnya, 4) Keterampilan Inter-personal (tim kerja dan kepemimpinan), 5) Keterampilan lain seperti keterampilan IT dan komputer, pemecahan masalah dan lain-lain.

C. Migrasi, Transmigrasi dan Merantau dalam Pembentukan Modal Manusia

Migrasi atau proses perpindahan individu dari daerah asal ke daerah lain maupun dari desa ke kota (rural-urban migration) dinamakan dengan merantau atau hijrah. Merantau merupakan proses alamiah dan merupakan suatu upaya yang bisa dilakukan oleh individu untuk merubah nasibnya di kemudian hari. Investasi pada infrastruktur dan sektor industri di perkotaan menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja meningkat di perkotaan. Orang-orang yang tinggal di desa mengetahui bahwa di kota terdapat kesempatan kerja dan ada peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan di desa. Kemudian secara bertahap orang desa pindah ke kota, inilah yang dinamakan dengan kota sebagai daya tarik perpindahan penduduk dari desa sehingga tingkat urbanisasi di perkotaan meningkat. Di samping itu perpindahan penduduk dari desa ke kota juga mengharapkan layanan di perkotaan yang lebih baik yakni layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan keuangan dan finansial serta layanan publik lainnya.

Penduduk usia sekolah pergi merantau ke kota dengan maksud untuk melanjutkan pendidikan ke kota pada jenjang yang lebih tinggi yakni sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi dimana layanan ini tidak tersedia di desa. Para pemuda dan gadis desa pindah ke kota

dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di kota. Di samping usia muda, keluarga juga bisa merantau ke kota untuk berjuang hidup di perkotaan.

Di Indonesia, sebelum tahun 1980, provinsi yang menjadi tujuan migrasi paling banyak adalah DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun setelah tahun 2000 ternyata daerah yang menjadi tujuan merantau bertambah ke Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Dapat dipahami, bahwa pada Propinsi-propinsi tersebut mulai berkembang sektor industri, dengan ditemukannya ladang-ladang minyak dan pembukaan perkebunan kelapa sawit maka industri pada sektor tersebut juga berkembang.

Mobilitas migrasi penduduk Indonesia relatif dinamis, setiap provinsi mendapatkan migrasi masuk setiap tahunnya, seperti data migrasi seumur hidup yang diakses dari BPS Tahun 2010.

Tabel 3.1: Migrasi Seumur Hidup

No	Provinsi	1971	1980	1990	2000	2005	2010
	Migrasi masuk						
1	Aceh	61.906	146.307	194.709	100.166	1	213.553
2	Sumatera Utara	547.405	570.12	459.652	447.897	447.332	521.847
3	Sumatera Barat	88.832	134.712	217.796	245.000	300.322	344.254
4	Riau	217.134	356.272	689.036	1.175.960	1.335.873	1.911.760
5	Jambi	160.041	298.366	473.434	566.153	551.469	738.961
6	Sumatera Selatan	333.875	617.745	936.817	987.157	902.044	1.017.990
7	Bengkulu	36.380	122.785	251.621	355.048	311.326	347.651
8	Lampung	1.003.550	1.793.053	1.730.903	1.485.218	1.596.545	1.463.929
9	Bangka Belitung	2	2	2	94.334	95.129	206.705
10	Kepulauan Riau	3	3	3	432.725	542.811	801.073

11	DKI Jakarta	1.821.833	2.599.367	3.170.215	3.541.972	3.337.161	4.077.515
12	Jawa Barat	383.560	1.003.758	2.408.626	3.271.882	3.764.889	5.225.271
13	Jawa Tengah	260.308	350.385	516.315	708.308	741.588	902.711
14	DI Yogyakarta	101.204	180.367	266.500	385.117	466.941	562.384
15	Jawa Timur	297.948	465.949	575.541	781.590	660.663	925.384
16	Banten	4	4	4	1.758.408	1.731.081	2.766.750
17	Bali	22.758	65.271	124.919	221.722	249.951	406.921
18	Nusa Tenggara Barat	34.117	56.081	69.466	107.605	100.811	115.750
19	Nusa Tenggara Timur	13.039	42.614	48.159	106.053	102.222	185.083
20	Kalimantan Barat	24.342	112.244	199.829	269.722	263.080	293.229
21	Kalimantan Tengah	50.235	142.257	241.192	423.014	393.828	526.737
22	Kalimantan Selatan	67.285	145.417	274.745	360.324	400.562	487.245
23	Kalimantan Timur	40.857	296.963	604.549	856.251	990.736	1.308.485
24	Sulawesi Timur	50.356	91.460	89.096	147.091	165.689	206.139
25	Sulawesi Tengah	51.320	187.024	287.447	369.634	358.601	452.792
26	Sulawesi Selatan	71.411	118.984	225.279	266.055	320.587	364.288
27	Sulawesi Tengah	26.024	106.027	237.602	366.817	341.057	447.484
28	Gorontalo	5	5	5	26.888	39.487	64.585
29	Sulawesi Barat	6	6	6	104.458	166.345	172.113
30	Maluku	43.530	13.109	186.735	75.540	73.356	123.165
31	Maluku Utara	7	7	7	60.834	63.384	107.681
32	Papua	33.923	96.079	262.873	226.773	295.536	435.773
33	Papua Barat	8	8	8	130.767	166.523	2.501.196

Sumber : BPS, 2010

Pola transmigrasi di satu sisi juga memiliki manfaat namun di sisi lain juga memiliki kelemahan bahkan sering kali menimbulkan konflik seperti di Aceh, Kalimantan dan lain-lain. Ada kecenderungan

penduduk transmigrasi dibangun infrastruktur dan sumber ekonomi yang amat memadai namun penduduk lokal dibiarkan sehingga penduduk transmigrasi lebih makmur dibandingkan dengan penduduk lokal dan pada akhirnya terjadi kecemburuan sosial yang berujung pada timbulnya konflik.

Seperti yang terlihat di Pasaman Barat, daerah transmigrasi perkampungannya ditata sedemikian rupa, mereka memiliki drainase yang baik, jalan yang baik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai serta dibangun kebun sawit dimana masing-masing kepala keluarga mendapatkan 2 hektar dan kompleks perumahan 0,25 ha. Sementara itu penduduk lokal sebagai pemilik ulayat dibiarkan saja. Kampungnya tidak memiliki drainase yang cukup, jalan yang tidak baik, dan fasilitas publik yang tidak memadai.

Kemudian perkampungan transmigrasi dibangun dengan APBN (anggaran penerimaan belanja negara) yang jumlah nominal dananya lebih besar karena dibiayai dari utang luar negeri. Sementara itu penduduk lokal dibangun dengan dana APBD (anggaran penerimaan dan belanja daerah) yang dananya lebih kecil. APBN sumbernya dari Jakarta (Jawa), penduduk yang ditransmigrasikan suku Jawa, sementara penduduk lokal orang non Jawa dan APBD-nya juga non Jawa. Sehingga inilah yang menjadi sumber ketidakadilan pola transmigrasi dan di beberapa daerah seperti di Aceh, Papua, Ambon serta beberapa daerah lain terjadi konflik horizontal antara penduduk lokal dan transmigran, terjadi penjarahan terhadap tandan buah segar (TBS) kelapa sawit perkebunan transmigrasi.

Pola migrasi yang dilakukan oleh suku Minang barang kali perlu juga ditelaah lebih mendalam. Penduduk Sumatera Barat yang dikenal dengan suku minang (rang awak) dikenal sebagai penduduk

perantau. Mereka memiliki filosofi, "ka rantau bujang dahulu di kampung baguno balun". Pergilah merantau anak muda dahulu, di kampung masih belum berguna.

Biasanya perantau minang tidak menggunakan APBD atau APBN untuk pindah ke negeri rantau, mereka menggunakan pola swadaya, biasanya orang yang merantau adalah: *Pertama* anak muda yang baru tamat sekolah, karena di Sumatera Barat tidak mendapatkan pekerjaan yang layak kemudian merantau ke daerah tujuan yang peluang pekerjaannya mungkin terbuka, biasanya yang dituju adalah kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang dan lain-lain.

Kedua, adalah perantau yang mana di kampung mereka tidak memiliki tanah ulayat suku/kaum yang cukup untuk diolah, biasanya mereka merantau ke daerah-daerah perkebunan seperti Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan daerah-daerah lain namun sesampainya di rantau mereka biasanya tidak lagi menjadi petani namun menjadi pedagang kecil, buka rumah makan dan lain-lain.

Ketiga, perantau dengan pindahan oleh institusi sosial atau negara, biasanya perantau ini adalah para pegawai pemerintah yang di tempatkan di daerah luar Sumbar, atau guru agama yang dikirim oleh ormas tertentu seperti Muhamadiyah, Tarbiyah, Tawallib dan lain-lain.

Keempat, anak usia sekolah, mereka memilih sekolah di luar Sumatera Barat dengan maksud agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau mencari suasana baru. Setelah tamat mereka bekerja di kota tersebut, berkeluarga dan membangun basis keluarga serta basis sosial di tempat tersebut.

Kelima, perantau dengan basis pengalaman dagang, biasanya

mereka adalah pekerja di toko, rumah makan atau pekerja di kios-kios di Sumatera Barat, mereka biasanya telah bekerja 1 sampai 2 tahun dengan induk semang namun merasakan kehidupan yang belum sempurna apabila belum berdiri sendiri (tagak surang). Maka kemudian dengan modal pengalaman dan uang transportasi secukupnya dan sedikit modal usaha mereka memulai merantau ke kota lain, lalu kemudian mereka mencari induk semang baru, bekerja beberapa tahun, kemudian mendirikan usaha-usaha bisnis yang hampir sama dengan induk semangnya. Kalau awalnya induk semangnya adalah pemilik rumah makan, maka kemudian dia akan mendirikan rumah makan di tempat lain, kalau induk semangnya berprofesi menjual pakaian, maka dia akan membuat usaha bisnis jualan pakaian. Menurut pendapat penulis, Pola ini adalah pola yang umum terjadi dan biasanya para pengusaha minang yang sukses memiliki banyak bisnis dan banyak aset selalu berawal dengan pola ini.

D. Investasi Modal Manusia

Sama halnya dengan modal fisik, modal manusia juga memerlukan suatu proses pemupukan, pengumpulan dan pengakumulasian. Proses ini dinamakan dengan proses investasi. Modal manusia tidak dengan sendirinya ada, namun perlu diadakan oleh manusia. Pertanyaanya kemudian adalah kapan saat yang tepat dalam melakukan investasi modal manusia dan bagaimana melakukannya?

Ahli pendidikan mengatakan saat yang tepat untuk melakukan investasi modal manusia adalah pada saat cikal bakal akan adanya anak atau masa hamil, masa bayi, masa anak-anak dan masa sekolah.

Pada masa hamil anak sudah diberikan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang termasuk juga pada masa bayi, anak-anak dan masa sekolah.

Sehingga dengan sendirinya ada sejumlah dana yang mesti dialokasikan oleh rumah tangga untuk proses tersebut. Menyediakan makanan, vitamin, pengobatan, biaya sekolah dan segala biaya yang dikeluarkan dalam usaha mempertinggi kualitas modal manusia. Orang tua memiliki peran yang amat penting dalam pembentukan modal manusia keluarga. Orang tua yang mampu mengencangkan ikat pinggang, mengurangi konsumsi dan mengalokasikan dana yang cukup untuk investasi modal manusia, maka keluarga tersebut di masa mendatang akan mendapatkan status sosial, profesi anak yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan juga akan lebih baik. Secara empiris banyak sekali fakta menunjukkan anak keluarga miskin, petani dan buruh kemudian anaknya naik ke kelas menengah menjadi tenaga profesional seperti guru, pengajar, akuntan, dokter, PNS, polisi dan tentara. Dengan perubahan profesi, anak tersebut merubah status sosial keluarga dari keluarga kelas akar rumput ke kelas menengah.

Besarnya investasi modal manusia memiliki hubungan yang positif terhadap pembentukan modal manusia itu sendiri yakni berkaitan dengan peningkatan kapasitas individu anak berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, kepemimpinan dan nilai-nilai kepribadian lainnya. Inilah yang akan menjadi bekal anak di kemudian hari sebagai upaya untuk bertahan hidup dan beradaptasi pada lingkungan yang selalu berubah. Lingkungan akan selalu berubah seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta proses bisnis. Dunia akan semakin mengecil karena manusia mampu menciptakan sarana dan prasarana komunikasi dan

transportasi yang cepat seperti: telepon, internet, pesawat terbang dan lain-lain.

E. Investasi Rumah Tangga

Keluarga merupakan satuan terkecil dari sebuah masyarakat, di sinilah sesungguhnya disemai budaya, nilai dan filosofi hidup. Ayah dan Ibu menjadi pembimbing anak dan anak biasanya akan menjadikan ayah dan ibunya sebagai model utama dalam bersikap dan berperilaku. Dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas SDM bangsa, keluarga memiliki peran yang amat penting dalam menciptakan generasi yang unggul, jika keluarga gagal melahirkan generasi unggul, maka akan berpengaruh terhadap generasi bangsa.

F. Modal Manusia dan Produktivitas

Modal manusia pada dasarnya merupakan kapabilitas yang dimiliki oleh pribadi dalam bentuk kumpulan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*) dan atribut pribadi lainnya. Kemampuan ini secara simultan sesungguhnya akan memberikan pengaruh langsung terhadap produktivitas. Produktivitas yang tinggi akhirnya akan menciptakan pendapatan yang tinggi pula. Umpamanya seorang petani yang mampu baca tulis akan berbeda produktivitasnya dengan petani yang tidak mampu baca tulis (melek huruf). Petani yang mampu baca tulis akan dapat membaca, mengetahui bagaimana menggunakan komposisi pupuk yang dijual bebas di pasar. Dia tidak lagi membutuhkan orang lain menjelaskan secara lisan, tapi cukup dengan melihat manual atau panduan pemupukan yang telah dibuat oleh produsen pupuk pada kemasan pupuk. Kemampuan membaca juga bisa membantu petani

dalam memilih bibit unggul, tatacara penggunaan pestisida, termasuk juga mengetahui perkembangan harga yang selalu dipublikasikan melalui media massa, radio dan internet yang sekarang sudah berkembang dan masuk ke dalam desa-desa.

Sehingga dengan pengetahuan tersebut, petani bisa memilih bibit yang baik, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, pengendalian hama, dan pengelolaan pasca panen yang baik, maka dengan sendirinya produktivitas petani akan meningkat. Sandra E. Black dan Lisy M. Lynch (1996) menemukan bahwa investasi pada modal manusia terbukti meningkatkan produktivitas pekerja pada sektor manufaktur dan nonmanufaktur di USA. Bentuk-bentuk investasi modal manusia itu adalah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kerja, pendidikan komputer, pendidikan dan latihan berkelompok serta pengalaman kerja.

G. Modal Manusia dan Tingkat Upah

Seseorang yang memiliki modal manusia yang tinggi juga diyakini mampu meningkatkan tingkat upah yang diperoleh. Sama halnya dengan modal fisik, modal manusia juga memerlukan pengorbanan untuk mendapatkan, mengumpulkan dan mengakumulasikannya dalam suatu nilai sehingga kemudian menjadi bernilai tinggi. Individu memerlukan sejumlah waktu (*time*) dan biaya investasi (*cost*) untuk mendapatkan modal manusia. Modal manusia tidak bisa diperoleh dengan alamiah saja, ia memerlukan pengorbanan, uang dan usaha yang panjang. Semakin lama waktu yang digunakan dan semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk investasi modal manusia maka peluang untuk mendapatkan pengembalian investasi juga akan semakin tinggi (*return of investment*).

Logikanya adalah, orang yang tamat SLTA/SMK akan lebih

ahli dibandingkan dengan orang yang hanya tamat SLTP atau SD, dengan asumsi bahwa keduanya hanya melalui satu proses yang sama. Jika seseorang tamat SD namun kemudian dia melanjutkan pada pendidikan dan latihan kerja maka modal manusianya juga akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang hanya tamat SD saja.

Semakin lama pendidikan seseorang maka peluang untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan akan lebih besar. Dan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kapabilitas yang tinggi biasanya akan menghasilkan produktivitas kerja yang lebih tinggi dan dengan sendirinya tingkat upah yang akan diterima juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keahlian.

Contoh, seorang tamatan SMK bidang bangunan dan sipil, memiliki kemampuan bisa menggambar rancangan suatu bangunan, bisa menghitung volume dan bisa mengarahkan para tukang untuk menjalankan desain perencanaan. Orang tersebut akan diberikan upah yang berbeda dengan seorang tukang yang hanya bisa mengaduk semen atau menyusun batu bata. Ketika tamatan SMK digaji Rp 60.000/hari maka tukang biasa akan digaji Rp 40.000/hari saja.

Begitu juga halnya dengan seorang sarjana yang tamatan sarjana Akuntansi, dimana dia bisa menyusun sistem akuntansi, menyusun sistem kontrol dan sistem otorisasi akan berbeda rewardnya dengan seorang tenaga keuangan yang tamat SMK akuntansi yang hanya bisa menjurnal dan menyusun laporan keuangan. Sehingga pada akhirnya, perbedaan keahlian akan menyebabkan perbedaan tugas dan tanggung jawab kerja serta akan menyebabkan perbedaan upah.

H. Modal Manusia dan Status Sosial

Ahli sosiologi menggambarkan bahwa dalam suatu masyarakat tak dapat dipungkiri terdapat kelas sosial. Paling tidak ada tiga kelas sosial yakni kelas elit, kelas menengah dan kelas bawah/akar rumput. Kelas elit biasanya adalah sekelompok orang yang memiliki uang (pemilik modal), pengusaha, bankir, dan sejenisnya termasuk para pemegang kekuasaan yakni birokrasi dan politisi. Sementara itu kelas menengah adalah kelompok profesional seperti : akuntan, konsultan, pengacara, guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Dan kelompok bawah adalah petani, nelayan dan kaum buruh serta pekerja.

Berikut ini digambarkan piramida kelas sosial :

Gambar 3.1: Piramida Kelas Sosial

Seseorang yang berada di posisi kelompok bawah (wong cilik) diperkirakan karena mereka tidak memiliki modal manusia yang memadai. Golongan ini memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keahlian serta sikap kewirausahaan yang cukup baik. Jika seseorang tidak memiliki pendidikan dasar yang

memadai namun memiliki jiwa entrepreneur yang memadai maka mereka cenderung menjadi pengusaha, pedagang, pengrajin dan sebagainya serta biasanya berada pada level kelas elit.

Kelompok sosial adalah sesuatu yang selalu ada, penggambaran ini bukan berarti untuk mempertentangkan antara kelas sosial yang ada di tengah masyarakat, tetapi untuk menggambarkan bahwa inilah realitas sosial dan ketiga kelompok tersebut saling bersinergi serta saling membutuhkan dalam siklus kehidupan manusia.

Golongan kaya muncul karena adanya pekerja, pekerja muncul karena adanya golongan kaya, serta munculnya golongan profesional karena adanya golongan kaya dan pekerja. Artinya kesemuanya saling bekerjasama, bersinergi dan saling memahami posisi masing-masing sehingga roda kehidupan berjalan dengan lancar. Namun kajian kita yang lebih mendalam adalah kemakmuran dan tingginya pendapatan suatu negara, sejauh mana negara itu memiliki kelas menengah dan kelas elit profesional dengan jumlah kelas pekerja, petani dan nelayan.

Semakin banyak jumlah kelompok elit maka keadilan ekonomi akan semakin baik. Ada keyakinan yang kuat bahwa peningkatan modal manusia melalui investasi modal manusia yang signifikan akan menghasilkan kelas menengah baru yang lebih banyak dan produktivitas negara juga akan semakin baik sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin terjaga keberlanjutannya. Implikasi kebijakannya adalah bagaimana negara menginvestasikan dana publik yang lebih besar sehingga memberikan efek yang positif terhadap pembentukan modal manusia, penduduk dan secara simultan akan dapat meningkatkan kelas menengah bangsa.

Bagi rumah tangga kelas bawah, menyekolahkan anak-

anak mereka adalah jalan yang tepat untuk merubah profesi anak dari profesi pekerja ke profesional atau dari pekerja petani dan nelayan yang menggunakan peralatan sederhana menjadi nelayan yang menggunakan modal dan teknologi yang dapat mempertinggi produktivitas dan kesejahteraannya di kemudian hari.

I. Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Manusia merupakan faktor ekonomi yang aktif, sementara yang lain seperti tanah, teknologi, peralatan, mesin dan modal merupakan faktor yang pasif. Faktor ekonomi digerakkan oleh faktor aktif yakni manusia. Manusia bisa menciptakan (*create*), bisa menjalankan (*user*), bisa memelihara (*maintenance*), dan melakukan pembaharuan (*innovation*). Proses daur produk tersebut akhirnya menciptakan nilai tambah untuk semua produk yang dihasilkan oleh manusia. Dengan hal tersebut, akan terjadi penambahan akumulasi produk barang dan jasa yang dihasilkan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi.

Manusia yang bisa memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi adalah manusia yang memiliki dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai. Kemampuan itu biasanya diperoleh dari proses belajar, baik itu belajar dalam jenjang pendidikan formal, informal, pendidikan dan latihan, maupun proses mencari sendiri dan berdiskusi serta berlatih dengan orang yang ahli dalam bidangnya.

Akumulasi pengetahuan, keahlian dan sikap yang dimiliki oleh masing-masing individu dihitung secara agregatif dan memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemampuan manusia dalam menghasilkan output ekonomi tidak terlepas dari sejumlah kapabilitas individu dan kelompok dalam sebuah tim.

Sumber daya manusia atau modal manusia merupakan total dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kreativitas, bakat dan sikap kerja keras.

Dalam proses perjalanan umat manusia kita bisa menelaah, bahwa manusia memiliki peran yang signifikan dalam perubahan dan pembaharuan dunia ini. Fakta menunjukkan negara yang memiliki sumber daya manusia yang baik, unggul dan akumulasi modal manusia yang tinggi cenderung juga memiliki pertumbuhan dan status ekonomi yang tinggi pula. Apabila merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia, maka pada tahun 2012 IPM Indonesia hanya berada pada urutan 121 dunia, yaitu hanya sebesar 0,624. Berikut IPM Indonesia per provinsi.

Tabel 3.2: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Provinsi

Peringkat	Provinsi	2007	2008	2009	2010	2012
1	DKI Jakarta	76.59	77.03	77.36	77.60	77.97
2	Sulawesi Utara	74.68	75.16	75.68	76.09	76.54
3	Riau	74.63	75.09	75.60	76.07	76.53
4	Yogyakarta	74.15	74.88	75.23	75.77	76.32
5	Kalimantan Timur	73.77	74.52	75.11	75.56	76.22
6	Kepulauan Riau	73.68	74.18	74.54	75.07	75.78
7	Kalimantan Tengah	73.49	73.88	74.36	74.64	75.06
8	Sumatera Utara	72.78	73.29	73.80	74.19	74.65
9	Sumatera Barat	72.23	72.96	73.44	73.78	74.28
10	Sumatera Selatan	71.40	72.05	72.61	72.95	73.42
11	Bengkulu	71.57	72.14	72.55	72.92	73.4

12	Bangka Belitung	71.62	72.19	72.55	72.86	73.37
13	Jambi	71.46	71.99	72.45	72.74	73.3
14	Jawatengah	70.92	71.60	72.10	72.49	72.94
15	Bali	70.53	70.98	71.52	72.28	72.84
16	Jawa barat	70.71	71.12	71.64	72.29	72.73
17	Jawa Timur	69.78	70.38	71.06	71.62	72.18
18	Aceh	70.35	70.76	71.31	71.70	72.16
19	Sulawesi Selatan	69.62	70.22	70.94	71.62	72.14
20	Lampung	69.78	70.30	70.93	71.42	71.94
21	Maluku	69.96	70.38	70.96	71.42	71.87
22	Sulawesi Tengah	69.34	70.09	70.70	71.14	71.62
23	Banten	69.29	69.70	70.06	70.48	70.95
24	Gorontalo	68.83	69.24	69.79	70.28	70.82
25	Sulawesi Tenggara	68.32	69.00	69.52	70.00	70.82
26	Kalimantan Selatan	68.01	68.72	69.30	69.92	70.55
27	Sulawesi Barat	67.72	68.55	69.18	69.64	70.44
28	Kalimantan Barat	67.53	68.17	68.79	69.15	70.11
29	Irian Jaya Barat	67.28	67.95	68.58	69.15	69.66
30	Maluku Utara	67.82	68.18	68.63	69.03	69.65
31	Nusa Tenggara Timur	65.36	66.15	66.60	67.26	67.75
32	Nusa Tenggara Barat	63.71	64.12	66.60	65.20	66.23
33	Papua	63.41	64.00	64.53	64.94	65.36
	Indonesia (BPS)	70.59	71.17	71.76	72.27	72.77

Sumber: BPS 2012

Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif

antara pembangunan sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi. UNDP mengembangkan indikator pembangunan suatu negara dengan sebuah ukuran yang dinamakan dengan HDI (human development index). Indikator ini menggabungkan antara indikator ekonomi dan indikator sosial. Terdapat empat indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan sebuah negara yakni: tingkat harapan hidup (sosial), tingkat melek huruf, indeks kemiskinan dan pendapatan perkapita serta lama bersekolah.

Sepuluh negara dengan tingkat indeks pembangunan manusia tertinggi di dunia juga memiliki pendapatan perkapita yang tinggi. Paling tidak terdapat tiga karakter negara dengan kemakmuran yang tinggi. Pertama, negara yang memiliki sumber daya alam yang besar, luas wilayah yang relatif besar dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi serta kemakmuran yang tinggi. Hal ini diwakili oleh Australia, Canada dan Perancis. Kedua, Negara yang memiliki luas wilayah yang kecil, penduduk yang relatif kecil, kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan kemakmuran yang tinggi, ini diwakili oleh Swedia, Swis, Belanda, Norwegia, dan Islandia. Dan yang ketiga penduduk yang besar, luas wilayah yang relatif tidak besar, dan sumber daya alam yang terbatas, kualitas sumber daya manusia yang tinggi serta pendapatan perkapitanya yang tinggi yakni Jepang dan Irlandia. Dari ketiga karakter 10 besar negara makmur di dunia ini, menunjukkan bahwa semuanya memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi sehingga kemakmuran yang tinggi bisa mereka capai.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara yang luas, penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah dan beragam tapi kualitas sumber daya manusia yang rendah, menyebabkan tingkat

kemakmurannya juga rendah. Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada 2012 meningkat sebesar 0,629 berada di peringkat 121 dunia. Dengan indeks tersebut Indonesia dikategorikan sebagai negara yang memiliki indeks HDI menengah.

Sebelum ukuran HDI dikembangkan sebagai ukuran pembangunan, bank dunia sebelum tahun 1990-an mengembangkan konsep PQLI (*The physical quality life index*) sebagai ukuran pembangunan. PQLI menggunakan tiga indikator yakni:

1. Infant Mortality : IM
2. Life Expectancy : eI
3. Basic literacy : L

sehingga indeks PQLI dapat ditulis dengan

$$PQLI = (IMI, eI, LI)/3$$

dimana : IMI = indeks tingkat kematian
 : eI = Indeks harapan hidup
 : LI = Indeks kemampuan melek huruf

$$HDI = 1/3 (\text{Index } X_1 + \text{Index } X_2 + \text{Index } X_3)$$

Sehingga, $PQLI = 0,33 IMI + 0,33 eI + 0,33 LI$.

UNDP sejak 1988- juga mengembangkan empat (4) blok pengukuran pembangunan manusia HDI1, HDI2, HDI3 dan HDI4.

Diagram 1: Human Development Index

1. Harapan hidup			
2. GDP perkapita			
3. Tingkat melek huruf	HDI1		
4. Kualitas Hidup		HDI2	
5. Kependudukan dan garis kemiskinan			HDI3
6. Urbanisasi			HDI4

Sumber: UNDP, 1988

Kualitas kehidupan, diukur dengan indikator: (1) Akses pada air bersih, (2) Jaringan listrik, (3) Kecukupan makanan pokok dua kali sehari setiap tahun, (4) Ketersediaan rumah, (5) Layanan rumah sakit untuk penduduk. UNDP pada tahun 1990 memodifikasi dan mengembangkan indikator pembangunan dengan berbagai ukuran Human Development Index, yang menyediakan berbagai indeks antar negara di dunia dan dengan menggabungkan antara indikator sosial seperti yang dikembangkan oleh bank dunia dengan indikator ekonomi, yakni pendapatan perkapita dan indeks kemiskinan.

UNDP 1997, menyusun formula untuk menghitung indeks pembangunan manusia dengan suatu ukuran 0-1. Untuk menghitung indeks UNDP 2001 mengembangkan indikator HDI perbandingan antar negara.

Indeks HDI > 0,8 = negara kategori HDI tinggi
 Indeks HDI 0,5 - 0,8 = negara kategori HDI Menengah
 Indeks < 0,5 = negara kategori HDI rendah.

UNDP, 2004, mengembangkan standar untuk beberapa indikator yakni :

Tabel 1.8. Komponen Penilaian dan Standar Penilaian

Komponen HDI	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Tingkat melek huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama bersekolah	15	0	Standar UNDP
Daya Beli	737.720	360.000(1999)	GDP/Kapita

Sumber, UNDP, 2004

Suatu indikator maka disusun rumus sebagai berikut :

Indeks harapan hidup

$$I_i = \frac{\text{Nilai actual} - \text{Nilai minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai minimum}}$$

Pada tahun 2008, UNDP telah mempublikasikan 35 kategori data yang bisa dibaca di setiap negara, dengan berbagai indikator, ukuran, dan trend data yang tersedia dalam sebuah negara.

Contoh perhitungan indeks :

Perhitungan HDI (Calculating the HDI) Perhitungan berikut merupakan ilustrasi untuk Provinsi Aceh di tahun 1999	
Tingkat harapan hidup	67,6 tahun
Tingkat Melek huruf	93,1%
Konsumsi Perkapita (dalam ribuan rupiah)	562,8
Indeks Harapan hidupa $67.6 - 25) / (85-25) = 0,71 = 71\%$	
Tingkat melek huruf $(93,1, 1-0) / (100.0) = 0,93 = 93\%$	
Rata-rata lama bersekolah $(7.2-0) / (15-0) = 0,48 = 48\%$	
Indeks Pencapaian Pendidikan $(2/3 \times 93) + (1/3 \times 48) = 0,78 = 78\%$	
Indeks Pendapatan $562.8-360) / 732.72-300) = 0,469 = 47\%$	
Indeks Pembangunan Manusia (HDI) $HDI = (71+78+47) / 3 = 65,3$	

Sumber: UNDP, Bappenas, 1999

MODAL SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

Sama halnya dengan kekayaan fisik dan kekayaan mutu modal manusia, modal sosial juga merupakan sejumlah aset yang dapat menghasilkan *benefit* ekonomi bagi pribadi, rumah tangga, bisnis dan negara. Apabila modal sosial tersebut merupakan sebuah kekayaan, maka secara normal diperlukan waktu, proses dan investasi untuk meningkatkan jumlah akumulasinya. Namun kekayaan sosial prinsipnya berbeda dengan modal fisik, dimana semakin sering modal fisik digunakan atau semakin lama penggunaannya, maka nilai ekonominya semakin menurun. Misalnya ketika individu memiliki mobil, apabila mobil tersebut dipakai maka besi-besinya menjadi *aus*, atau semakin lama umur mobil maka mesinnya akan menjadi berkarat sehingga kemampuannya menurun dan biaya pemeliharannya meningkat. Namun tidak sama halnya dengan modal sosial, justru ketika semakin sering digunakan dan semakin dijaga dengan baik maka nilainya semakin meningkat.

Setiap orang memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan modal sosial, biasanya seseorang akan mendapatkan

modal sosial dengan cara berkenalan dengan teman sejawat, teman sekelas, teman sekampung, teman sesuku, teman sekamar kost, teman sekorps, teman sealumni, teman sepermainan, teman sebangsa, teman seaqidah dan hubungan-hubungan lainnya. Sebagaimana modal fisik, modal sosial juga memerlukan pemeliharaan (*maintainance*) agar tetap terjaga dan bernilai tinggi. Berbagai upaya bisa dilakukan untuk menjaga modal sosial yang pada dasarnya adalah bagaimana interaksi antara individu dengan individu lainnya bisa terjaga dengan baik yang dinamakan dengan hubungan baik (*silaturrahmi*).

Secara ekonomi sesungguhnya modal sosial dapat memberikan benefit ekonomi yang signifikan, misalnya ketika seorang mahasiswa menjaga hubungan baik dengan teman sejawatnya, maka ketika tamat dari perguruan tinggi mereka akan mendapatkan informasi, fasilitas bahkan referensi dari seniornya untuk mendapatkan pekerjaan dan dengan pekerjaan tersebut dia mendapatkan sejumlah pendapatan. Begitu juga dengan seorang pedagang, ketika hubungan baik terjaga dengan pembeli, maka pembeli tersebut akan menjadi pelanggan tetap (*constumer*) dengan pedagang dan pedagang juga mendapatkan peluang penjualan tetap dari pelanggannya serta pelanggan tetap akan memperkenalkan sang pedagang dengan pembeli baru kepada teman-teman sejawatnya, sehingga pedagang akan mendapatkan peluang penambahan pelanggan lainnya. Begitu juga halnya ketika pedagang tersebut memiliki hubungan baik dengan pemasok (grosir, distributor atau pabrik) maka sang pedagang akan mendapatkan jaminan pasokan barang dan berbagai kemudahan investasi dari kepercayaan tersebut dalam bentuk penundaan pembayaran (*kredit*) atau pemberian discount (*rabat*) atau penitipan barang (*konsinyansi*) dan fasilitas lainnya.

Berbagai profesi sebenarnya memerlukan modal sosial, untuk mempertahankan status ekonomi dan sosialnya di masyarakat. Misalnya seorang petani, ia memerlukan modal sosial untuk mempertinggi hasil penjualan produksi pertaniannya, ketika seorang petani memiliki hubungan baik dengan pedagang pengumpul maka dia akan mendapatkan kepastian pembelian produk yang dihasilkan, atau mendapatkan kredit yang tidak kompetitif, atau mendapatkan informasi tempat pembelian pupuk, pembelian bibit atau mendapatkan kredit dari lembaga keuangan baik koperasi maupun lembaga keuangan lainnya.

Setiap orang juga memerlukan modal sosial untuk mempertinggi benefit ekonomi dan sosialnya, termasuk para pejabat dan politisi. Politisi memerlukan kepercayaan publik, memerlukan jaringan, memerlukan dukungan suara dan memerlukan kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang diinginkannya.

Secara konsepsi, modal sosial mulai diperkenalkan oleh Granovetter (1973), Bourdieu (1977,1980,1986), Coleman (1988:1990), Flap (1988), Putnam (1993,1995), Portes (1993), Volker (1996), dan Lin (1999). Kemudian tulisan empiris ditelaah pada penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Nan Lin (1999), Putnam (2000), Sobel (2002), Winter (2000), Stone (2001), Grootaert, Narayan, Jones, Woolcock (2004), Beugelsdijk dan Smulders (2004), Coffe (2006) dan lain-lain.

Ahli sosiologi dan ekonomi mencoba menjelaskan bahwa produktivitas, pendapatan dan penambahan kekayaan seseorang tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar modal kekayaan fisik namun juga terdapat mereka memerlukan modal non fisik dalam bentuk modal manusia dan modal sosial. Orang dengan status

sosial awam, biasanya tidak mempedulikan tentang hal-hal non fisik ini. Dan terkadang mengabaikan berkenaan dengan modal sosial, terkadang juga mereka hanya mengambil untung pada satu kali transaksi, atau malah menipu, sehingga dalam kesempatan yang lain mereka tidak lagi dipercaya.

Banyak fakta menunjukkan bahwa seseorang yang pada awalnya tidak memiliki jumlah kekayaan fisik dan material namun kemudian menjadi kaya dan dikenal sebagai orang kaya, serta tidak sedikit orang yang hanya mengandalkan kepercayaan, jaringan dan kompetensi diri akhirnya menjadi orang yang memiliki peranan sosial yang tinggi dalam suatu komunitas. Fakta ini membangkitkan gairah ilmuwan untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam untuk menemukan bukti empiris bahwa interaksi sosial, hubungan baik, silaturahmi, kepercayaan, jaringan, nilai dan norma, serta spiritualitas seseorang memiliki hubungan kausalitas dengan produktivitas, pendapatan dan kekayaannya.

Bahasan teoritis modal sosial saat ini telah dibangun dalam suatu proses kajian ilmiah yang cukup mendalam, awalnya ilmuwan mencoba membangun filosofi dasar bagaimana relasi sosial menjadi bernilai, kemudian ilmuwan lain melakukan riset-riset empiris dan menemukan model-model empiris serta mendukung hipotesis bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepemilikan modal seseorang, rumah tangga, kelembagaan, kebangsaan dengan produktivitas kerja, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, kesempatan kerja, relasi bisnis, penjualan dan kinerja ekonomi lainnya. Grootaer, Narayan, Jones dan Woolcock (2004) mengembangkan formulasi regresi untuk mengukur pengaruh modal sosial dan faktor lain dalam menentukan konsumsi perkapita rumah tangga dalam suatu negara.

$$\ln E_i = a + bSC_i + cHC_i + dOC_i + eX_i + fZ_i + u_i \dots \dots \dots (1)$$

dimana :

E	= belanja rumah tangga perkapita
SC	= kepemilikan modal sosial
HC	= kepemilikan modal Manusia
OC	= kepemilikan aset fisik (tanah, peralatan, uang, bangunan, teknologi, dll)
X	= karakteristik keluarga
Z	= komunitas atau region
u	= error

Model ini menjelaskan bagaimana pengaruh modal sosial, modal manusia, aset fisik, status dan karakteristik keluarga serta komunitas kelompok rumah tangga dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Model ini juga mencoba menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan hanya faktor kepemilikan asets fisik yang menentukan tingkat konsumsi rumah tangga tetapi juga ada faktor lain yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga yakni faktor modal sosial dan modal manusia.

Model ini telah diuji kebenarannya pada beberapa penelitian empiris oleh para peneliti dari bank dunia, di antaranya di Indonesia, Tanzania, Albania dan Negeria. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga.

A. Pengertian Modal Sosial

Modal merupakan konsep ekonomi yang berasal dari kata *capital*, istilah ini diperkenalkan oleh Kalr Marx, pada

saat menganalisis surplus yang diperoleh oleh majikan ketika mempekerjakan para pekerjanya. Pekerja yang setiap harinya bekerja 7 jam namun majikannya hanya memberikan upah 5 jam, dan sisa waktu 2 jamnya tersebut merupakan surplus yang diterima oleh pemilik modal, di samping itu surplus pemilik modal juga diperoleh dari perputaran uang, dimana majikan atau produsen memiliki harga pokok 10 namun kemudian dijual kepada pembeli dengan harga 12. Selisih antara harga penjualan dengan harga pokok ini juga merupakan surplus produsen atau dikenal dengan pemilik modal (*capitalis*). Kemudian modal menjadi familiar dipakai dalam pembahasan ekonomi dalam berbagai mazhab ekonomi.

Ketika membicarakan modal, biasanya orang mulai terbiasa dengan hasil yang diperoleh atas kepemilikan modal tersebut. Dalam kajian ekonomi, modal merupakan sejumlah kekayaan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dan dengan kekayaan tersebut mereka memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan, atau pengorbanan (kerugian) dalam bentuk *opportunity cost* sebagai akibat dari mengambil keputusan membelanjakan potensi modal. Umpamanya ketika seseorang memiliki uang Rp. 100 juta, lalu dia menggunakan uang tersebut untuk membeli sehektar kebun sawit, maka peluang untuk mendapatkan bunga bank sebesar sekian persen pada saat itu dan di masa mendatang akan hilang, atau peluang untuk mendapatkan laba dari saham juga akan hilang.

Dalam ilmu akuntansi, modal dikategorikan menjadi dua bagian yakni modal aktif dan modal pasif. Modal aktif adalah pos rekening bagian sebelah kiri dari Neraca keuangan, dalam bentuk aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain, sementara itu modal pasif adalah sumber atau hak atas penguasaan modal aktif yakni sejumlah

total modal aktif dikurangi dengan utang, atau persamaannya bisa disederhanakan sebagai berikut :

Harta = Utang + Modal

Harta = Modal aktif

Utang = Kewajiban pada pihak ketiga

Modal = Hak untuk mendapatkan harta dan menanggung resiko atas harta.

Sehingga, modal dapat ditulis dengan persamaan sederhana, yaitu: $\text{Modal} = \text{Harta} - \text{utang}$.

Dalam kajian akuntansi manajerial, modal aktif juga dapat dikategorikan menjadi dua bagian yakni, *pertama* modal lancar yang merupakan kekayaan yang paling *liquid*, mudah dicairkan, dalam bentuk kas, rekening bank, piutang wesel, piutang dagang, piutang bunga, persediaan barang, perlengkapan dan lain-lain. *Kedua* modal tetap yang nilainya lebih dari satu tahun atau masa pemakaiannya lebih dari satu kali pakai dalam bentuk tanah, bangunan, investasi, gudang, pabrik, peralatan, mesin dan lain-lain.

Dalam pembahasan mengenai modal sosial kita akan mengulas bahwa modal sosial tersebut merupakan kekayaan yang aktif, dia tidak pasif. Modal sosial menjadi suatu nilai yang nilainya tidak bisa diuangkan namun manfaatnya kemudian bisa menghasilkan uang.

Granovetter (1973) menjelaskan bahwa dalam sebuah kelompok, komunitas, organisasi atau institusi diperlukan sebuah ikatan, dan dengan ikatan tersebut kemudian terjadi jaringan yang kuat antara pribadi dengan pribadi lainnya maupun antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Ikatan itu bisa terjadi dalam lingkaran mikro, meso maupun dalam lingkaran makro dan pada akhirnya akan menimbulkan kekuatan.

Kemudian pada tahun (1987-1988) James S. Coleman seorang ahli sosiologi secara intensif menggali dan merumuskan kajian tentang "*Norms as social capital*", dan tahun 1988, Coleman menjelaskan modal sosial merupakan sumber daya untuk arah tindakan struktur sosial dalam paradigma yang rasional.

Kajian tentang modal sosial juga dikaji lebih mendalam oleh Lin (1999). Lin menjelaskan pengertian modal sosial dapat dipandang dari dua perspektif, yakni modal sosial dalam perspektif individu dan modal sosial dalam level kelompok. Dalam perspektif individu, modal sosial digunakan oleh individu dengan cara menggunakan hubungan sosial untuk mengakses sumber daya agar memperoleh benefit individu, umpamanya untuk mendapatkan pekerjaan, keuntungan dagang dan dukungan suara. Dan yang kedua adalah bagaimana modal sosial itu diperlukan dalam level kelompok, modal sosial menjadi aset bersama, bekerja bersama-sama dan produksi massal secara bersama.

B. Bentuk dan Wujud Modal Sosial

Modal fisik bisa melihat secara kongkrit bagaimana bentuk material atau wujud dari kekayaan tersebut, baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak. Kekayaan yang bergerak biasanya dalam bentuk harta yang mana barang fisiknya bisa dipindah tangankan dalam bentuk wujud dari kekayaan tersebut seperti uang, pakain, mobil, meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian, kekayaan tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah, bangunan dan lain-lain. Barang fisik dapat dihitung dan dilihat dengan mudah namun berbeda halnya dengan modal sosial.

Burt (1992) menyatakan bahwa modal sosial bisa dijelaskan

dalam bentuk: hubungan antara pelaku, bisa dalam bentuk teman dan sahabat, kolega, dan masih banyak lagi kontak antara yang satu dengan yang lainnya dan dalam hubungan itu memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk informasi dari akses (*networking*), pilihan waktu yang tepat, dan referensi. Putnam (1993) menjelaskan ukuran modal sosial bisa dihitung dari kelompok dalam masyarakat sipil, seberapa besar keanggotaan individu dalam anggota kelompok olahraga, liga bowling, komunitas sastra dan kesenian, group politik dan perbedaan daerah geografis. Sementara itu Lin (1999) mengembangkan ukuran dan indikator modal sosial sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Modal Sosial Sebagai Aset dalam Jaringan

Fokus	Pengukuran	Indikator
Melekat pada Sumber daya	Sumber daya Jaringan	Jarak ke sumber daya, besarnya sumber daya, variasi sumber daya, komposisi (rata-rata sumber daya, kontak sumber daya
	Status kontak	Kontak, kedudukan, kekuasaan, sektor
Lokasi Jaringan	Jembatan pada akses	Struktur, kelemahan struktur
	Kekuatan ikatan	Jembatan jaringan, keakrapan, intensitas, interaksi timbalbalik

Sumber : Lin (1999)

Fukuyama (2000) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan norma informal yang berlaku dalam nilai kerjasama dua atau lebih individu, norma itu bersumber dari nilai-nilai doktrin agama dan aliran kepercayaan seperti konfusianisme sehingga menghasilkan kepercayaan (*trust*), jaringan (*networking*), masyarakat sipil, dan seterusnya.

Grootaert, Narayan, Jones, Woolcock (2004) merumuskan 6 dimensi modal sosial yakni: kelompok dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aktivitas bersama dan kerjasama, informasi dan komunikasi, hubungan sosial dan keterbukaan, serta pemberdayaan dan aktivitas politik. Kemudian mereka mengembangkan sistem pengukuran SC-IQ dengan memfokuskan kajian pada level mikro, yakni rumah tangga dan individu. SC-IQ (the Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital) merupakan suatu alat pengukuran yang dikembangkan oleh bank dunia untuk memotret dan mengukur nilai modal sosial rumah tangga dalam berbagai dimensi modal sosial.

C. Pembentukan Modal Sosial

Modal sosial merupakan kekayaan yang unik, dimana semakin sering dipakai dan digunakan maka ia akan semakin bertambah, hal ini berbeda dengan modal fisik yang justru sebaliknya semakin banyak modal fisik itu digunakan atau dipakai maka umur ekonomisnya akan semakin habis, atau akan berkurang nilainya atau akan menambah biaya untuk menggunakannya di masa yang akan datang.

Coleman (1988) menguraikan bahwa pembentukan modal sosial berawal dari keluarga (*family*). Latar belakang keluarga merupakan salah satu faktor yang dominan dalam pembentukan

modal sosial. Keluarga sebagai awal terbentuknya modal manusia juga menjadi awal pembentukan modal sosial, keluarga memiliki peran dalam menyediakan makanan sehingga anak akan sehat, orang tua yang berpendidikan akan mampu membimbing anaknya agar berperilaku dan bersikap dengan baik, dan pendapatan orang tuanya juga memberikan pengaruh pada lamanya anak bersekolah. Selanjutnya peran sekolah, kelompok dan lingkungan komunitas akan membentuk kepribadian anak dan human capital lainnya. Di samping itu pelayanan publik khususnya layanan pendidikan, kesehatan juga akan menentukan aspek modal sosial.

Sementara itu Fukuyama (2000) menjelaskan latar belakang nilai-nilai keyakinan yang dianut dan landasan budaya amat menentukan pembentukan modal sosial bagi masyarakat Jepang, China dan Korea. Nilai-nilai konfucu memberikan efek yang positif terhadap pembentukan modal sosial, termasuk juga nilai-nilai kristiani bagi umat kristen, khususnya pada umat kristen protestan.

Cara berpikir, sikap dan tindakan seseorang sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai yang diyakini seseorang tersebut, ada orang yang berkeyakinan akan memuaskan keinginan atau hasrat dari hawa nafsunya, atau ada juga orang ingin memuaskan kebutuhan akal dan hati nuraninya. Jika seseorang tujuan hidupnya sekedar memenuhi kebutuhan hawa nafsunya kadang kala menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan tersebut namun ketika seseorang menggunakan akal pikiran dan hati nuraninya sebagai bahan pertimbangan maka akan keluar tindakan yang berbudi baik dan berkepribadian mulia.

Dalam diri manusia terdapat dua potensi yakni potensi roh (*malakuti*) dan potensi jasad (*jisim*), insting serta hawa. Nilai roh itu

terdiri dari akal, akhlak, hati nurani dan tertuju pada nilai spritualitas. Sementara itu nilai hewani manusia merupakan kecenderungan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik, makan, minum, istirahat, syahwat, kekuasaan, kedudukan, harta benda (Mazhahiri, 2009).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan untuk menentukan apakah nilai roh itu yang paling tinggi atau nilai jasadnya yang paling tinggi. Ada kalanya roh menjadi tunggangan jasad dalam mencapai tujuannya dan ada kalanya roh menjadikan jasad itu sebagai tunggangan. Namun dalam konsep yang benar adalah bagaimana kedua potensi itu berjalan secara seimbang.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

(Q.S. al-Qhashas: 77)

Manusia dilarang untuk meninggalkan dunia (jasad) dan juga dilarang untuk meninggalkan akhirat (roh), keduanya harus sinergis. Manusia dapat mencapai keseimbangan dengan menjalankan aturan (syariah) yang benar, aturan itulah yang menjadi panduan manusia berjalan di atas bumi. Hasrat syahwat bisa dipenuhi dengan cara halal melalui pernikahan, hasrat makan dan minum bisa dipenuhi dengan meminum minuman dan memakan makanan yang halal

lagi baik. Keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan kedudukan bisa dipenuhi dengan bekerja, bermuamalah dengan berlaku jujur. Namun kalau menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan manusia, maka cenderung manusia akan masuk ke dalam jurang dan kemudian akan bangkrut.

Berkaitan dengan interaksi sosial, nilai-nilai kejujuran harus menjadi perhatian utama bagi manusia sehingga benefit yang terus menerus bisa diperoleh. Contoh jika seorang pedagang berlaku jujur di pasar, baik jujur dengan timbangannya, antara harga dan spesifikasi barang, antara harga dan kualitas barang serta pelayanan purna jualnya yang baik maka konsumen akan kembali ke pedagang tersebut untuk membeli barang lain atau barang yang sama di lain waktu. Namun jika seorang pedagang menutupi sesuatu pada barangnya, misalnya barang yang dijual tiruan atau tidak sama antara harga dan kualitas barang, dan ketika pembeli mengetahui akan hal itu, bisa jadi barang tersebut dikembalikan atau paling tidak, pembeli tidak akan kembali berbelanja kepada pedagang tersebut. Inilah contoh yang bisa dilukiskan bagaimana kepercayaan dan kejujuran itu harus dijaga oleh pelaku bisnis. Masih banyak contoh-contoh lain yang dapat menggambarkan hubungan positif antara kejujuran dengan performance usaha.

Dalam kasus pedagang tersebut, sebenarnya pedagang itu ingin mendapatkan harta yang lebih banyak namun tidak pada koridor yang benar sehingga menjadi "haram". Dan ketika perbuatan haram tersebut dilakukan oleh manusia maka efeknya dialami oleh yang bersangkutan baik secara langsung tapi bisa jadi akan dialami beberapa waktu kemudian. Pada dasarnya, perbuatan yang tidak memiliki aturan tersebut lebih cenderung dilakukan oleh hewan

sehingga nilai-nilai jasad itu oleh ahli filosof dikatakan sebagai nilai hewani manusia.

D. Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi

Ada keyakinan umum oleh para ekonom bahwa sesungguhnya setiap perilaku seseorang amat ditentukan oleh harga (tarif). Ketika seorang pedagang pergi ke pasar untuk berjualan mereka digerakkan oleh harga lebih (*profit*) antara harga penjualan dikurangi dengan harga pokoknya. Ketika pekerja berangkat ke tempat kerja mereka digerakkan oleh tingkat upah yang diharapkan, ketika seorang dosen pergi mengajar ke suatu kelas atau seminar mereka digerakkan oleh honor yang akan diperoleh. Ketika investor memindahkan dananya dari suatu saham ke saham lain, atau dari usaha yang satu ke usaha yang lain, mereka mengharapkan suatu nilai tambah finansial atas saham tersebut dalam bentuk deviden, kelebihan nilai kurs, atau nilai aset bersih perusahaan, atau harapan kenaikan nilai di masa mendatang. Juga ketika seorang pejabat bekerja dengan baik, dan memenuhi standar kerja minimal yang diharapkan, mereka mengharapkan tunjangan structural yang lebih besar, termasuk juga para politisi berkampanye dan memberitakan kinerja legislasinya kepada rakyat, mereka berharap pemilih akan memilihnya di periode mendatang dan mereka memiliki akses untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih baik atau mendapatkan gaji serta honor dari pekerjaan itu. Atau para pemain sepak bola terkenal lebih memilih pindah dari klub lamanya ke klub baru, karena di klub baru mereka mendapatkan gaji yang lebih besar. Ketika David Beckham akan pindah dari Real Madrid di Spanyol yang terkenal dan punya tradisi juara ke LA Galaxy di USA sebagai klub sepak bola yang tidak

terkenal di dunia, perpindahan tersebut karena klub LA Galaxy bersedia membayar lebih tinggi dibandingkan dengan klub lain di Eropa atau benua lainnya.

Proses perpindahan dan proses distribusi barang dan jasa di dunia ini akhirnya digerakkan oleh tingkat harga tersebut (*price*). Dan sudah lama para ekonom mengatakan bahwa harga adalah tangan gaib (*impossible hand*) yang bisa menggerakkan seluruh aktivitas manusia di dunia ini, kadang kala melebihi dari motivasi hakiki dari aktivitas kemanusiaan manusia, yakni motivasi redho Tuhan yang maha Esa.

Namun sebagai manusia, kita harus memahami bahwa semua itu kita maksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan nilai kebaikan bagi diri kita, keluarga dan masyarakat secara umum. Kita memiliki kebutuhan jasad yang harus dipenuhi dalam menjaga kelangsungan hidup hingga sampai pada titik tertentu namun juga kita pahami bahwa kita memiliki roh yang juga memiliki kebutuhan untuk bisa dipenuhi sebagai bekal untuk kembali pada Zat yang Satu. Kita meyakini ada hari kemudian, di hari itu diberikan kabar berita oleh Allah SWT kita akan mempertanggungjawabkan sikap dan perilaku di hadapan Allah dan apabila kita gunakan potensi kemanusiaan secara baik maka kita diberikan kenikmatan namun jika tidak maka kita akan melalui proses pembersihan yang dinamakan dengan neraka.

Beda halnya dengan hewan, karena kita diberikan potensi, akal, roh, dan nurani sebagai sesuatu yang ada dalam diri kita tetapi sifatnya sulit untuk kita jelaskan (gaib), maka nilai itulah yang membedakan kita dengan hewan. Kita memiliki keterbatasan untuk menjelaskannya tetapi akan adanya tempat kita kembali dan tempat penyerahan kita, sulit kita bantah dalam aspek apapun.

Secara materis adanya Tuhan bisa kita telusuri renungan Newton dalam teori keteraturan dan keseimbangan alam, tidak mungkin alam yang tercipta sempurna tidak diatur oleh sesuatu yang mengatur, kemudian juga bisa ditelusuri dalam teori kepemimpinan, apabila dalam suatu perahu ada dua nahkoda maka bisa jadi kapal itu tidak akan sampai pada tujuan, atau jika di alam ini ada dua matahari yang terbit maka akan selalu terjadi ketidak seimbangan alam karena siang dan malam tidak beraturan.

Kembali ke analisis perilaku manusia itu, harga secara emperis, terbukti mampu menjadi salah satu faktor yang menentukan perilaku manusia. Harga diartikan sebagai tingkat nilai tukar uang dan barang pada saat tertentu, tarif, tingkat upah, tingkat honor, bunga, *rate of return investment*, dan lain-lain. Dengan satuan itu kemudian akan memberikan pengaruh terhadap total pendapatan, total penjualan, dan total laba dari pelaku ekonomi.

Contoh, ketika orang ramai-ramai pindah dari desa ke kota (*rural urban migration*), orang-orang berharap akan mendapatkan tingkat upah yang lebih tinggi di kota sehingga tingkat urbanisasi di negara tersebut menjadi tinggi (Todaro, 2003). Contoh lain, sebelum tahun 1990 penduduk yang pindah ke Provinsi Riau kurang dari 300 ribu setiap tahunnya, namun setelah tahun 2000 penduduk yang pindah ke Provinsi Riau melebihi dari 1 juta orang, ini menandakan bahwa di Riau ada harapan pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan daerah asal.

Ketika orang memindahkan dana dari Indonesia ke luar negeri, para investor khawatir bahwa dananya akan hilang dan adanya harapan pengembalian investasi yang lebih menguntungkan di tempat lain. Ketika seorang pekerja berhenti bekerja dan pindah

bekerja ke tempat lain, mereka menemukan bahwa di tempat baru kerjanya lebih mudah. Ketika seorang pemilik uang (nasabah) menarik uangnya di bank dan menginvestasikan dana dalam bentuk bisnis, mereka menilai bahwa bunga bank lebih rendah dibandingkan dengan laba usahanya.

Logika ekonomi yang sudah mapan dan alamiah tersebut kemudian menjadi satu-satunya faktor yang menentukan keputusan seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi. Namun ada faktor nilai, yaitu faktor keberlanjutan (*sustainability*), kepastian dan jaminan, kepercayaan dan hubungan baik dengan sesama serta solidaritas yang turut menentukan keputusan ekonomi. Ketika pemerintah menetapkan bunga (*rate of interest*) pada sertifikat bank Indonesia yang tinggi dengan maksud pemilik modal mau menabungkan uangnya di perbankan Indonesia justru akhirnya pemilik modal lari ke luar negeri pada kasus 1998, ini lebih disebabkan karena pemilik modal tidak lagi percaya dengan kondisi sosial, keamanan, politik dan faktor non ekonomi lainnya atau ketika gaji pokok pegawai negeri lebih rendah dibandingkan dengan gaji *entrepreneur*, tapi generasi muda lebih tertarik menjadi PNS dibandingkan dengan menjadi pengusaha karena ada faktor kepastian pendapatan.

Dengan demikian, maka pemikiran ini dapat disederhanakan, dimana kuantitas produk yang dihasilkan amat ditentukan oleh harga atau permintaan dari konsumen, dan secara internal perusahaan, kuantitas produk yang dihasilkan secara langsung dipengaruhi oleh faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dan dalam konteks agregatif atau makro fungsi-fungsi produksi itu yang menjadi penentu pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

Dalam pandangan ekonomi klasik, faktor produksi terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal dan teknologi. Ada kalanya untuk memudahkan dalam menganalisis faktor produksi tersebut, hanya dijelaskan dua faktor saja yakni tenaga kerja dan modal dalam persamaan $Q=f(\text{Labor, capital})$, dan diasumsikan faktor lain tidak berubah (*ceteris paribus*). Analisis ini banyak dijumpai dalam kajian ekonomi yang sudah mapan, upaya ini mencoba menyederhanakan persoalan ekonomi dengan mempertimbangkan dua variabel dalam perekonomian. Ekonom klasik dan Keynesian lebih meyakini bahwa pasar atau harga yang sesungguhnya menjadi variabel penentu terjadinya aktivitas ekonomi di dunia, dan pasarlah yang mampu mendistribusikan kekayaan, menciptakan kekayaan dan menentukan arah perekonomian.

Namun analisis ini kadangkala sulit diprediksi dan ditemukan secara empiris, memang benar adanya bahwa kuantitas produk yang dihasilkan amat ditentukan oleh tenaga kerja yang dipakai dan modal yang digunakan namun dalam konteks yang lebih mendalam ternyata ada faktor lain yang turut menentukan kinerja perekonomian yakni faktor interaksi pelaku ekonomi di dalam perekonomian. Sebagian ilmuwan menjelaskan bahwa faktor interaksi inilah yang kemudian menjadi faktor yang dominan menentukan *performance* ekonomi dalam suatu negara. Jika interaksi antara pelaku ekonomi tersebut berjalan dengan baik, maka kinerja perekonomian bisa berkelanjutan dan bisa mencapai titik yang optimum namun jika interaksi tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi kemandekan ekonomi dalam jangka panjang.

Analisis ini bisa digunakan untuk kasus Indonesia, kita memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak, lahan yang luas dan potensi pasar

yang tinggi namun ternyata perekonomiannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki sumber daya alam dan penduduk yang tinggi seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan beberapa negara Asia lainnya.

Para analis menyebut interaksi modal sosial bisa menjadi salah satu penjelas mengapa Indonesia masih belum maju. Besarnya koefisien korelasi antara modal sosial terhadap hasil suatu produk, memang secara kuantitatif sulit ditentukan namun kadangkala faktor ini menentukan berhasil atau tidaknya suatu perjalanan ekonomi yang terjadi. Umpamanya ketika kontrak kerjasama antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain telah disepakati, namun salah satu pihak tidak bisa memegang *trust* atau memenuhi perjanjian yang disepakati maka interaksi bisnis antara kedua perusahaan tersebut akan terputus dan proses produksi serta penjualan akan berhenti. Misalnya produsen tidak bisa memenuhi *quota* atau target permintaan perbulan yang disepakati, maka pembeli akan merasa dirugikan, atau pembeli tidak bisa membayar tagihan piutang produsen maka saling percaya antara kedua belah pihak akan hilang sehingga perjanjian kedua belah pihak bisa terputus.

Begitu juga halnya dengan hubungan sesama kerabat kerja dalam sebuah institusi bisnis, seorang pekerja tidak lagi mempercayai atasannya, atau sebaliknya atasan tidak lagi mempercayai bawahannya maka kinerja manajemen juga akan menurun dan suasana kerja tidak nyaman lagi. Sehingga analisis sosial mencoba menguraikan faktor modal sosial tersebut dalam perekonomian. Beberapa kajian empiris membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara modal sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Fukuyama (1995) menulis artikelnya yang berjudul "*Social*

Capital and the Global Economy" menjelaskan bahwa dalam perekonomian global terdapat tiga kelompok kekuatan pelaku utama perekonomian dunia, yakni berdasarkan geografisnya yaitu USA (*United States of America*) dan para sahabat perdagangan bebasnya di Amerika Utara, Uni Eropa (EU) di Eropa, dan Asia Timur yang dipimpin oleh Jepang, China, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan ASEAN. Lebih lanjut Fukuyama menjelaskan globalisasi ditandai dengan berkuasanya perusahaan multinasional dan Corporasi Internasional seperti Siemens, Toyota, General motor, Apple, Hyundai, Samsung yang bersumber dari negara-negara kapitalis. Namun China dengan latar belakang yang sosialis justru perekonomiannya lebih dominan dilakukan oleh usaha kecil dan menengah serta bisnis keluarga. Lebih lanjut Fukuyama menjelaskan bahwa perkembangan bisnis baik dalam skala kecil maupun dalam bentuk korporasi besar, tidak terlepas dari tingkat kerjasama sosial (*social cooperation*), kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) yang didukung institusi yang kuat oleh penerapan supremasi hukum bisnis, pengakuan hak cipta (*property right*), kekayaan pribadi, dan kontrak kerjasama yang jelas (*contract*), sehingga menghasilkan saling percaya (*trust*) antara sesama pelaku bisnis dan kemudian bisnis berkembang dan berkelanjutan.

Jepang merupakan masyarakat dengan pola kekeluargaan dan berkelompok yang tinggi sementara itu USA lebih individualisme, namun USA juga memiliki komunitas sosial dan pergaulan sosial yang baik, seperti adanya group dansa, sekolah swasta, group kesenian, kelompok studi bible dan bisnis swasta yang diorganisasikan dengan baik. Kepercayaan (*trust*) inilah yang akhirnya menciptakan sinergi dan kekuatan untuk membangun kerjasama yang tinggi dalam

kelompok maupun tim, dimana satu individu dengan individu yang lainnya saling mengisi, saling memberikan ide, saling bekerja dan akhirnya menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dan dalam skala ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Adanya trust sesama individu, akhirnya menimbulkan trust di tingkat kelompok, organisasi, sosial dan korporasi besar.

Fukuyama (1995) juga meyakini bahwa kemajuan perekonomian China, Jepang, Hongkong, dan Korea Selatan tidak terlepas dari adanya nilai-nilai konfucisme, atau nilai-nilai spiritualitas. Sejalan dengan Fukuyama, Woolcock (1998) menjelaskan institusi sosial, masyarakat sosial, dan relasi sosial, pada level mikro dan makro akan menentukan kinerja pembangunan, karena di antara keduanya akan terjadi ketergantungan dan sinergi dalam pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan, adanya hubungan yang saling sinergi antara pemerintah dengan masyarakat sipil dan keduanya saling melengkapi.

Beda halnya dengan negara maju, Afrika sebagai salah satu bagian dunia dengan tingkat performance ekonomi yang rendah, Collier dan Gunning (1999) menjelaskan beberapa faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi di Afrika, rata-rata Afrika memiliki pertumbuhan ekonomi 1,3% pertahun sejak tahun 1980-an namun di beberapa negara ada sebagian yang mencapai 5%. Dan pada periode 1990-1994 hanya 1,8%, beda halnya dengan Asia, rata-rata bisa mencapai 4-6 % pertahun, dimana rendahnya pertumbuhan ekonomi Afrika ini diduga disebabkan oleh banyak faktor di antaranya adalah faktor tingginya tingkat resiko investasi di Afrika sebagai akibat dari lemahnya hubungan baik dalam komunitas, dimana sering terjadi konflik sosial pada level masyarakat, lemahnya fungsi pemerintah,

atau tingginya intervensi pemerintah dalam perekonomian, seperti pajak yang tinggi, pengaturan harga, dan pengadaan barang publik yang dimonopoli oleh pemerintah atau group tertentu.

Sehingga pada dasarnya rendahnya pertumbuhan ekonomi di Afrika ini tidak terlepas dari keterbatasan modal sosial yang rendah, bangunan kepercayaan yang rendah sesama pelaku ekonomi, mengakibatkan rendahnya tingkat transaksi yang terjadi, rendahnya partisipasi pihak eksternal dalam perekonomian khususnya dalam mendorong investasi juga menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi, serta diikuti dengan adanya persoalan korupsi, birokrasi yang rumit, rendahnya kemampuan para pelaku ekonomi, perang sipil, fraksi-fraksi dalam kelompok atau negara, rendahnya pengembangan layanan sosial, dan ketidakadilan.

Namun, Dengan pemulihan perekonomian secara bertahap, pertumbuhan rata-rata Afrika diperkirakan naik kembali menjadi 4,5 persen pada 2012 dan menjadi 4,8 persen pada 2013. Laporan tersebut disusun oleh Bank Pembangunan Afrika (AfDB), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika (ECA) dan lembaga pengembangan PBB, UNDP.

Hasil riset yang dikembangkan oleh Dasgupta (2002) menganalisis bahwa modal sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kinerja perekonomian, dimana hubungan antara personal dalam komunitas ekonomi akan menentukan kualitas kerjasama tim dalam kelompok dan berpengaruh pada produktivitas kerjanya. Hubungan yang baik tersebut akan membentuk rasa saling mempercayai (*trust*), saling membutuhkan dalam bentuk kerjasama (*cooperation*), saling memberi informasi dan sebagainya dalam

bentuk suatu jaringan (networks).

Beugelsdijk dan Smulders (2004) mencoba menganalisis dan mencari bukti empiris mengenai hubungan antara modal sosial dan pertumbuhan ekonomi. Mereka melakukan riset di masyarakat Eropa, yakni di Italia, Jerman, Spanyol, Belanda, Belgia dan Inggris Raya. Pada awalnya mereka membangun model teoritis dengan kerangka konseptual sebagai berikut:

Sumber : Beugelsdijk dan Smulders (2004,39)

Gambar 4.1: Kerangka Konseptual

Dalam kajian literature mereka menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh Investasi, pemuasan ekonomi keluarga dan persahabatan, dan jaringan sosial. Jaringan sosial tersebut ditentukan oleh preferensi pada materialistik, pereferensi pada hubungan keluarga dan pertemanan serta dan investasi.

Akhirnya secara empiris penelitian ini menemukan model empiris sebagai berikut:

Sumber : Beugelsdijk dan Smulders (2004,39)

Gambar 4.2 : Model Emperis

Dari model tersebut dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi dalam sebuah wilayah (*region*) amat ditentukan oleh faktor ekonomi, keanggotaan penduduk pada kelompok, keluarga dan persahabatan. Sementara itu keanggotaan individu dalam kelompok ditentukan oleh pentingnya kekeluargaan dan persahabatan serta hubungan kerja.

E. Budaya dan Pengembangan Ekonomi

Negara-negara di dunia diciptakan oleh Allah SWT beraneka ragam, masing-masing negara memiliki karakteristik geografis, karakteristik budaya, karakteristik sejarah dan karakteristik suhu, cuaca dan curah hujan, dan dengan keberagaman tersebut akhirnya manusia yang ada di dalamnya saling mengenal dan berintegrasi dalam suatu pergaulan internasional yang dinamakan dengan globalisasi dan penyatuan ekonomi tanpa batas.

Fakta menunjukkan bahwa terdapat sejumlah negara yang miskin bahan baku atau sumber daya alam tetapi sejahtera, namun ada juga sejumlah negara yang kaya dengan bahan baku tetapi miskin. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan kualitas sumber daya manusianya, dalam bentuk kualitas modal manusia individual dan total modal manusia yang dimiliki. Apabila penduduk suatu negara memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan sikap yang baik maka cenderung negara tersebut lebih kaya dibandingkan dengan negara lain.

F. Eksternalitas Modal Sosial

Eksternalitas merupakan salah satu fenomena dari suatu peristiwa dan objek sosial, sama halnya dengan pendirian pabrik atau mekanisme pasar. Dimana ketika suatu pabrik didirikan maka terdapat dua bentuk eksternalitas yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Munculnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja merupakan bentuk dari eksternalitas positif sedangkan eksternalitas negatif yang muncul dapat berupa polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan. Modal sosial juga memiliki eksternalitas, dimana ketika Robert Putnam (1993) merenung tentang konsep modal sosial, beliau telah mampu membaca dan menuliskan bahwa modal sosial ternyata memiliki eksternalitas negatif, contohnya lahirnya interaksi personal yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan atau kasus ekstrim seperti organisasi mafia di Italia dan perang antar suku di Rwanda. Putnam (1993) menjelaskan keanggotaan seseorang dalam suatu asosiasi atau organisasi akan memberikan keuntungan (*benefit*) bagi anggota asosiasi tersebut namun juga menimbulkan kerugian bagi non anggota asosiasi.

Teori Sosiologi Putnam ini juga mampu menjawab salah satu persoalan di tanah air kita Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dari suatu nilai kebangsaan, solidaritas sesama jajahan Belanda sehingga secara teritorial negara wilayah Indonesia adalah bekas wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Dahulu ketika awal kedatangan bangsa Eropa di Nusantara, muncul penolakan di hampir sebagian besar wilayah nusantara, terjadi perlawanan, perang Diponegoro, Perang Ambon, Perang Aceh, Perang Padri, Perang Mataram, Perang Malaka, Perang Banten, Perang Hasanuddin, Perang Sisingamangaraja, Perang Antasari, dan ribuan perang lainnya melawan Belanda. Namun peperangan tersebut berhasil dikalahkan oleh Belanda, karena terjadi gerakan sporadis dan tidak terkoordinasi dengan bersama dalam bentuk persatuan. Namun perlahan-lahan, kesadaran akan pentingnya persatuan mulai tumbuh, karena pendidikan politik rakyat terus dilakukan oleh partai politik *non cooperation* yang diterapkan oleh para pemimpin pergerakan setelah tahun 1908 hingga 1942. Dan ketika Jepang kalah dalam perang dunia kedua, semangat persatuan itu menjadi utuh sehingga secara bersama-sama bangsa terjajah "Bangsa Indonesia" melawan keinginan Belanda untuk mendirikan pemerintahan periode keduanya di Indonesia sehingga terjadilah perang masif, secara bersama-sama melawan Belanda (NICA) dalam periode revolusi fisik 1945–1949, untuk mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan berkat rahmat Allah yang maha kuasa kita sudah sampai digerbang kemerdekaan dan saat ini sudah mulai bangkit dari keteringgalan.

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2013 saat ini, bangsa Indonesia telah berumur lebih dari 68 tahun, hampir satu abad. Dalam perjalanan Bangsa yang besar ini, kita masih dihadapkan

dengan persoalan kemiskinan, daya beli masyarakat yang rendah, kesenjangan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia yang masih rendah dan kualitas layanan publik yang masih rendah.

Imam Prasoejo (dalam diskusi LK II HMI) di Depok tahun 2000, mengutarakan bahwa bangsa ini berdiri atas dasar solidaritas sama-sama dijajah namun kemudian ketika negara tidak mampu memberikan fungsi-fungsi sosial yakni kemakmuran, keadilan, kesejahteraan dan seterusnya maka solidaritas tersebut akan hilang dengan sendirinya dan akan muncul suatu semangat baru, yakni semangat kesukuan, semangat kedaerahan, semangat kepartaian, semangat kelompok menjadi interest group dan lama kelamaan menjadi menguat dan ketika kekuatannya sudah melebihi dari kekuatan kebangsaan Indonesia maka akan berdiri negara baru pecahan dari negara Indonesia (kasus Timor Timur) atau kasus Aceh yang ingin memisahkan diri, atau kasus RMS (Republik Maluku Selatan) maupun GPM (Gerakan Papua Merdeka).

Fakta tersebut saat ini semakin jelas, eksternalitas modal sosial, sebagai suatu konsep secara empiris bisa dijumpai di Indonesia, seperti partai politik dengan warna-warni ideologi masing-masing, tapi pada dasarnya partai politik hanya berebut sumber daya untuk kepentingan kelompok masing-masing bukan dalam kepentingan bangsa yang lebih besar. Mereka memperkuat partainya dan meninggikan gaji legislatornya, dengan berbagai kasus yang sudah dan sedang disidang di pengadilan tindak pidana korupsi.

Idiologi tinggal idiologi, visi tinggal visi, dan misi juga tinggal misi, tujuan utama adalah bagaimana dekat dengan akses sumber daya sehingga bisa memperkaya group dan anggota keluarga (*dinasty*) (kasus KKN, semasa orde baru). Pada masa orde lama

partai komunis begitu dekat dengan kekuasaan yang netral, sehingga PKI mampu mempengaruhi kekuasaan (presiden) dan akhirnya menghasilkan kebijakan yang selalu dekat dengan kepentingan PKI, sehingga kelompok lain merasa dirugikan dan terjadi peristiwa G 30 S PKI serta terbentuk group baru yakni Orde baru. Orde baru kemudian berkuasa dan mampu mempengaruhi kebijakan sehingga mendapatkan benefit ekonomi dan politik yang besar serta kelompok lain yang jauh dari kekuasaan menjadi terpinggirkan dan sulit untuk mengakses sumber daya. Hingga pada akhirnya, terjadi desakan reformasi tahun 1998 sehingga masa kejayaan orde baru runtuh dan digantikan oleh orde reformasi hingga saat ini.

Orde reformasi dimulai dari kepemimpinan Gus Dur-Mega dan Mega-Hamzah. Pada masa pemerintahan Gus Dur-Mega (hijau dan merah) juga terdapat serentetan permasalahan di mana sumber daya yang ada diarahkan untuk kepentingan kelompok, perusahaan-perusahaan strategis dijual dan dilakukan privatisasi dengan harapan untuk menutup devisit anggaran namun di balik hal tersebut ternyata berharap mendapatkan sejumlah fee finansial bagi kelompok tertentu, kasus penjualan kapal tengker Pertamina, penjualan Indosat, Telkomsel, dan perusahaan-perusahaan strategis lainnya. Termasuk juga periode SBY-JK dan SBY-Boediono (Biru dan Kuning, serta kabinet pelanginya) menguasai sumber daya, kebijakan negara mengarah pada kepentingan group korporasi tertentu sehingga menempatkannya pada penguasaan sumber daya yang amat besar di Indonesia sementara rakyat hanya bisa gigit jari dan menerima eksternalitas harga yang menyesakkan dada.

Kalaulah kemudian perilaku anak bangsa terus berjalan seperti ini maka mengutip Nabahani (1953) bahwa nilai kebangsaan

merupakan nilai terendah dalam pembentukan bangsa, karena nilai ini bersumber dari semangat emosional, merasa sama-sama (se-suku, se-wilayah, se-nasib dan se-lainnya). Nilai ini muncul ketika adanya naluri untuk mempertahankan suku, wilayah dan memperjuangkan nasibnya. Ketika ada pihak asing masuk ke wilayah tertentu maka muncul semangat untuk mengusir orang asing tersebut, tetapi manakala pihak asing sudah pergi dari negeri tersebut nilai nasionalisme mulai turun dan akan muncul nilai-nilai baru yakni nilai keinginan untuk mendominasi oleh suku tertentu (misalnya dikembangkan mitos kalau capresnya tidak dari suku Jawa maka tidak akan pernah menang dalam pemilihan presiden), nilai ingin kaya oleh group korporasi tertentu, nilai ingin dikenal, nilai ingin menunjukkan kehebatan latarbelakang institusi masing-masing, saya alumni A, B, C, alumni ormas ini, itu, dan lain-lain.

Munculnya kepentingan kelompok dalam kajian sosiologis adalah suatu hal yang alamiah terjadi sebagai akibat dari rendahnya nilai bangunan bangsa yang diciptakan. Apabila hal ini tidak segera diperbaiki maka lunturnya nasionalisme kebangsaan Indonesia hanya tinggal menunggu waktu dan sama halnya dengan proses siklus kerajaan di Nusantara, Sriwijaya runtuh, muncul Majapahit, Majapahit runtuh, muncul Mataram, Mataram runtuh, muncul Samudera Pasai, Samudera Pasai runtuh, muncul Pagaruyung, muncul Kesultanan Siak, Deli Serdang, Demak, dan bisa jadi di kemudian hari jika semangat kebangsaan tidak diiringi dengan fungsi sosial yang diciptakan oleh negara maka akan lahir negara-negara baru seperti yang terjadi atas Yugoslavia dalam bentuk Bosnia, Serbia, Montenegro, Kosovo dan lain-lain.

Dan semoga berbagai elemen bangsa bisa menyadari ini, dan melakukan koreksi kebijakan dan koreksi sosial sehingga kembali pada titik keseimbangan dan keutuhan sebuah bangsa tetap terjaga untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

BAB V

MEMBANGUN MODAL MANUSIA DAN MODAL SOSIAL

A. Pendidikan dan Modal Manusia

Sama halnya dengan kekayaan fisik, kekayaan modal manusia dan kekayaan modal sosial juga memerlukan waktu, usaha, pengalaman dan biaya untuk proses penciptaannya. Beberapa tokoh muda angkatan 1990-an sebagai cikal bakal pelaku usaha, pemimpin bangsa dan profesional memberikan penilaian atas pentingnya modal manusia dan modal sosial. Wawancara dan diskusi yang mendalam ini dilakukan dalam kurun waktu 2009. Agung Sudjatmoko merupakan Wakil ketua umum Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) menyelesaikan S1 di UNS Surakarta, Megister Manajemen di Unkris Jakarta dan S3 sedang penyelesaian disertasi di Universitas Pasundan. Gatut Sudaryanto seorang peneliti dan dosen yang sekarang tinggal di kota Brisbane S1 ditamatkan di ITB Bandung, dan S2-S3 diselesaikan di The University Of Quensland, Sementara itu Nawir Sikki Seorang aktivis LSM memulai beraktivitas di Padang dengan S1 di Pendidikan Elektronika, S2 di PPS Unand Padang dan menjadi sekretaris Jenderal Jari Indonesia. Sementara itu Irwandy Manday merupakan

seorang guru SMK di Batam berjuang membangun modal manusia dan modal sosial dengan kuliah sambil bekerja dan sekarang sedang menyelesaikan S2 di Surabaya.

Dalam bab ini, akan dijelaskan beberapa pendapat, dan testimoni dari beberapa aktivis mahasiswa dan masyarakat dalam membangun modal manusia dan modal sosial dari pengalaman langsung yang alami. Narasi berikut ini merupakan wawancara langsung penulis dengan informan berkaitan dengan bagaimana cara membangun modal manusia dan modal sosial.

Agung Sudjatmoko (Aktivis gerakan koperasi nasional), menghabiskan waktu 23 tahun untuk mengikuti program pendidikan formal. Menurut Sudjatmoko (2009) keberhasilan di masa tua tidak terlepas dari cita-cita masa kecil, Sudjatmoko mengatakan "Setamat sekolah dasar saya inginnya ketika itu menjadi pengusaha, tetapi seiring dengan kemampuan keluarga yang pas-pasan akhirnya saya banting stir masuk ke sekolah keguruan, berharap menjadi guru, tetapi berkat aktivitas di koperasi akhirnya menyeret saya untuk jadi profesional dan menggeluti dunia usaha yang bergerak di dunia pendidikan". Hal ini membuktikan bahwa eksistensi di masa muda dan dewasa tidak terlepas dari impian semasa kecil dan proses hidup.

Nawir Sikki (aktivis angkatan 98-pro reformasi) sekarang aktivis LSM dan pegiat sosial alumni Universitas Negeri Padang (UNP) dan kandidat master di Universitas Andalas ini, menghabiskan waktu 19 tahun untuk sekolah sampai ke perguruan tinggi dan sudah 5 tahun di program magister serta telah menghabiskan waktu 24 tahun untuk membangun modal manusia. Nawir Sikki memiliki beberapa kemampuan di antaranya adalah: *Participatory Planning*; *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Rural Refiek Appraisal* (RRA),

Participatory Learning and Action (PLA) dan *Participary Reflektif and Action* (PRA), *Performance Monitoring Evaluasi* (PME). *Community Developmen* (CD): *Focus Group Discussion* (FGD), Analisis SWOT, Analisis-Rekayasa Sosial (Ansos), Desain Deanostik, dan *strategic komparatif Pemetaan Potensi. Organization Development* (SO: *Strategic Planning* CSO. Transparansi dan Akuntabilitas NGO (tango). Dan kemampuan teknik juga dimiliki sesuai dengan bidang ilmu S1 teknik elektronika.

Cita-cita merupakan sesuatu yang amat penting, kita masih ingat dengan slogan yang disampaikan oleh pendiri negeri ini "Ir Soekarno" yang amat terkenal, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit". Artinya cita-cita merupakan cara pandang diri kita tentang kondisi masa datang. Kalau kita telusuri lagi dalam masa sekarang tetap saja cita-cita itu menjadi sesuatu yang perlu dibuat sejak dini. Beberapa responden yang penulis tanyakan, pada umumnya mereka memiliki cita-cita masa kecil sebagai sesuatu impian yang akan dicapai.

Gatut Sudarjanto, Ph.D, seorang ilmuan yang tinggal di Brisbane—Australia menyatakan cita-cita merupakan sesuatu yang amat penting dan menjadi dasar serta motivasi awal. Lebih lanjut, Gatut (2009) menyatakan bahwa beliau terobsesi dengan cita-cita masa kecilnya untuk menjadi Insinyur dan bisa naik haji. Inilah menjadi cara pandang awal untuk menentukan arah proses perjalanan pendidikannya di kemudian hari. Dan agar generasi muda Indonesia dapat bekerja di luar negeri maka keahlian yang mesti diberikan kepada generasi muda Indonesia, adalah kemampuan berbahasa asing (khususnya Inggris), kemampuan mengeluarkan pendapat, memiliki karakter proaktif, kemampuan team work yang baik dan

kemampuan *leadership*. Sama halnya dengan Agung Sudjatmoko, Sikki (2009) juga memiliki obsesi masa kecil yakni ingin menjadi bupati. Sementara itu ketika penulis tanya kepada seorang guru Irwandy Manday, S.kom., di Batam, bahwa beliau juga memiliki cita-cita masa kecil yakni ingin menjadi pejabat.

B. Peran Orang Tua dalam Pendidikan

Ketika ditanyakan apakah orang tua memiliki peran dalam proses pendidikan, semua nara sumber menyatakan bahwa orang tua memiliki peran yang penting dalam proses pendidikan. Sudjatmoko (2009) menyatakan "Orang tua siapapun pasti menginginkan anaknya dapat sekolah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, namun kemampuan ekonomi keluarga menyebabkan banyak anak yang putus sekolah karena kemiskinan. Inilah pangkal permasalahan lingkaran kemiskinan yang akan terjadi Apabila tidak ada usaha sistematis untuk mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Yakinlah, kalau orang tua pasti ingin menyekolahkan anaknya agar cerdas dan hidup lebih baik".

Senada dengan hal di atas, Sikki (2009) menyatakan "Orang tua sangat berperan karena memberikan banyak nasehat, motivasi, dan fasilitas untuk memperoleh pendidikan formal dan informal" dan Manday (2009) menyatakan "Dalam mendukung pendidikan, orang tua sangat memberikan motivasi sehingga Support untuk mencapai yang lebih tinggi akan tetap dilakukan untuk dapat mengabdikan diri bagi bangsa dan Negara tercinta". Gatut (2009) menyatakan bahwa "kewajiban orang tua untuk memberi sarana dan prasarana yang baik (memadai) bagi anak, memberi dasar atau pondasi yang kuat sejak dini".

C. Modal Sosial dan Kesuksesan Pekerjaan

Lin (1999) menjelaskan bahwa salah satu keuntungan modal sosial bagi individu adalah individu memiliki akses kepada sumber daya, contohnya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ketika dikonfirmasi kepada nara sumber, rata-rata mereka menyetujui pendapat tersebut.

Kesuksesan seseorang tidak terlepas dari kemampuan atau kompetensi diri, namun kompetensi saja tidaklah cukup. Individu meskilah memiliki jaringan (koneksi), kepercayaan dan mitra bisnis. Sudjatmoko (2009) menyatakan "Jaringan kerja itu harus dibangun melalui kemampuan bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. karena salah satu prinsip bisnis yang sukses adalah memanfaatkan kemampuan atau potensi orang lain untuk bisnis kita tanpa merugikan orang tersebut. Kesuksesan ditentukan oleh kata tangan yaitu "garis tangan" sebagai guratan nasib kita, dan "campur tangan" karena kemitraan atau bantuan orang lain. Keberlanjutan kemitraan itu akan terjadi apabila menggunakan prinsip win win solution.

Sementara itu Sikki (2009) menyatakan "Sangat menentukan suatu bangunan kepercayaan (*trust*) dalam membangun hubungan kerja dan kemitraan, oleh karena itu akses informasi harus terus di tingkatkan dan difasilitasi oleh pemerinatah maupun multi pihak. Dan Manday (2009) menyatakan "Dalam dunia bisnis, networking sangat penting karena hubungan ini tak bisa dipisahkan untuk meningkatkan kemenangan di antara dua kepentingan yang saling membutuhkan". Sejalan dengan hal tersebut, Gatut (2009) menyatakan jaringan merupakan sesuatu yang penting, dalam arti yang positif. Seringkali informasi dan kesempatan diperoleh dari jaringan.

D. Modal Manusia dan Keahlian

Para ekonom seperti Becker (1975) meyakini bahwa tingkat keahlian seseorang amat menentukan pendapatan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, ahli manajemen menguraikan bahwa modal manusia menentukan produktivitas pekerja. Davenport (1999) menjelaskan bahwa modal manusia memiliki empat model yakni ability, behavior, effort dan time. Kemampuan (*ability*) merupakan seperangkat pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), bakat (*talent*) dan sikap (*attitude*) serta menghasilkan perilaku (*behavioral*). Tinggi rendahnya modal manusia seseorang sangat ditentukan oleh usaha (*effort*) dikali dengan waktu yang digunakan untuk belajar (*time learning*).

Ketika dikonfirmasi kepada nara sumber, yakni tokoh muda yang telah melakukan investasi modal manusia melebihi rata-rata lama bersekolah orang Indonesia yakni 7,8 tahun (Bappenas, 2007), Sudjarmoko (2009) menyatakan "terdapat hubungan antara keahlian dan pendapatan, tetapi korelasi keahlian dengan pendapatan itu relatif, karena pendapatan bisa disebabkan oleh jabatan, koneksi atau perkoncoan, untuk itu pertemanan (*externality social capital*) merupakan awal sebuah kesuksesan, tetapi jangan berteman untuk kehancuran". Sementara itu Manday (2009) menyatakan "Memang ada, tapi relasinya sangat sedikit, Cuma lebih kurang 75 persen, lebih banyak pendapat didapatkan ketika tidak korelasinya antara keterampilan yang dimiliki dengan pendapatan yang ada".

Sementara Gatut (2009) yang telah memiliki pengalaman bekerja di Indonesia dan di luar negeri menyatakan "Iya, keahlian memiliki hubungan positif dengan penghasilan tapi untuk kasus bekerja di luar negeri (Malaysia & Australia). 2. Tidak, untuk kasus bekerja di Indonesia".

E. Membangun *Networking*, *Trust*, *Norm*, dan Kerjasama Tim

Coleman (1988) menjelaskan modal sosial terjadi karena terjadinya relasi dalam masyarakat, semakin banyak hubungan yang dibangun maka modal sosial juga akan semakin tinggi. Nawir (2009) mengemukakan bangunan modal sosial dibangun dengan upaya:

1. Butuh memperdalam dan meningkatkan terus kompetensi atau kualifikasi keahlian.
2. Menunjukkan, mensosialisasikan atau mempublikasi hal-hal yang telah diperbuat menyangkut kinerja (manfaat/dampak) dari suatu aktifitas atau pekerjaan.
3. Menjaga tanggungjawab secara amanah (kinerja yang optima sesuai kerangka kerja, tujuan, target dari suatu aktifitas atau pekerjaan.
4. Mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran, sikap adil dan objektif dalam beraktifitas atau bekerja.
5. Membangun relasi kerja yang saling bersinergis, objektif tanpa melemahkan satu dengan lainnya.

Sudjarmoko (2009) mengemukakan membangun modal sosial itu dengan upaya: 1) Bekerja cerdas, 2) Membangun jiwa karsa, 3) Menumbuhkan kebersamaan dengan membangun kepemimpinan yang egaliter, 4) Menyusun rencana kerja yang terukur dan terstandar, 5) Menyusun pedoman pekerjaan yang sistematis, dan 6) Melakukan berbagai aktivitas yang membangun *net working*.

Manday (2009) menyatakan bahwa membangun *networking* yang bagus harus kita lakukan baik untuk tingkat lingkungan terendah di tingkat tetangga sampai tingkat bisnis. Dan Gatut (2009) menyatakan diperlukan keterbukaan, kejujuran dan komitmen. Juga peraturan yang jelas dan disetujui bersama.

F. Upaya untuk Meningkatkan Kapabilitas Diri atau Modal Manusia (Keahlian, Keterampilan, Sikap, Kepemimpinan).

Ahli Ekonomi, Becker (1975) menjelaskan manusia memerlukan modal manusia untuk meningkatkan pendapatannya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan akumulasi modal manusia diantaranya adalah peningkatan lama bersekolah (*Schooling*), pendidikan dan latihan kerja (*job-training*), merantau (*migration*) dan proses pencarian informasi: lowongan kerja dan harga upah yang lebih tinggi (*searching*). Hampir sejalan dengan itu, ketika dikonfirmasi kepada narasumber Sudjatmoko (2009) menjelaskan "Banyak belajar, banyak bergaul, banyak berlatih, berpikir positif, kreatif dan inovatif, mandiri, dan kuasai dengan baik kemampuan kewirausahaan dan kepemimpinan. Sementara itu Nawir (2009) menjelaskan "Butuh membangun system, kelembagaan dan budaya kerja yang disiplin, bertanggungjawab dan objektif terhadap berbagai hal, mulai dari ranah kecil, seperti internal keluarga, dengan transformasi kritis pada anak tentang nilai-nilai kapabilitas tersebut, internal kelembagaan, organisasi, institusi tempat bernaung, dengan mentransformasi nilai-nilai yg sama tersebut di atas.

Gatut (2009) mengutarakan bahwa perlu pendidikan awal sejak usia dini baik di sekolah maupun di rumah. Banyak memberikan pelatihan, contoh kasus, berbagi pengalaman, diskusi, dan lain-lain. Sementara itu Manday (2009) Selalu bersyukur dengan apa yang telah kita peroleh serta meningkat pendidikan dan keterampilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

G. Upaya Mengurangi Tingkat Pengangguran Terdidik di Indonesia

Upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran bisa dilakukan dalam dua sisi, di sisi permintaan tenaga kerja dan sisi penawaran

tenaga kerja. Pada sisi permintaan tenaga kerja, bagaimana sektor usaha bisa ditingkatkan pertumbuhannya melalui peningkatan uang beredar dan dengan kebijakan ekspansif. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan kebijakan moneter, mengurangi tingkat suku bunga, dan mengurangi tarif pajak (*fiscal*), meningkatkan pinjaman luar negeri atau investasi dari luar negeri (penanaman modal asing) atau bisa juga dengan peningkatan hubungan dagang (*eksport*) ke luar negeri.

Namun di samping pada usaha permintaan tenaga kerja (*demand*), upaya pengurangan tingkat pengangguran juga bisa dilakukan dengan memperbaiki kualitas penawaran tenaga kerja. Supply tenaga kerja biasanya dihasilkan dari output lembaga pendidikan. Maka untuk mengurangi tingkat pengangguran biasanya dilakukan dengan upaya meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja yang terjun ke dunia kerja (Elfindri, 2001). Upaya ini dilakukan dengan upaya mensinkronkan antara kebutuhan keahlian kerja dengan kurikulum pendidikan. Ketika ditanyakan kepada narasumber suatu pertanyaan mengenai bagaimana mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia? Narasumber menjawab :

"Lakukan perubahan sistem pendidikan secara gradual melalui: 1) Tetapkan visi baru pendidikan untuk kecerdasan dan kemandirian rakyat. 2) Rubah sistem pendidikan yang teacher center ke student centre. 3) Kembangkan entrepreneurship skills, 4) Bangun sistem ekonomi yang memberdayakan rakyat. 5) Lakukan perubahan tata niaga, 6) Kembangkan berbagai program pelatihan untuk berwirausaha," Sudjatmoko (2009).

Nawir (2009) menjelaskan upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terdidik yakni dengan upaya: 1) Memfasilitasi

peningkatan kapasitas dan keterampilan yang bertujuan menciptakan lapangan kerja mandiri sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya social budaya; 2) Membuka lapangan kerja yang berorientasi pada padat karya; pembangunan infrastruktur sarana public melalui pembiayaan dalam negeri dan luar negeri (APBN dan SUN) yang menyerat banyak disiplin ilmu, 3) Memfasilitasi para pengangguran terdidik untuk berorientasi bekerja melalui sarana masuk desa atau kampung, 4) Jangka panjang, meningkatkan kurikulum pendidikan yang standar, mulai dari tenaga pengajar, fasilitas dan peserta didik yang kompetitif.

Sementara itu Manday (2009) menjelaskan "Langkah yang harus dilaksanakan adalah selalu meningkatkan perekonomian dalam negeri dan meningkatkan investasi di bidang produksi dan di dunia pendidikan, terutama pada bangku perkuliahan agar selalu menekan pendidikan untuk tetap bersaing, karena banyak pengangguran terdidik tidak mampu bersaing dengan yang lainnya"

Gatut (2009) menyatakan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia maka harus menekan tindakan KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme) dan memberi atau meningkatkan penghargaan yang sesuai terhadap keahlian yang dimiliki: *the right person on the right job!*

MEMBANGUN KEMAJUAN BANGSA

A. Sumber Kemajuan Bangsa

Dewasa ini, di satu sisi terdapat sejumlah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi namun di sisi lain juga terdapat negara yang berada pada standar hidup yang rendah.

UNDP (2005), terdapat 70 negara dengan kategori makmur, 75 negara dalam kategori menengah dan masih berkembang dan 22 negara yang masuk dalam kategori miskin dan terbelakang. Negara-negara yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara 07 - 1, dikategorikan memiliki IPM tinggi, di antaranya adalah negara yang tergabung di negara-negara OECD, Uni Eropa, dan sebagian negara di Asia dan Amerika Latin, di antaranya adalah Iceland, Norwegia, Australia, Canada, Irlandia, Swedia, Swiss, Jepang, Pernacis, Finlandia, Belanda, USA, Spanyol, Italia, Malaysia, Brasil, Saudi Arabia, Rusia, Bosnis, Oman, dll, jumlahnya 70 negara pada tahun 2007. Di tingkat menengah terdapat negara yang sebagian besar di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Pasifik, Afrika Utara, Amerika Latin seperti: Dominika, Kazakstan,

Venezuela, Ukraina, Turki, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia, Yaman, Timor Leste, dll, yang berjumlah 75 negara dengan IPM 0,49 - 0,69. Sementara itu negara yang dikategorikan negara dengan IPM rendah di antaranya adalah negara yang terletak di Afrika tengah, dan Selatan, diantaranya adalah: Senegal, Mali, Malawi, Angola, Ethiopia, Chad, Nigeria, Kongo, Rwanda, dll, yang terdiri dari 22 negara dari 157 negara, dengan IPM kurang dari 0,48.

Berdasarkan data HDI yang dirilis pada Tahun 2012, terdapat 10 negara paling makmur di dunia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu negara Norwegia (0,943), Australia (0,929), Belanda (0,910), Amerika Serikat (0,910), Selandia Baru (0,908), Kanada (0,908), Irlandia (0,908), Liechtenstein (0,905), Jerman (0,905) dan Swedia 0,904), sedangkan Indonesia masih termasuk kedalam kategori negara berkembang dimana IPM Indonesia adalah sebesar 0,629.

Banyak penjelasan yang bisa kita peroleh kenapa perbedaan ini terjadi. Yeager (1999, dalam Yustika, 2006) menjelaskan ada 5 hipotesis yang diperkirakan menjadi sumber kemajuan ekonomi sebuah negara. 1) Modal sumber daya manusia (*human capital*), 2) Sumber daya alam (*natural resources*), 3) Kepadatan penduduk yang rendah (*population density*), 4) Penguasaan teknologi, dan 5) Letak geografis, negara-negara yang terletak di daerah khatulistiwa yang berhawa sangat panas, memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak.

Dari kelima faktor tersebut, secara empiris bukan berarti bahwa ketika suatu negara memiliki atau tidak memiliki sumber pertumbuhannya, maka negara tersebut tidak bisa makmur. Ada kalanya suatu negara memiliki sumber daya alam yang banyak dan

unik tetapi negara tersebut belum tentu makmur. Tetapi ada juga suatu negara memiliki sumber daya yang terbatas namun makmur. Akhirnya para ahli pembangunan menyatakan bahwa faktor manusia-lah yang menentukan makmur atau tidaknya suatu negara, maksudnya kualitas sumber daya manusia karena manusia adalah faktor yang aktif dalam proses pembangunan sementara faktor yang lain adalah faktor yang pasif.

Bagaimana dengan Indonesia

Indonesia memiliki luas laut, pantai, hutan, bahan material, dan penduduk yang banyak. Jika kita menelaah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia, maka PDB per kapita Indonesia mengalami pertumbuhan cukup pesat. Pada tahun 2012, PDB per kapita Indonesia sebesar 3.850 atau sekitar Rp 37 juta. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2012 bila dibandingkan triwulan III-2011 tercatat sebesar 6,17% (yoy) dan secara kumulatif mencapai sebesar 6,29% bila dibandingkan periode yang sama tahun 2011 (ctc).

Sebagaimana terlihat dalam Grafik dan Tabel I, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat stabil di kisaran $5,5\% \pm 1\%$ dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11%. Sejak tahun 2007 hingga 2012, tingkat pertumbuhan hampir selalu di atas 6% dengan pengecualian tahun 2009 (4,6%) sejalan dengan krisis ekonomi global akibat kegagalan sektor kredit properti (*subprime mortgage crises*) dimana sebagian besar negara bahkan mengalami pertumbuhan minus.

Gambar 6.1: Pertumbuhan Ekonomi, ASEAN China dan India, 2002-2012,
Sumber IMF, Oktober 2012.

Hingga triwulan III-2012 seperti terlihat dalam Tabel II, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia didominasi oleh pengeluaran Konsumsi Masyarakat (54,79%), diikuti oleh PMTB (37,58%), pengeluaran Pemerintah (8,24%). Meskipun kinerja ekspor secara nominal terus meningkat (23,1% dari PDB), namun kebutuhan impor barang modal dan bahan baku atau antara untuk kebutuhan produksi yang terus meningkat (23,7% dari PDB) telah menyebabkan neraca perdagangan mengalami defisit (minus) (BPS, 2012)

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan, namun hal tersebut belum mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh, hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dalam lingkaran kemiskinan, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2013 mencapai 28,07 juta

orang. Pada kasus Indonesia ada dugaan bahwa terdapat beberapa penyebab rendahnya tingkat kemakmuran. Penyebab yang dominan adalah kesalahan pemimpin Indonesia dalam mengatur perekonomian, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, mengatur distribusi kekayaan, regulasi pengelolaan sumber daya alam, rendahnya investasi pada sumber daya manusia, rendahnya investasi pada infrastruktur khususnya di daerah luar Jawa, pengalokasian tanah yang dominan dikuasai oleh investasi asing dan swasta serta BUMN sehingga rakyat tidak memiliki cukup lahan untuk mengembangkan bisnis pertaniannya, padahal Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2013 pekerja di sektor ini adalah sebanyak 39,96 juta orang. Sementara itu kalau kita bandingkan dengan petani Australia rata-rata 1 keluarga rata-rata memiliki 50 hektar lahan.

Politik dan Negara Kesejahteraan.

Di Indonesia pemikiran tentang pentingnya peran kelembagaan telah dimulai sejak awal reformasi dilakukan dengan bergulirnya wacana pemerintahan yang bersih (*good governance*), dengan asumsi bahwa jika pemerintahan dilaksanakan dengan baik maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun sistem pemerintahan yang kita laksanakan sekarang masih memerlukan pembenahan. Benar, bahwa sistem demokrasi yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik dan dengan pemimpin yang baik tersebut akan mendorong pengalokasian sumber daya pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun, dewasa ini perilaku elit kekuasaan cenderung memanfaatkan akses dan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dan semakin memantapkan kekuasaan pada lingkaran pertemanan,

anggota partai politik, jaringan dan keluarga (koneksitisitas) (kasus hukum anggota dewan atas pengalihan hutan lindung di Bintan, kasus dana BI, di KPK). Hal ini sejalan dengan analisis Putnam (1993) tentang eksternalitas modal sosial. Pembahasan ini akan lebih mendalam pada bab eksternalitas modal sosial.

Pada proses pemilu legislatif ribuan orang dengan latar belakang sosial dan ekonomi berusaha untuk berebut kesempatan menjadi anggota legislatif. Kita patut berbangga ternyata amat banyak orang yang memiliki keinginan dan cita-cita untuk memperbaiki bangsa ini. Ada yang berbendera hijau, kuning, hitam, merah, putih, biru, pink, abu-abu dan berbagai kombinasi warna tersebut. Hal ini merupakan salah satu pertanda kemajuan bangsa dalam aspek politik, munculnya partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan dan kekuasaan. Sebagian kelompok masyarakat meyakini cara sosialis merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, begitupun dengan cara nasionalis dan ada juga yang berkayakinan cara spritualitas serta nilai-nilai religius juga merupakan cara yang tepat untuk memperbaiki bangsa ini sehingga dengan pertimbangan itulah kemudian mereka memilih partai politik tertentu sebagai kendaraan. Namun bukan berarti idiologi partai itu saja yang menjadi faktor daya tarik seseorang masuk dalam partai. Di dalamnya juga terdapat faktor jaringan, akses dan kaum kerabat yang dimiliki oleh masing-masing partai.

Dan kemudian muncul pertanyaan kenapa orang berbondong-bondong ingin menjadi calon legislatif (caleg?). Dari berbagai renungan dan diskusi yang penulis lakukan, terdapat beberapa faktor dominan yang menyebabkan orang menjadi caleg diantaranya adalah: 1) Adanya harapan pendapatan dari gaji, honor, tunjangan dan uang

perjalanan dinas anggota dewan, 2) Adanya keinginan untuk merubah status sosial, dari orang yang tidak bekerja (*unemployment*) ke orang yang bekerja, dari rakyat ke penguasa, dari aktivis LSM ke aktivis politik, dari penggerak sosial kemasyarakatan ke jabatan struktural, 3) Adanya keinginan untuk lebih dekat dengan sumber kekuasaan sehingga bisa membagi dan mendapatkan kue pembangunan berupa proyek-proyek, 4) Adanya hasrat untuk mewujudkan visi dan misi individu serta kelompok atas nilai idiologi dan pemikiran tertentu. Umpamanya idiologi nasionalisme ingin burung garuda kembali terbang tinggi, mensejahterakan rakyat, menciptakan syariah dan melakukan redistribusi aset, 5) Adanya semangat kedaerahan dan kekampungan yang selama ini termarginalkan oleh daerah lain, umpamanya dari daerah terpencil, dari daerah luar jawa, dari daerah pesisir, dari daerah desa dan lain-lain.

Dari lima faktor dominan tersebut, bisa ditarik sebuah hipotesis bahwa faktor yang paling dominan yang menyebabkan seseorang berkeinginan menjadi anggota partai dan menjadi Caleg adalah motivasi untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya sendiri dengan harapan mendapatkan sejumlah rupiah dari gaji, tunjangan, honor dan perjalanan dinas. Hipotesis ini didasarkan pada beberapa fakta, bahwa Caleg dalam proses untuk mendapatkan simpati dan pilihan rakyat rela menginvestasikan dananya untuk media kampanye, kegiatan kampanye, bahkan tidak jarang melakukan politik uang (*money politic*) untuk mendapatkan suara konstituen, walaupun terkadang harus meminjam dari pihak lain. Para Caleg mempersepsikan menjadi anggota legislatif sebagai upaya untuk merubah nasib, merubah orientasi bisnis, merubah kedudukan dan seterusnya.

Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah pemimpin sekarang bisa dikatakan sebagai pemegang amanah atau hanya seorang pedagang atau investor, atau pencari kerja yang berharap mendapatkan pengembalian investasi (*rate of return investment*) dan sejumlah penghasilan? Pertanyaan ini juga ditanyakan oleh salah seorang pemimpin daerah, pada akhir Januari 2009 yang lalu dalam sebuah diskusi di Pangeran Beach Hotel. Gubernur Sumatera Barat (Gamawan Fauzi, 2009) mempertanyakan "Layakkah pemimpin hari ini dikatakan sebagai pemegang amanah?" padahal dalam proses kampanye sering terjadi calon pimpinan daerah dan calon legislatif mengeluarkan cukup banyak dana untuk meminta amanah itu. Sedangkan dalam proses pra pemilu telah terjadi transaksi jual-beli hak rakyat, calon pemimpin yang membeli dan rakyat yang menjual haknya, bukan lagi pemimpin yang disertai amanah dan rakyat memberikan amanah.

Pertanyaan itu menarik untuk di jawab, ketika penulis tanyakan ke beberapa Caleg yang dianggap memiliki kapabilitas dan idealisme melalui jejaring sosial yaitu facebook, ternyata tidak seorang caleg pun yang berani menjawab pertanyaan itu. Dari kondisi ini bisa dihipotesiskan proses demokrasi kita sekarang tidak menghasilkan pemimpin yang akan memegang amanah tetapi, para investor yang berharap untuk mendapatkan benefit finansial di periode keanggotannya ketika menjadi legislator dan pimpinan negara dan daerah.

Maka tidak heran, di beberapa daerah, hampir sebagian besar dana yang diperoleh dari penghasilan asli daerah (PAD) hanya bisa menutupi kegiatan legislasi daerah (DPRD) sebagaimana kasus yang pernah terjadi pada tahun 2004 dimana terjadi anggaran ganda yang

membuat alokasi untuk anggota Dewan semakin besar. Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang Susana Dewi R menilai terdapat dua persoalan penting RAPBD 2004 dalam kaitannya dengan anggaran untuk Dewan. Pertama, naiknya alokasi dana belanja aparatur daerah DPRD secara fantastis, yakni sebesar Rp 600.966.000 dari anggaran tahun sebelumnya. Kedua adanya alokasi ganda atau dobel untuk biaya penunjang kegiatan DPRD dan selanjutnya pemerintah daerah hanya mengandalkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus untuk pembangunan. Namun ternyata sebagian besar dana tersebut juga habis untuk belanja rutin pemerintahan, untuk gaji pegawai dan pengadaan barang administrasi. Sehingga hipotesis awal yang menyatakan demokrasi akan menciptakan kesejahteraan dalam jangka panjang nampaknya belum akan terwujud.

Namun kita bisa membangun sebuah hipotesis baru bahwa sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia justru akan meningkatkan tingkat kemiskinan dan memperendah tingkat kesejahteraan di masa mendatang. Hipotesis ini bersumber dari fakta bahwa proses demokrasi untuk melahirkan pemimpin daerah membutuhkan dana publik yang amat besar dan juga memerlukan dana pengusaha yang mesti secara alamiah akan dikembalikan dari dana publik.

Hipotesis ini didasarkan pada konsep opportunity cost, artinya jika pemerintah mengalokasikan dana Rp 14 triliun untuk pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, maka pemerintah kehilangan kesempatan untuk membangun infrastruktur jalan. Jika proses pemilu menghasilkan pemimpin, lalu kemudian pemimpin itu berperilaku mengembalikan investasinya dari dana publik, maka penghapusan dana publik akan terjadi. Soemitra Begawan ekonom

Indonesia sekitar tahun 1980-an mengungkapkan bahwa dana pembangunan dapat menguap lebih dari 30% dari nilai kontrak proyek, maka dengan adanya proses pemilu dan pilkada akan tedapat kemungkinan penguapan tersebut akan lebih banyak pada masa orde reformasi.

Namun jika pemerintah membangun infrastruktur 14 triliun rupiah sebanding dengan satu jembatan atau terowongan antara pulau Jawa dan Sumatera maka benefit ekonomi akan dirasakan oleh masyarakat dari Utara pulau Sumatera sampai ke Bali. Outputnya jarak tempuh antara Merak dan Bakauhuni, 2 jam di laut dan 1 jam antri, sehingga total waktu yang dibutuhkan menjadi 3 jam, maka bisa berkurang menjadi hanya 1 jam, dan 2 jam sisanya yang dihemat menjadi efisiensi waktu masyarakat dan ini bisa dikatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat 2 jam. Belum lagi efisiensi biaya angkut barang dan jasa serta efek ganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan Jawa serta Indonesia secara umum.

Kehidupan ini adalah pilihan, ketika kita bersama memilih salah satu maka *trade off* dengan yang lainnya, artinya ketika kita menjadikan demokrasi dan pemilihan langsung itu menjadi prosedur mendapatkan pemimpin nasional dan daerah maka pengalokasian dana untuk infrastruktur dan investasi modal manusia pasti akan berkurang. Sama halnya jika pada suatu ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, umpamanya kita memiliki uang 1.000.000 rupiah, kita ingin mendapatkan kepuasan konsumsi atau menambah aset. Jika kita ingin memuaskan keinginan konsumsi maka uang itu akan kita belikan makanan, minuman, traktir teman, dan sisanya kita beli handphone atau barang lain yang kita impikan, maka sesaat

itu kita puas, kita kenyang dan bisa berkomunikasi dengan kerabat. Namun kita kehilangan kesempatan untuk menambah kekayaan di masa mendatang, umpamanya membeli bibit bagi petani, menambah barang dagangan bagi pedagang, atau menambah keahlian dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam bentuk pendidikan dan latihan atau membeli buku baru.

Proses demokrasi yang telah dan sedang berjalan di Indonesia akan berhubungan negatif (*trade off*) dengan kesejahteraan, namun pilihan ini sudah menjadi pilihan bersama walaupun pilihan ini hanyalah pilihan segelintir orang elit di parlemen (MPR/DPR), tetapi mau tidak mau, suka tidak suka ini sudah menjadi pilihan bangsa. Mengembalikan demokrasi ke arah yang lebih efisien dengan pola perwakilan tentu saja masih amat sulit. Walaupun kesadaran itu pada sebagian orang yang sadar sudah mulai terlihat dan mengkristal menjadi wacana yang sporadis tetapi ini masih lemah dibandingkan dengan kekuatan untuk melanggengkan perkawinan antara penguasa dan pengusaha (demokrasi kapitalis).

Kesadaran tersebut mari kita terus sosialisasikan menjadi sebuah pemahaman bersama dan menjadi sebuah gerakan aksi sebagai upaya untuk mempertinggi derajat kesejahteraan rakyat. Secara bertahap kita bersama mulai memikirkan bagaimana upaya untuk mengefisienkan pelaksanaan demokrasi tersebut dengan berbagai jalan, salah satunya adalah penggunaan media online, internet dan teknologi informasi sebagai usaha mempercepat proses demokrasi, memperpendek proses kampanye pemilu, mengurangi dan mengidentifikasi jabatan politik dan jabatan profesional, struktural dan fungsional.

Kalau kita ingin mengembalikan keadaan ini, cara yang paling

praktis adalah pengurangan gaji, dan kekuasaan pada legislatif dan melahirkan komitmen baru pada usaha untuk meningkatkan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bangsa. Salah satu caranya adalah penetapan formulasi undang-undang yang tetap untuk anggaran legislatif daerah dan nasional. Misalnya dibuat formula alokasi dana untuk DPRD kabupaten dan Provinsi 5% dari total PAD (pendapatan asli daerah) atau anggaran untuk DPR-RI 0,5% dari total APBN dan pembangunan infrastruktur 40% dari total APBN, dan 20% untuk alokasi pendidikan sehingga untuk penyelenggaraan negara dan pembayaran utang negara tinggal 40%. Maka dengan cara ini diharapkan akan mendorong terciptanya kesejahteraan di masa mendatang.

B. Upaya untuk Memperbaiki Tingkat Kemakmuran Bangsa

Kepastian hukum, peran pemerintah dalam menjaga berjalannya sistem perekonomian yang adil, pembangunan infrastruktur khususnya luar Jawa, dan investasi pada peningkatan sumber daya manusia (*human capital*) serta redistribusi kekayaan, merupakan konsepsi dasar dalam peningkatan kesejahteraan bangsa.

Konsepsi ini didasarkan pada fenomena negeri ini yang terjebak dalam suasana ketidakteraturan sistem perilaku masyarakat, dimana hukum ibarat sarang laba-laba, ketika semut atau lalat melewati sarang laba-laba tersebut, mereka langsung terjatuh. Namun beda halnya dengan burung, ketika burung terjebak dalam jeratan sarang laba-laba, dengan kekuatannya akhirnya burung bisa melepaskan diri dari jeratan tersebut. Kejadian ini tidak hanya terjadi pada kasus besar namun pada kasus-kasus pelanggaran hukum yang kecil. Contohnya pelanggaran lalu lintas, ketika seorang pengendara

motor tidak berhelm dan kebetulan di tempat tersebut ada aparat lalu lintas, dengan gagah berani penegak hukum tersebut menindak dan menilang bahkan meminta penyelesaian di tempat. Namun apabila yang melanggar adalah seseorang yang berseragam maka aparat hukum bersikap seolah-olah tidak melihat kejadian itu, takut kalau nanti akan terjadi tawuran antar kesatuan. Dalam konteks lain, penegakan hukum kita belum memberikan kepastian hukum maupun kepastian sanksi.

Ketika kita berkunjung ke Luar Negeri, terlihat masyarakatnya teratur dan harmonis, lalu lintas berjalan dengan tertib dan relatif tidak ada terdengar bunyi klakson mobil dan para pengguna jalan berjalan dengan teratur. Bukan berarti orang asing itu lebih baik dari pada kita, ternyata kepastian hukum dan penegakan hukumnya amat tegas, ketika pengguna jalan lalu lintas melanggar aturan maka sanksi akan pasti diperoleh. Contoh, di suatu lokasi dituliskan "Tempat parkir ini khusus untuk penyandang cacat, finalty \$100," orang tidak berani memarkirkan mobilnya pada lokasi itu, bukan berarti mereka dengan senang hati membiarkan tempat itu kosong tapi takut uangnya berkurang \$100. Contoh lain, pelarangan membunuh burung, jika membunuh didenda dengan nilai tertentu, bukan berarti masyarakatnya senang membiarkan burung itu hidup, tapi mereka takut denda yang akan dibayar dan pasti harus dibayar.

Berbeda halnya dengan Indonesia, dimana perekonomiannya dijalani secara liberal dan terdapat kesempatan kepada pasar untuk menentukan sendiri hidup dan matinya namun dengan peran negara yang minimal untuk menjaga kehidupan ekonomi tersebut agar tetap dapat berjalan dengan harmonis dan saling menguntungkan.

Tempat-tempat strategis di perkotaan yang dikuasai

peruntukannya oleh pemerintah daerah, dengan mudahnya diberikan kepada pengusaha besar, pemilik modal dan kepada pengusaha property. Pemerintah daerah atas lobi dan reward tertentu memberikan hak guna bangunan (HGU/HGB) kepada pengusaha property dan dengan surat berharga tersebut pengusaha mendapatkan sejumlah kredit dari Bank pembangunan daerah. Lalu tanah itu dibangun mall dan pusat perbelanjaan, pengusaha membangun mall, dan toko-toko di mall, satu ruang itu dengan ukuran 5 meter x 10 meter. Diperkirakan biaya untuk pembuatannya sekitar Rp 75.000.000,- dengan asumsi 1 m² biayanya Rp 1.500.000,-. Namun pengusaha properti menjual kios itu seharga Rp 450–500 juta. Marginnya 6x dari harga pokok.

Siapa yang diuntungkan dalam proses tersebut dan siapa yang dirugikan? termasuk pertanyaannya dengan kehadiran mall tersebut bagaimana effectnya terhadap usaha kecil yang berada di sekitar pasar tersebut. Seandainya pemerintah memiliki kepedulian pada usaha untuk mensejahterakan penduduk, maka pola itu tidak dilaksanakan, tapi barangkali pola dan sistem yang lebih manusiawi serta pengusaha mendapatkan untung dengan harga kios yang bisa terjangkau oleh pedagang sekitar pasar.

Dalam proses bisnisnya mall dibuka jamnya sama dengan pengusaha kecil, padahal terkadang barang yang dijual di mall sama dengan barang yang dijual di toko kecil di sekitar mall. Usaha-usaha retail dan minimarket terkadang adalah grosir besar yang mengambil segmentasi pasar retail sehingga harganya lebih murah dibandingkan dengan harga yang dijual pedagang kecil.

Beda halnya dengan negara maju yang menganut ekonomi pasar, jam buka dan tutup pedagang besar di mall dibatasi, umpamnya

buka jam 10.00 pagi dan tutup jam 17.00 sore sedangkan pedagang kecil bisa buka 24 jam. Cara ini merupakan cara yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada usaha besar agar dapat maju dan memberikan kesempatan juga kepada usaha kecil untuk tetap hidup.

Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Sekarang ini pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, pendidikan, kesehatan dan pendidikan tinggi, terkonsentrasi di pulau Jawa, sehingga pulau-pulau lain infrastrukturnya masih jauh tertinggal. Pulau Jawa terhubung dengan sarana transportasi darat yang baik, kereta api, jalan toll, sarana dan prasarana jalan. Di pulau ini terdapat Perguruan Tinggi yang berkualitas dan memiliki layanan baik, infrastruktur pelabuhan dan bandar udara berskala internasional sehingga faktor ini menjadi penarik investasi industri yang pada akhirnya sebagian besar tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa, faktor ini juga menarik penduduk dari luar Jawa untuk merantau ke Jawa sehingga pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia dimana pulau Jawa yang luasnya hanya 6,8% dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 57,5 % penduduk.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka sangat diperlukan kesadaran untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan serta kesatuan bangsa yang berkesinambungan di masa yang akan datang. Apabila pola di atas masih terus berlangsung maka solidaritas kebangsaan kita akan berkurang nilainya dan mempercepat proses desintegrasi bangsa yang sesungguhnya. Dahulu ketika dijajah oleh Belanda ada kesadaran bersama bahwa bangsa asing ini harus diusir dari negeri ini, kesadaran tersebut lahir dalam proses penjajahan selama 350 tahun dan setelah ada momentum perang dunia kedua. Hingga saat ini konsesus tersebut masih terjaga

dengan baik, namun apabila fungsi sosial negara dan peran negara untuk dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan tidak terwujud, maka semangat kebangsaan tersebut akan terus berkurang dan pada suatu titik, semangat suatu daerah itu lebih kuat dibandingkan dengan nilai kebangsaan itu sendiri sehingga bayang-bayang desintegrasi pun dapat menjadi semakin nyata.

Selanjutnya, dalam pengalokasian dana APBN, khususnya dalam pembagian dana alokasi umum (DAU), dengan adanya formula luas wilayah, jumlah penduduk dan indeks kemiskinan sebagai penentu jumlah anggaran yang nantinya akan diperoleh oleh suatu daerah, maka penulis memandang formula ini sudah dapat mencerminkan adanya keadilan distributif. Namun amat berbeda perlakuannya terhadap sumber keuangan negara yang berasal dari luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri khususnya pinjaman proyek (*loan*). Proses ini juga didorong oleh pihak eksternal khususnya lembaga donor, karena ketika suatu proyek dihitung dan dinilai kelayakan finansialnya (*feasibility study*), maka tingkat pengembalian investasi (*rate of return*) atas kegiatan pembangunan di pulau Jawa akan lebih tinggi dibandingkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diluar pulau Jawa.

Contoh, mana yang lebih layak membangun jalan toll antara Jakarta-Bandung atau Padang-Pekanbaru. Atau antara Surabaya-Jakarta atau Lampung-Aceh, maka data finansial pasti akan menjawab akan lebih layak Jakarta-Bandung dari pada Padang-Pekanbaru atau akan lebih layak Surabaya-Jakarta dari pada Lampung-Aceh. Hal ini juga karena probabilitas kendaraan yang akan melewati dimana kendaraan di pulau Jawa jauh lebih besar dibandingkan dengan kendaraan luar Jawa.

Nah, kalau hari demi hari, tahun berganti tahun, periode berganti periode, pola kebijakan pembangunan masih mengandalkan *rate of return* serta kajian *cost* dan benefit masih menjadi acuan dasar, maka disparitas itu akan semakin melebar dan hingga pada suatu titik, muncul kejenuhan di beberapa daerah dan akan terjadi konflik daerah-pusat yang kemudian mengkristal menjadi desintegrasi bangsa. Sama dengan siklus kerajaan di nusantara sebelum kita dijajah oleh Bangsa Asing, munculnya kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan lain menguat, dan Sriwijaya runtuh, lalu Majapahit lahir dan berkembang serta menyatukan nusantara namun ada sebagian daerah yang menguat, dan terjadinya konflik di tingkat elit maka Majapahit juga bubar.

Bayangan disintegrasi juga sudah mulai terlihat, salah satunya adalah ketidakadilan pembangunan dan dominasi pembangunan yang terjadi pada suatu pulau dibandingkan dengan pulau lain. Termasuk juga terdapat gejala putra asli daerah di beberapa periode yang lalu dalam rekrutmen pejabat negara. apabila proses ini masih terus berlangsung maka bayang-bayang desintegrasi tersebut akan semakin nyata.

Pola pendistribusian pembangunan infrastruktur bukan lagi sekedar pertimbangan aspek finansial, tetapi lebih dari pada itu, yakni aspek solidaritas dalam sebuah bangsa dan aspek keseimbangan antara daerah. Ketika Propinsi Riau maju dan memiliki potensi serta kesempatan kerja yang tinggi, secara simultan akan menarik penduduk Jawa ke Riau. Ketika Kalimantan memiliki kesempatan kerja dan pengharapan hidup yang lebih layak maka, penduduk luar Kalimantan secara alamiah pula akan merantau ke Kalimantan dan mendorong pertumbuhan daerah itu dan secara bersama-sama serta

simultan akan mencapai titik keseimbangan antar daerah. Kenapa pulau Kalimantan bisa didatangi oleh penduduk luar karena kita masih dalam sebuah bangsa, tidak memerlukan biaya pengurusan paspor dan visa sehingga memudahkan mobilitas dan perpindahan penduduk antar daerah.

Keempat, investasi pada sumber daya manusia merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan untuk mempertinggi harkat dan martabat bangsa, mengurangi kelas bawah (buruh dan petani) dan menciptakan kelas menengah dan kaum profesional serta wirausaha. Negara maju sudah memiliki kesadaran investasi modal manusia lebih dulu ratusan tahun dibandingkan dengan negara berkembang, dan mengalokasikan dana negara lebih dari 20% untuk sektor pendidikan. Kesadaran itu nampaknya sudah mulai menjadi diskusi dan menjadi kebijakan nasional, hingga ke daerah khususnya pada pendidikan dasar. Tetapi kebijakan itu masih perlu disempurnakan karena pengambil kebijakan negara juga terkena kontaminasi yang dihembuskan oleh lembaga donor asing khususnya pada pemikiran bahwa pendidikan tinggi yang selama ini disubsidi oleh pemerintah cenderung mensubsidi pendidikan orang kaya, karena kebanyakan peserta belajar di perguruan tinggi berasal dari orang kaya, maka dengan kata lain, pemerintah mensubsidi pendidikan orang kaya.

Kontaminasi ini disebarkan oleh kapitalis asing dengan maksud untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa kuli, dan tetap berada pada posisi sekarang, miskin dan terbelakang. Maka seyogyanya pemerintah tidak serta-merta menjadikan beasiswa untuk anak keluarga miskin sebagai alat untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin, tetapi untuk peningkatan jumlah anggaran bagi pendidikan tinggi yang akan secara signifikan mengurangi kontribusi rumah tangga dalam membeli layanan

pendidikan tinggi.

Data statistik menunjukkan jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Menurut Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM seperti dilansir sebuah media massa, bila dua tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, maka pada 2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga kerja. Maka dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang terserap bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 6,8% menjadi 5% dengan pertumbuhan UKM tersebut. Hal ini mencerminkan peran serta UKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor ril.

Struktur kepemilikan aset produktif, sedikit orang yakni sebesar 0,01% (21 ribu) memiliki 57% aset produktif namun banyak orang yakni sebesar 99,9% hanya memiliki 43% aset produktif nasional (Soetrisno :2002). Dari pembentukan nilai tambah, ternyata usaha besar menguasai 42 persen, sementara usaha kecil hanya 41 persen dan usaha menengah menguasai 17 persen (Soetrisno: 2002). Lebih lanjut sesungguhnya terdapat dua kesimpulan bahwa: Pertama, sektor-sektor ekonomi yang didominasi oleh usaha kecil mikro pada dasarnya adalah sektor tradisional yang sejak lama dikenal sebagai kehidupan kegiatan ekonomi rakyat, dan kedua, dalam proses transformasi struktur ekonomi Indonesia terjadi lompatan dari sektor pertanian ke sektor jasa tanpa melewati sektor

industri sehingga tidak sempurna dan terjadi karena keterpaksaan yang melahirkan sektor informal di sektor jasa dengan nilai tambah rendah (Simatupang, 1992. Dalam Soetrisno: 2002).

Kondisi kesejahteraan negara di dunia ini, UNDP mengkategorikan menjadi 3 kategori yakni, negara yang memiliki kesejahteraan tinggi, menengah dan rendah. UNDP 1997, menyusun formula untuk menghitung indeks pembangunan manusia dengan suatu ukuran 0-1. Untuk menghitung indeks UNDP 2001 mengembangkan indikator HDI perbandingan antar negara.

Indeks HDI	> 0,8	= negara kategori HDI tinggi
Indeks HDI	0,5–0,8	= negara kategori HDI menengah
Indeks	< 0,5	= negara kategori HDI rendah

Negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Australia, merupakan negara-negara yang memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Kenyataan ini bisa dilihat dari indikator human development index (HDI) tersebut.

Tabel 6.1: Indeks HDI dan Pendapatan Perkapita Negara Maju, tahun 2012

Rangking HDI	Negara	HDI
1	Norwegia	0,943
2	Australia	0,929
3	Belanda	0,910
4	Amerika Serikat	0,910
5	Selandia Baru	0,908
6	Kanada	0,908
7	Irlandia	0,908
8	Liechtenstein	0,905
9	Jerman	0,905
10	Swedia	0,904

Sumber : UNDP 2012

Bagaimana Mencapai Kemakmuran Tinggi?

Kita terlalu membuka akses masuk bagi pengusaha besar ke-Indonesia khususnya pada investasi eksploitasi sumber daya alam (SDA), padahal eksploitasi SDA akan memberikan dampak ekonomi dalam jangka pendek namun SDA tidak bisa memberikan kontribusi dalam jangka panjang (*Sustainable*). Hal ini bisa kita lihat dari struktur kepemilikan lahan, dimana penggunaan lahan dalam skala besar dalam bentuk perkebunan sebenarnya harus juga disadari memiliki dampak baik dalam perekonomian, yakni peningkatan output dan kesempatan kerja. Produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan perkebunan yang dikelola oleh rumah tangga. Sehingga efeknya kepemilikan lahan lebih dominan dimiliki oleh perusahaan (*cooperate*) dan petani dibiarkan berusaha dan bertani di lahan sempit.

DISKUSI PEMBANGUNAN

Satu-satunya cara untuk membangun kemakmuran dalam suatu ekonomi, adalah meningkatkan produktivitas. Negara-negara yang tidak memiliki inovasi ekonomi akan menjadi bangsa konsumen. Kalaupun mampu memproduksi, maka mereka tak lebih sebagai bangsa peniru. Ini adalah kunci yang diterapkan di negara-negara maju. Mereka tidak sekedar meniru, tidak hanya memangkas biaya-biaya dan tidak hanya merestrukturisasi perekonomiannya, mereka juga terus mengembangkan kapasitas inovatif secara besar-besaran.

Untuk dapat mencapai daya saing bangsa, haruslah diperkuat keunikan-keunikan yang ada pada bangsa tersebut. Porter menyebut tiga tahap dalam penciptaan daya saing bangsa. Pertama, pemanfaatan keunikan sumber daya. Jumlah penduduk dan kayanya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang sangat luar biasa. Kedua, penciptaan makro ekonomi yang menunjang daya saing bangsa melalui pembangunan SDM, infrastruktur, birokrasi bisnis yang cepat dan tidak korup yang berimbas pada pengurangan high cost economic. Ketiga, kebijakan mikro ekonomi yang mendorong agar sektor privat dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Pemerintah mempunyai peran penting dalam membangun ekonomi yang produktif, tetapi swasta juga turut memiliki peran yang fundamental.

Beberapa Permasalahan Pembangunan

Kesejahteraan, kemajuan, kemakmuran dan seterusnya merupakan cita-cita bersama bangsa Indonesia, cita-cita itu berangsur-angsur mulai menampilkan hasil walaupun belum sebanding dengan negara-negara maju. Jika kita bandingkan capaian kita hari ini dengan masa lalu, tentu saja kita sudah berubah, namun perubahan itu disadari belum sama dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita selalu bertanya dalam hati kenapa kita belum sejahtera seperti halnya kesejahteraan yang dicapai oleh negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Singapura atau Jepang yang kebudayaan dan latar belakang geografisnya hampir sama dengan kita. Banyak kemungkinan jawaban bisa kita uraikan, namun tentu saja uraian tersebut tidaklah begitu penting karena jawabannya sudah banyak yang kita ketahui.

Berikut ini merupakan beberapa kasus dan perenungan yang penulis lakukan atas beberapa pertanyaan penting dalam proses pembangunan, dan pada akhir kasus penulis sajikan pertanyaan

dan ini dimaksudkan untuk membangkitkan spirit pembaca untuk menulis atau meneruskan dalam bentuk riset-riset lanjutan.

Kegagalan Koperasi di Indonesia (kasus kerjasama)

Ketika Almarhum Dr. M. Hatta (sang proklamator) kita sekolah di Eropa dan menyempatkan berkeliling Eropa, beliau berkunjung ke negara-negara Balkan, seperti Denmark, Finlandia dan lain-lain. Beliau terkesan dengan perkembangan koperasi di negara-negara tersebut, di mana munculnya sinergi antara produsen dengan konsumen. Produsen produk-produk pertanian berkelompok, menyatukan produknya dan menjual ke kota. Di kota para produsen juga berkumpul dan menyatukan kebutuhan mereka dalam bentuk koperasi konsumen. Koperasi produsen pertanian di pedesaan menjual hasil pertanian ke koperasi konsumen di perkotaan sehingga biaya transaksi bisa ditekan, kelebihan harga menjadi surplus petani sebagai produsen dan surplus pembeli sebagai konsumen, di sinilah terdapat kesejahteraan.

Pendiri bangsa kita tertarik dengan sistem tersebut, beliau terus melakukan perenungan dan akhirnya beliau berhasil memasukkan sistem itu ke dalam konstitusi negara. "Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azaz kekeluargaan" dan diperjelas dengan penjelasan "Bangun atau badan hukum yang cocok dengan azaz kekeluargaan itu adalah koperasi" namun oleh para ekonom yang pro-pasar sistem kekeluargaan ini tidak cocok, mereka meyakini bahwa pasarlah sebagai alat untuk menciptakan keadilan maka bunyi pasal tersebut dicoba, diganti menjadi "Perekonomian disusun dengan azaz keadilan". Pergantian redaksional UUD 1945 hasil amandemen, berangkat dari fakta empiris gagalnya koperasi

sebagai sistem perekonomian dan menguatnya sistem kapitalisme di Indonesia.

Para ekonom yang pro-pasar amat terobsesi oleh sistem perekonomian pasar yang dianut oleh USA, Jepang, Eropa dan lain-lain sebagai upaya untuk mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, padahal mereka lupa bahwa ada prasyarat mekanisme pasar itu yang tidak terpenuhi yakni: ketidaksamaan informasi yang diperoleh oleh pelaku ekonomi, setiap orang memiliki perbedaan kemampuan ekonomi dan terjadinya eksternalitas dan ketidakmampuan pemerintah sebagai penyeimbang berjalannya mekanisme pasar.

Di negara maju seperti USA, Australia, Jepang, dan negara-negara lain pemerintah memiliki otoritas yang besar dalam mengatur perekonomian sehingga rakyatnya menjadi sejahtera, layanan publik seperti transportasi, pendidikan, air bersih disediakan oleh negara dan gratis sebagai solusi atas kegagalan dan ketidakmampuan pasar menciptakan harga yang murah pada sektor ini. Kepemilikan lahan juga dibatasi oleh negara dan dibagi secara adil untuk rakyat, petani di Australia rata-rata memiliki lahan 50 hektar per keluarga, sementara di Indonesia hanya 0,3 hektar per keluarga. Indonesia tidak bisa membagi tanah secara adil untuk rakyat karena tanah telah dikuasai oleh investor asing atau BUMN (PTPN) dan rakyat terlantar dalam kemiskinan.

Namun juga patut kita kritisi, garis idealnya koperasi yang diimpikan oleh M. Hatta tidak terpenuhi dengan baik dan tidak terjadi sinergi antara produsen dengan konsumen. Pelaku usaha lebih ingin melakukan persaingan usaha pada pasar persaingan sempurna, dan biarlah pasar yang menentukan harga. Petani tidak mau bersatu

untuk bersama-sama menjual hasil pertaniannya sehingga mencapai skala ekonomi dan untungnya lebih besar, petani lebih ingin menjadi kaki tangan touke sehingga membentuk perekonomian yang dinamakan dengan patron-client (Elfindri, 2004). Konsumen juga tidak mau kompak membeli sesuatu sehingga mendapatkan potongan harga, jika membeli dalam jumlah besar, konsumen lebih cenderung menentukan sendiri nasibnya sehingga harga yang mereka beli nilainya kadangkala dua kali lipat dari harga pokok produsen.

Secara kelembagaan, koperasi telah berhasil dibentuk oleh pemerintah sampai ditingkat desa dengan koperasi unit desa (KUD), kredit dikururkan, kelembagaan didampingi, diberikan bantuan dan diberikan fasilitas pemasaran namun setelah program selesai, para pengurus koperasi dan anggota koperasi gagal membentuk budaya saling pengertian, saling mempercayai, dan saling kerjasama akibatnya KUD menjadi bubar dan banyak hanya tinggal kenangan.

Banyak kasus praktek tak sehat terjadi di KUD, misalnya kita mendengar pengurus koperasi melarikan KUT (kredit usaha tani) semasa pemerintahan 1998–1999, pada saat itu pemerintah mengucurkan lebih dari Rp 1,4 triliyun kredit program peningkatan produksi pertanian. Juga banyak kejadian anggota koperasi tidak mau menyimpankan uangnya di koperasi tapi hanya meminjam dan ketika pinjaman telah diperoleh anggota tidak mau lagi melunasi angsuran utangnya sehingga koperasi pailit dan tidak memiliki cashflow untuk menjalankan usahanya dan akhirnya koperasi bangkrut.

Pertanyaan :

1. Perlukah kejujuran dan kerjasama itu dalam perekonomian?
2. Seberapa besar pengaruh kejujuran dan kerjasama tersebut terhadap keberlanjutan ekonomi?

Loyalitas dan Partisipasi Anggota Koperasi terhadap Performance Usaha

Para penggerak dan idiolog koperasi selalu membanggakan bahwa koperasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan badan usaha non koperasi. Koperasi merupakan kelembagaan usaha yang dimiliki secara bersama di mana anggota koperasi sebagai pengguna jasa koperasi sekaligus memiliki posisi sebagai pemilik perusahaan (koperasi). Jika anggota membeli atau menjual barang dan jasa kepada koperasi maka anggota mendapatkan dua keuntungan, yaitu surplus nilai pembelian dan surplus nilai penjualan, dimana koperasi akan menjual lebih murah dibandingkan dengan usaha lainnya dan keuntungan dari kegiatan bisnis nantinya akan dibagi berdasarkan jasa anggota kepada koperasi dan berdasarkan kepada jumlah transaksi usaha yang dilakukan. Secara kelembagaan anggota koperasi memiliki hak dan kedudukan yang sama secara hukum di mana, dalam rapat anggota masing-masing orang memiliki satu suara (*one man one vote*).

Namun ternyata kelebihan dan keuntungan tersebut tidak bisa diperoleh sebagian atau seluruhnya oleh anggota koperasi, persoalannya bukan terletak pada konsep koperasi namun terletak pada asumsi yang digunakan dalam operasional koperasi. Nilai positif di atas akan diperoleh pada saat semua komponen koperasi baik anggota maupun pengurus telah memahami prinsip dasar bagaimana berkoperasi, kapan koperasi bisa membeli dengan harga tinggi dan kapan bisa menjual lebih murah dibandingkan dengan pasar, kapan koperasi mampu membagi sisa hasil usaha, kapan koperasi bisa demokratis, dan di mana anggota memiliki kedudukan yang sama dalam koperasi.

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab pada saat orang-orang sudah mulai meninggalkan koperasi. Pertanyaan di atas hanya terjadi pada sebagian koperasi yang tidak mampu memenuhi prasyarat-prasyarat di atas, dan akhirnya bubar.

Surplus Produsen dan Surplus Konsumen.

Surplus produsen terjadi pada saat koperasi mampu membeli harga produksi dari anggota koperasi lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Kejadian ini akan terjadi jika beberapa kondisi berikut ini juga terjadi, yaitu:

1. Koperasi berada pada struktur pasar persaingan sempurna dan koperasi berada pada market leader.
2. Koperasi memiliki ikatan dan kontrak kerjasama serta kemitraan dengan badan usaha lainnya khususnya adanya kelembagaan koperasi konsumen.
3. Anggota memiliki kekompakan dan loyalitas yang tinggi terhadap koperasi, anggota tidak cepat berubah karena perbedaan sedikit harga yang diminta oleh badan usaha lain, sehingga kekompakan itu menghasilkan skala ekonomi tertentu dan koperasi bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi.
4. Koperasi mampu menciptakan bisnis dari hulu hingga hilir, seperti bisnis kebun kelapa sawit, pada luas tertentu sesuai dengan kapasitas satu pabrik misalnya 3000 hektar, kira-kira 1.500 anggota koperasi jika masing-masing anggota memiliki 2 hektarnya. Koperasi mampu membuat pabrik pengolahan TBS (tandan buah segar) menjadi CPO (*Carm Palm Oil*), dan kemudian koperasi juga mampu membuat pabrik pengolahan minyak goreng atau minyak biodiesel. Atau berbagai turunan

produk yang dihasilkan dari produk utama dan produk sampingan TBS. Kemudian koperasi mampu menjalin kontrak pemasaran ke luar negeri atau dalam negeri sehingga setiap penambahan nilai tambah industri yang dihasilkan di setiap unit bisnis koperasi, petani sebagai produsen TBS bisa menikmati surplus tersebut.

Begitu juga halnya dengan surplus konsumen, jika anggota koperasi yang jumlahnya 1.500 orang tersebut berkumpul lagi dalam koperasi konsumen, maka anggota koperasi akan mendapatkan lagi surplus konsumen. Surplus konsumen akan terjadi jika koperasi menjualkan produk yang dibutuhkan oleh anggota lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Karena permintaan atas produk dan jasa tinggi sekali maka koperasi bisa membeli barang dengan harga yang lebih murah, karena produsen industri akan memberikan potongan harga dalam bentuk rabat.

Pola ini akan tercipta jika koperasi memiliki prinsip menjualkan produk anggota koperasi dan membelikan kebutuhan anggota koperasi. Dengan prinsip ini, koperasi hanya mendapatkan komitmen fee saja yang ditetapkan dalam rapat anggota koperasi, bukan sebagai pembeli produk anggota atau penjual atas barang yang dibutuhkan anggota koperasi.

Fakta Berkoperasi di Indonesia

Pada umumnya koperasi di Indonesia pembentukannya difasilitasi oleh fasilitator dalam hal ini pemerintah. Pemerintahan Indonesia memiliki satu badan negara yang pada awalnya setingkat Direktorat, kemudian naik menjadi Kementerian, pernah menjadi

Departemen namun kemudian sekarang statusnya pada level kementerian, yaitu Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh Syarief Hasan sejak tanggal 21 Oktober 2009 hingga saat ini. Departemen inilah yang secara aktif mendorong, memotivasi dan memfasilitasi berdirinya koperasi-koperasi di Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong berdirinya kelembagaan usaha koperasi, mulai dari adanya payung hukum, UU no 12/1967, UU nomor 25/1992 dan nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

Kemudian pemerintah memotivasi pembentukan kelembagaan koperasi dengan beberapa insentif, di antaranya insentif permodalan, fasilitasi kemitraan dengan usaha besar (pola plasma-inti) pada sektor perkebunan, membentuk koperasi fungsional di setiap jenjang pemerintahan dan unit-unit kerja departemen, mendirikan koperasi pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Pembentukan kelembagaan koperasi di Indonesia bisa dikatakan telah berhasil sehingga gerakan koperasi (Dekopin) menyatakan anggota koperasi hingga Tahun 2012 telah mencapai 33 juta orang, dengan jumlah koperasi sebanyak 192.450.

Namun sebagian koperasi tidak berjalan lagi, karena beberapa kendala, termasuk juga persoalan manajemen. Secara umum persoalan koperasi terletak pada beberapa hal sebagaimana yang dinyatakan pengamat ekonomi Unud MurjanaYasa di mana banyak yang menjadi pokok permasalahan dalam perkembangan koperasi.

Pertama, masih sulitnya menginventarisasi dan mengidentifikasi koperasi yang beku dan tidak memiliki aktivitas usaha, tetapi masih memiliki aset-aset yang produktif. Penataan kelembagaan saat ini juga masih ditangani oleh berbagai dinas

instansi yang ada, sehingga pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi sulit dilaksanakan.

Kedua, krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan sangat berpengaruh besar terhadap produktivitas dan efisiensi koperasi, sehingga sebagian besar koperasi tidak mampu bertahan. Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas, juga berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi yang rata-rata perlu perhatian.

Ketiga, dalam segi pembiayaan dan permodalan, koperasi masih sulit mengakses lembaga keuangan (perbankan) mengingat syarat yang ditetapkan cukup berat terutama masalah jaminan atau pun agunan dan syarat lainnya.

Keempat, redistribusi aset produktif yang dikelola oleh koperasi masih sangat terbatas sehingga tidak mempunyai posisi tawar yang cukup, utamanya terhadap produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian dalam arti luas utamanya bidang agribisnis.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa koperasi di samping diliputi oleh kelemahan-kelemahan internal, juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan eksternal sehingga dapat menyebabkan runtuhnya koperasi-koperasi di Indonesia. Persoalan tersebut sepertinya akan tetap ada dalam kegiatan koperasi. Sehingga dalam hal ini pemerintah utamanya diharapkan tetap berperan aktif dan dalam membangun dan memberdayakan koperasi.

Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan

Kasus pembayar pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar dalam pembiayaan pemerintahan dan pelayanan

publik di Indonesia. Dari sumber di Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp.976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Mei lalu pemerintah mengajukan revisi target penerimaan pajak 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dari Rp.1.042 triliun menjadi Rp.987 triliun. Penurunan tersebut menurut pemerintah karena adanya revisi pertumbuhan ekonomi dari 6,8 persen menjadi 6,2 persen.

Selain pajak, juga terdapat sumber penerimaan negara yang yang tidak bersumber dari pajak, di mana Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBPN meliputi:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- d. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah.
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah.
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Kecuali jenis PNBPN yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBPN yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai di atas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya di luar jenis

PNBPN terurai di atas, dimungkinkan adanya PNBPN lain melalui UU.

Di negara-negara maju administrasi pajak juga sudah amat baik, pada umumnya setiap orang yang bekerja memiliki nomor pokok wajib pajak, tapi di Indonesia Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan bahwa Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya atau melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak atau melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen.

Rendahnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak ini sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah dimana sejak akhir tahun 2008 pemerintah menerapkan aturan setiap warga negara di atas 21 tahun wajib memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak). Rendahnya kesadaran pembayar pajak di Indonesia sesungguhnya amat manusiawi, karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena adanya persepsi yang tumbuh di tengah masyarakat yang beranggapan bahwa hasil pajak sebagian besar hanya dinikmati oleh sekelompok elit saja seperti kasus yang baru-baru ini terjadi, dimana adanya penyelundupan pajak yang dilakukan oleh salah seorang petugas pajak yaitu Gayus Tambunan, sedangkan hasil pemungutan pajak yang juga dialokasikan kepada pembangunan

fasilitas publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada akhirnya masyarakat itu sendiri juga harus tetap membayar atas penggunaan fasilitas publik tersebut, seperti Air bersih yang dikelola oleh PDAM (Perusahaan daerah air minum), ketika rakyat sakit dan pergi ke Rumah sakit daerah (RSUD) juga membayar karcis, ketika mereka melalui jalan-jalan yang dibangun pemerintahan daerah, rakyat juga harus membayar, dan ketika anak-anak mereka bersekolah di sekolah rakyat juga membayar SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan).

Inilah lingkaran, dampak domino dari rendahnya partisipasi publik terhadap pembangunan. Pemerintah menerapkan tarif-tarif pada setiap layanan yang disediakan, karena pemerintah menggunakan pinjaman luar negeri untuk membangun gedung sekolah, rumah sakit, jalan, jaringan air bersih dan irigasi, sementara itu utang harus dibayar setiap tahunnya. Pada Tahun 2012, Dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa total utang pemerintah Indonesia hingga September 2012 mencapai Rp.1.975,62 triliun. Dibanding akhir 2011, jumlah utang ini naik Rp.166,67 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp.638,9 triliun merupakan utang luar negeri yang didapat dari beberapa negara dan juga lembaga-lembaga multilateral. Utang luar negeri ini naik dibandingkan akhir 2011 yang sebesar Rp.621,29 triliun.

Jika, warga negara memiliki kesadaran bahwa pembangunan dari kita untuk kita, setiap hari kita bekerja lalu sebagian penghasilan kita tersebut kita sisihkan untuk membayar pajak penghasilan lalu pajak tersebut menjadi sumber utama penerimaan negara maka, semua infrastruktur dapat kita bangun dengan tangan kita sendiri. Dan tidak salah kiranya satu ajaran Bung Karno yang menyatakan

bahwa kita harus "Berdikari" berdiri di atas kaki sendiri, jangan selalu mengemis ke negara maju untuk mendapatkan utang (*loan*) atau hibah tapi kita bekerja dan berfikir keras sehingga bangsa ini kita miliki secara utuh, kalau pemerintah berhutang biarlah pemerintah berhutang pada rakyatnya, tidak ke rakyat negara lain.

Kasus Negeri Terpencil di Sumatera Barat

Sebuah Nagari terpencil, yakni Nagari Muaro Sei Lolo, Kecamatan Mapattungul Selatan Kabupaten Pasaman. Nagari ini memiliki penduduk lebih dari 3 ribu orang. Nagari ini terdiri dari 5 Jorong (dusun) yakni Jorong Muaro, Jorong Sungai Lolo, Jorong Pertemuan, Jorong Pangian, Jorong Rotan Getah dan Jorong Sopan.

Sampai akhir tahun 2008, daerah ini masih belum dilalui kendaraan roda empat dan amat minim layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2000, beruntung ada program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) sehingga sebagian wilayah Nagari mendapatkan pembangunan Nagari melalui program tersebut. Namun karena pemerintah daerah tidak mau mengalokasikan dana APBD untuk pemeliharaan dan peningkatan mutu jalan akhirnya jalan kembali tidak bisa dimanfaatkan. Sebelum tahun 1990-an SD hanya ada di empat tempat yakni di Jorong Muaro, Jorong Sungai Lolo, Jorong Pangian dan Jorong Rotan Getah sehingga pada tahun 2008, penduduk yang berumur di atas 15 tahun diperkirakan yang tamat Sekolah Dasar hanya sekitar 15% dari total penduduk. Persoalan utama dari rendahnya tingkat pendidikan formal yang ditamatkan di Nagari ini adalah jauhnya akses pendidikan dari pemukiman penduduk, termasuk juga kesehatan, pada umumnya penduduk tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Sebelum tahun

2006 Puskesmas pembantu hanya ada di Muaro dan perkampungan lain hanya dilayani oleh para dukun kampung sehingga tingkat kematian bayi dan Ibu melahirkan amat tinggi, rata-rata dari sepuluh bayi yang lahir hampir separohnya meninggal dunia karena tidak ada persiapan kelahiran, khususnya soal gizi dan nutrisi yang cukup bagi bayi sehingga ketika lahir, bayi tidak memiliki daya tahan dan proses persalinan juga tidak dibantu oleh bidan atau tenaga medis yang memiliki pengetahuan.

Jauhnya jarak ke Nagari ini menjadi alasan tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan tidak secara intensif berada di Nagari, karena Nagari tersebut bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari Ibu kecamatan (Rao), dengan jarak lebih dari 80 Km atau 2 hari perjalanan kaki. Rata-rata sebelum tahun 2000 guru hanya melaksanakan proses belajar dan pembelajaran 30% dari waktu normal setiap tahunnya sehingga motivasi anak didik datang ke sekolah juga rendah.

Motivasi guru untuk mengajar juga rendah karena faktor jarak yang harus ditempuh menuju lokasi cukup jauh dan adanya kondisi kehidupan yang serba kekurangan dibandingkan dengan kehidupan di Rao serta jumlah muridnya yang tidak banyak. Anak usia sekolah banyak berada di kampung namun jarak antara kampung dengan sekolah yang jauh membuat murid jarang datang ke sekolah. Satu sekolah melayani 2-3 kampung, jarak antara sekolah dengan tempat tinggal penduduk di kampung lain 1 jam perjalanan kaki atau 4-5 km.

Sebelum tahun 2004 penduduk menggunakan kuda beban sebagai alat transportasi untuk membawa hasil kebun dan pertanian ke Pasar. Saat itu tujuan pasar penduduk Nagari adalah Pasar Tapus Kecamatan Panti (sekarang Kec. Padang Gelugur) pada hari

minggu atau Pasar Rao pada hari Sabtu. Jarak antara Kampung terjauh dengan Rao sekitar 100 Km, namun beberapa kampung bisa ditempuh dalam beberapa jam perjalanan dan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1 : Daftar Kampung Nagari Muaro Sei Lolo dan Jarak Tempuh ke Pasar

Kampung	Lama perjalanan ke Pasar Tapus	Lama perjalanan ke Pasar Rao
Sopan	3 Jam jalan kaki, naik minibus 30 menit	3 jam jalan kaki naik minibus 1 jam
Rumah Batu	5 jam jalan kaki, naik minibus 30 menit	3 jam jalan kaki naik minibus 1 jam
Batang Kombung	6 jam jalan kaki, naik minibus 30 menit	6 jam jalan kaki, naik minibus 1 jam
Renah Betung	8 jam jalan kaki, naik minibus 30 menit	5 jam jalan kaki, naik minibus 1 jam
Tombang	9 jam jalan kaki, naik minibus 30 menit	9 jam jalan kaki, naik minibus 1 jam
Rotan Getah	10 jam jalan kaki, naik minibus 30 menit	10 jam jalan kaki, naik minibus 1 jam
Timbulan	10 jam jalan kaki, naik minibus 30 menit	10 jam jalan kaki, naik minibus 1 jam
Pangian	12 jam jalan kaki, naik minibus 30 menit	12 jam jalan kaki, naik minibus 1 jam
Sungai Lolo	13 jam jalan kaki, naik minibus 30 menit	13 jam jalan kaki, naik minibus 1 jam
Pintuai	13 jam jalan kaki, naik minibus 30 menit	13 jam jalan kaki, naik minibus 1 jam

Sungai Tuur	12,5 jam jalan kaki, naik mini bus 30 menit	12,5 jam jalan kaki, naik minibus 1Jam
Muaro	13,5 jam jalan kaki, naik mini bus 30 menit	13,5 jam jalan kaki, naik mini bus 1 Jam
Pertemuan	17 jam jalan kaki, naik mini bus 30 menit	17 jam jalan kaki, naik mini bus 1 Jam

Sumber: Data primer, 2008.

Rata-rata setiap keluarga biasanya pergi ke Pasar sekali dalam 1 bulan, dan kalau untuk kebutuhan harian biasanya mereka dapat membeli ke pedagang kampung yang memiliki kuda beban, namun harganya 2 sampai 4 kali lipat dari harga di Pasar. Salah satu persoalan ekonomi masyarakat pada waktu itu adalah pendapatan keluarga yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pada umumnya penduduk bermata pencarian sebagai petani karet, dan sebagian mengusahakan tanaman padi dengan pola ladang berpindah-pindah. Dalam setahun petani hanya bisa berladang padi untuk sekali masa panen, dan rata-rata setiap keluarga mendapatkan padi rata-rata 40 kaleng, produksi padi amat ditentukan oleh musim dan hama. Pada musim hujan biasanya panen padi menurun, termasuk juga hama, hama yang paling sering menyerang padi petani adalah hama wereng dan babi. Namun lama kelamaan pola ladang berpindah-pindah sudah mulai berkurang karena sebagian besar lahan yang dekat dari perkampungan sudah ditanami dengan karet dan anggota keluarga juga sudah bertambah. Satu keluarga membutuhkan 5-7 lokasi lahan karena setiap tahunnya lokasi tersebut dipergilirkan. Petani beranggapan lahan yang sudah ditanami padi, pada tahun berikutnya tidak subur lagi, atau kalau dipakai, pemeliharannya amat intensif karena gulma sudah sangat banyak tumbuh.

Jika mereka gunakan pola ladang berpindah, kesuburan tanah bisa diperbarui secara alami dan pemeliharaan serta penyiangan tidak sulit, setiap kali panen cukup disiangi 1-2 kali namun jika menggunakan pola intensif dengan menggunakan bekas ladang Padi pada tahun sebelumnya penyiangan bisa 3-4 kali. Dengan berladang, maka sebagian kebutuhan sayur keluarga bisa dipenuhi selama proses berladang, dimana ladang tersebut ditanami dengan cabe rawit, kacang-kacangan, sayur-sayuran, labu, jagung, gandum, nyolai (sejenis biji-bijian), sehingga untuk kebutuhan campuran nasi rumah tangga amat terbantu dan terkadang suatu rumah tangga mengalami surplus dan biasanya dibarter dengan keluarga lain, amat jarang dijual karena menjual hasil ladang tidak terbiasa bagi masyarakat kampung.

Pola bersawah jarang dilakukan oleh penduduk, karena lahan kampung terdiri dari perbukitan dengan kemiringan rata-rata 45 derajat, namun di Sungai Lolo, Muaro dan Pintuai sebagian penduduk telah mengusahakan sawah namun tidak seluruh rumah tangga memiliki lahan persawahan. Rata-rata hasil panen padi petani, hanya mampu mencukupi kebutuhan beras keluarga untuk 3-4 bulan dan 8 bulan kemudian kebutuhan beras dibeli ke Pasar kuamang, Tapus dan Rao. Jadi, kebutuhan beras kampung sangat tergantung dengan daerah luar. Biasanya harga per-Kg beras di kampung 2 kali lipat dari harga di Pasar sehingga pendapatan keluarga yang bersumber dari karet tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, rata-rata 1 kg beras di hargai dengan 2 kg karet dan setiap keluarga rata-rata menghasilkan 10 kg karet sehari, namun tidak setiap hari bisa menyadap karet. Jadi satu hari kerja penyadap karet mampu menghasilkan 5 kg beras dan kebutuhan akan beras rata-rata perkeluarga berkisar antara 4 kg perhari. Rata-rata petani karet hanya bisa menyadap karet 40%

setahun, karena curah hujan di daerah ini juga amat tinggi, jika hujan maka petani tidak bisa menyadap karet, karena pohon karet diyakini akan cepat mati dan getah karet tidak bisa dikumpulkan. Jadi petani karet hanya menghasilkan 2 kg karet perhari sementara itu kebutuhan beras perhari setelah dikurangi dengan produksi sendiri 2,67 Kg. Sehingga petani mengalami defisit pendapatan untuk membeli beras 0,67 Kg perhari atau 241 Kg pertahun.

Untuk memenuhi kekurangan pangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya petani berhutang ke induk semang, jadi setiap rumah tangga memiliki induk semang (*touke*), ketika musim hujan dimana petani karet tidak bisa menyadap karet maka seluruh kebutuhan rumah tangga dipinjam dari *touke* dan ketika musim kemarau datang, petani karet setiap hari menyadap karet dan berangsur-angsur melunasi hutang-hutangnya, inilah yang dikenal dengan perekonomian patron-client petani karet.

Rumah tangga memiliki anggaran yang terbatas, dan total pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sebagian kebutuhan rumah tangga harus dipinjam kepada pedagang. Rendahnya harga jual karet, dan tingginya harga kebutuhan pokok harian rumah tangga menjadi persoalan di setiap kampung, dimana tingginya harga kebutuhan pokok disebabkan karena biaya angkut dari pasar ke kampung amat terbatas yakni dengan kuda beban. Sehingga masyarakat memiliki kebutuhan yang mendesak akan kemudahan mobilitas dan akses jalan sebagai urat nadi perekonomian.

Jalan menuju desa hanya bisa ditempuh dengan perjalanan kaki, dan kuda beban. Pada tahun 1997, penulis berkesempatan melewati jalan lain menuju Nagari, yakni jalan bekas pembangunan

semasa pemerintahan Belanda, jalan itu 2x lebih jauh dari jalan yang biasanya ditempuh oleh penduduk ke Pasar. Rute jalan Belanda itu melewati Nagari Silayang menuju Nagari Langsad Kadap menuju Pasar Rao. Jalan itu lebarnya 4 meter dengan kondisi jalan yang rata namun masih dalam bentuk jalan tanah. Menurut informasi yang penulis peroleh dari penduduk, jalan tersebut dibangun lebih kurang tahun 1920-an, di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda, namun pekerjaanya bersumber dari para penduduk Nagari. Dahulu semasa Belanda, jalan tersebut terawat dengan baik, dimana pada sisi kiri dan kanan jalan, kayunya tidak boleh ditebangi sepanjang pohon kayu yang paling tinggi, sekitar 100 M. Jadi 100 meter ke atas dan 100 meter ke bawah jalan (karena lokasi jalan miring) tidak boleh dibuat ladang atau kebun. Aturan tersebut begitu dijaga dengan ketat oleh Belanda dan dampaknya jalan menjadi sangat asri serta dahulunya jalan tersebut dapat digunakan oleh Belanda dengan kuda atau kuda bendi.

Namun setelah Indonesia Merdeka, jalan itu tidak terawat lagi, dan penduduk sudah melanggar aturan penebangan kayu di sekitar jalan sehingga jalan ditumbuhi oleh rumput-rumput yang tinggi dan jalan hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki saja. Ketika penulis melewati jalan tersebut, penulis lama merenung, kenapa jalan sebegus ini tidak bisa dipelihara oleh penduduk dan menjadi solusi atas persoalan pengangkutan. Apabila jalan itu dipelihara dengan baik, minimal kendaraan roda dua bisa melalui jalan tersebut sehingga mobilitas orang dan barang dari dan ke desa bisa berjalan dengan lancar.

Padahal di kampung tersebut masyarakat sudah amat membutuhkan jalan, sudah ada kesadaran bahwa jalan perlu

dibangun, tapi mereka tidak mau bekerjasama untuk tapak demi setapak, meter demi semeter hingga menjadi 100 meter, kemudian menjadi 1 km serta pada akhirnya menjadi 10 km dan seterusnya. Namun pemikiran ini belum memasyarakat dalam fikiran masyarakat di daerah tersebut sehingga puluhan tahun mereka harus merasakan betapa sulitnya menjadi daerah terisolir.

Kalaulah seandainya masing-masing kampung mau bergotong royong dengan swadaya setiap minggu, mereka mampu membuat badan jalan 4 meter sepanjang 10 meter, satu bulan sudah 40 meter, dan satu tahun sudah 480 meter, dan untuk bisa menghubungkan antar kampung yang panjangnya hanya 3 km mereka hanya butuh waktu 6,25 tahun. Tapi hal ini tidak mereka lakukan sehingga mereka terpencil lebih dari setengah abad, jauh dari daerah luar dan beberapa generasi tidak sekolah dan tidak berpendidikan.

Hasil pengamatan penulis, di tingkat masyarakat tersebut sesungguhnya belum terdapat kepemimpinan yang mampu mengkoordinir potensi masyarakat sehingga masyarakat belum sampai pada taraf kemajuan dan berkembang, serta kepemimpinan formal dan non formal yang ada belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengendalikan dinamika masyarakat. Hingga pada akhirnya ketika pemerintah pusat menggulirkan program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2000, barulah beberapa kampung di Kecamatan Mapattunggul bisa dibuka jalan untuk roda empat, namun karena belum didukung oleh pemerintahan kabupaten Pasaman, jalan yang sudah dibangun kembali rusak dan tidak bisa dilalui kendaraan lagi sehingga penduduk kembali terisolir.

Kasus ini menunjukkan bahwa modal sosial yang ada di tingkat masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Sesungguhnya

masyarakat memiliki institusi sosial dalam bentuk masyarakat adat Nagari, Jorong, Koto dan Suku. Namun, karena kepemimpinan dan kerjasama belum berjalan dengan baik, maka menyebabkan kegiatan pembangunan yang diupayakan belum berjalan dengan semestinya.

Pertanyaan :

1. Apa yang salah dalam proses pembangunan Nagari ini?
2. Bagaimana mengatasinya ke depan sehingga masyarakat yang makmur tersebut bisa tercapai?

DAFTAR RUJUKAN

- Bahrum, Syamdul. 2008. Perspektif Islam dalam Paradigma Globalisasi. <http://syamsulbahrum.web.id/> di download tanggal 24Februari 2008.
- Beugelsdijk, Sjoerd dan Smulders, Sjak. 2004. *Social Capital and Economic Growth*. Tilburg University CentER /Faculty of Economics, Warandelaan 2
- Becker, Gary S., 1962. Investment in Human Capital: "A Theoretical Analysis", *Journal of Political Economy* LXX: 9 - 49.
- _____.1975. *Human Capital : a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. -- 2d ed. -- New York:National Bureau of Economic Research: distributed by Columbia University Press, LB2321.B27 74-83469
- Becker, Gary S. Murphy, Kevin N. Tamura, Robert F. (1990) *Human Capital, Fertility and Economic Growth: Working Paper No. 3414*. <http://home.uchicago.edu/~gbecker/papers/>.
- Briggs, Asa & Peter Burki. 2006. *Sejarah Sosial Media*, penerjemah A Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- BPS, Bappenas UNDP, 2001, Laporan Pembangunan Manusia 2001, Jakarta : BPS, Bappenas, UNDP Indonesia
- BPS-Statistics Indonesia, Bappenas, UNDP Indonesia, 2004. National Human Development Report 2004 The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia. Jakarta. www.bappenas.go.id.
- BPS. 2013. Sosial dan Kependudukan. Jakarta: <http://www.bps.go.id/> didownload Oktober 2013 .
- Bappenas. 2007. Laporan Perkembangan Pencapaian Milleneum Development Goals Indonesia 2007. Jakarta: UNDP-Bappenas.
- Burt, Ronal S. 1992. Excerpt from, *The Social Structure of Competition, in Structural Holes: The Social Structure of Competition*. MA dan London: Harvard University Press, 8-30
- Black, Sandra and Lisa M. Lynch. 1996. "Human Capital Investments and Productivity", American Economic Review, May
- Boediono. 2005. Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Boyd, danah Michele. 2004. Friendster and Publicly Articulated Social Networking. California: University of California, Berkeley - Information Management & Systems 102 South Hall, Berkeley, CA 94720-4600
- Bozbura, F. Tunc a, Beskese, Ahmet dan Kahraman, Cengiz. 2007. Prioritization of human capital measurement indicators using fuzzy AHP. Expert Systems with Applications 32 (2007) 1100-1112: www.elsevier.com/locate/eswa
- Case, Karl E dan Ray C. Fair (2003) Prinsip-prinsip Ekonomi Makro, alih bahasa, Berlian Muhamad. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Coleman, James. 1988. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. American Journal of Sociology 94 (Supplement): S95-S120
- Coleman, James. 1994/2006. Dasar-Dasar Teori Sosial. Edisi Indonesia (Imam Muttaqien, DertaSri Widowatie). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Coleman, James S. 1987. Norms As Social Capital. New York: Paragon House, 133-55
- _____. 1988. *Social in the Creation of Human Capital*. American Journal-of Sociology, 94 Supplement, S95-S120
- Collier, Paul dan Gunning Jan W. 1999. *Explaining African Economic Performance*, Journal Economic Literature, XXXVII (1) March, 64-111
- Craen, Maarten Van. Vancluysen, & Acker, Johan . 2008. *Social capital of Turkish and Moroccan immigrants in Belgium: determinants of informal social networks The Context of Education and Culture: Antwerp Beliga: Paper presented at the 1st International Congress of European Turks*.
- Curran, Sara. 2005. *Migration, Social Capital, and the Environment: Considering Migrant Selectivity and Networks in Relation to Coastal Ecosystems*. Princeton University.
- Dasgupta, Partha. 2002. *Social Capital and Economic Performance: Analytics*. Wasington DC: Work Bank, 325 - 425.
- Delliarnov, 2007. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Elfindri. 2001. Ekonomi SDM. Padang : Penerbit Universitas Andalas
- Friedmann. 1987. Planning as social learning. *Planning, in the Public*

- domain: *From Knowledge and action*. (PP 181-223). Princeton: University Press.
- Fuente, Angel de la. 2006. *Education and economic growth: a quick review of the evidence and some policy guidelines: Instituto de Análisis Económico*, CSIC. Finland
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press
- _____. 1995. *Social Capital and the Global Economy*. Foreign Affairs, volume 74 no 5
- _____. 1995. *Social Capital and The Global Economy*. Foreign Affairs, 74 (5), 89-103
- _____. 2000. *Social Capital and Civil Society*, International Monetary Fund Working Paper: WP/00/74.1-18
- Granovetter, Mark S. 1973. *The Strength of Weak Ties*. American Journal of Sociology: 78 (6), 1360-80
- _____. 1985. *Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness*. American Journal of Sociology: 91 (3), 481-510
- Grootaert, Christiaan. 1999. "Social Capital, Household Welfare, and Poverty in Indonesia", Policy Research Working Paper 2148. Washington D.C.: World Bank
- _____. 2001. *Does Social Capital Help the Poor? A Synthesis of Findings from the Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina Faso, and Indonesia*. Local Level Institutions Working, Paper 10. World Bank, Social Development Department, Washington D.C.
- Grootaert, Christiaan, and Deepa Narayan. 2000. Local Institutions, Poverty, and Household Welfare in Bolivia. Washington D.C: Local Level Institutions Working Paper 9. World Bank, Social Development Department.
- Grootaert, Christiaan dan Bastelaer, Thierry. V. 2001. *The Role of Social Capital in Development, an Empirical Assessment*. Cambridge- UK : Cambridge University Press.
- Grootaert, Christiaan, Gi-Taik Oh, and Anand Swami. 2002. *Social Capital, Education and Credit Markets: Empirical Evidence from Burkina Faso*. In Jonathan Isham, Thomas Kelly, and Sunder Ramaswamy, eds.
- Grootaert, Christiaan, and Deepa Narayan. Woolcock. 2004. *Measuring Social Capital An Integrated Questionnaire Working Paper 18*. Washington D.C: World Bank- Social Development Department, 1 2 3 4 05 04 03
- Groot, Wim. Brink, Hendrie TTE Maasen Van Den and Praag, Van Bernard. 2006. *The Compensating Income Variation Of Social Capital*. Springer : Social Indicators Research (2007) 82: 189-207, DOI 10.1007/s11205-006-9035-9
- Hill, Hal. 2002. Ekonomi Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada (penerjemah Tri Wibowo BS & Hadi S).
- Jhingan, M.L. 2003, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Keynes, Jhon Maynard. (1991) *Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga dan Uang/Edisi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. (terjemahan Willem H. Makaliwe).
- Koenjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lains, Alfian. 2003. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, Jakarta: LP3S

- Lin, Nan. 1999. *Building a Network Theory of Social Capital*. Dept. of Sociology, Duke University CONNECTIONS 22(1) :28-51 I NSNA
- Mankiw N. Gregory. 2000. *Teori Ekonomi Makroekonomi/Edisi Indonesia*. Jakarta: Erlangga (alih bahasa Umam nurmawan).
- Mazhahiri, Husain. 2009. *Jihad Melawan Hawa Nafsu*, edisi Indonesia, terjemahan Ahmad Subandi. Jakarta: Penerbit Lentera
- Mincer, Jacob. 1974/197. *Schooling, Experience, and Earnings*. New York: Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research)
- Moore, Gary W. 1983. *Developing and Evaluating Educational Research*. Canada: Little, Brown & Company Limited
- Morrice, Linda. 2007. *Lifelong learning and the social integration of refugees in the UK: the significance of social capital*. London W1T 3JH, UK. International Journal of Lifelong Education, 26:2, 155 — 172.
- Nabahani, Taqiyyuddin An. 1953. *Peraturan Hidup Islam*. (terjemahan. Abu Amin dkk). Pustaka Thariqul Izzah: Indonesia
- Nicholson, Walter. 2002. *Mikroekonomi intermediate dan aplikasi: alih bahasa Ign Bayu mahendra*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Nawawi, Hadari. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia yang kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Narayan, Deepa and Lant Pritchett. 1999. *Social Capital: Evidence and Implications*. in Dasgupta and Serageldin, eds. op. cit. pp. 269– 95.
- Nas, J.M Peter, dan Welmoet Bender. 1995. *Issues in Urban Development: Case Studies from Indonesia*. Leiden, Research School: CNWS
- Nirwana, Herman. dkk. 2005. *Belajar dan Pembelajaran*. Padang: FIP UNP.
- Noer Sutrisno. 2002. *Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial*, http://www.perhepi.org/images/stories/publikasi/warta/berkeadilan_sosial.pdf, didownload, Oktober 2013
- OECD and Human Resources Development Canada. 1998. *Literacy skills for the knowledge society: further results from the international adult literacy survey*, Paris and Ottawa www.oecd.org.
- OECD's. 2007. *Lifelong Learning and Human Capital. Organisation For Economic Co-Operation and Development*, Paris Ottawa. www.oecd.org/publications/Policybriefs (diakses 26 April 2008).
- Perdana, Ari A. 2001. *Peranan "Kepentingan" Dalam Mekanisme Pasar dan Penentuan Kebijakan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta : CSIS Working Paper Series, WPE 061
- Psacharopoulos, George. 1995. *The Profitability of Investment in Education: Concepts and Methods*, <http://www.c3l.uni-oldenburg.de>, didownload, Oktober 2013
- Pindyk, Robert S. and Daniel Rubinfeld (2005) *Mikroekonomi*, (edisi Indonesia), Nia Kurnia dewi. Jakarta : PT Indeks.
- Poros, Maritsa V. 2001. *"The role of migrant networks in linking local labour markets: the case of Asian Indian migration to new York and London."* Global Networks. 1, 3:243-259.
- Portes, Alex. 1998. *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*. Annual Review of Sociology 22: 1-24

- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N. J. : Princeton University Press.
- _____. 2004. *Education, Diversity, Social Cohesion and "Social Capital"*. Dublin : OECD Meeting Of OECD Education Ministers
- Putnam, Robert D dan Nanetty, Raffaella Y. 1993. *Social Capital and Institution Success, in Making Democracy Work, Civil Traditions in Modern Italy*. Princenton: Princenton University Press, 163-85 notes.
- Sanderson, Stepen K. 2003. *MakroSosiologi*, alih bahasa Farid Wajidi dan S Menno. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Samuelson, Paul A & William D Nordhaus. 2003. *Mikroekonomi*, Edisi Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sen, Amartya. 1984. *The Living Standar*, Oxpord Economic, Paper, 36. Supplement. 74-90
- Stiglitz, Joseph E. 2003. *Dekade Keserakahan era -90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi*, penerjemah Aan Suhaeni. Jakarta: PT Cipta Lintas Wacana.
- Stone, Wendy. 2001. *Measuring Social Capital, Toward a Theoretically Informed Measurement Framiwork For Researching Social Capital In Family and Community Life*. Melbourne: Australia Institute of Family Studies. Research Paper No. 24: ISSN 1440-4761
- Soewardi, Herman. 1999. *Roda Berputar Dunia Bergulir, Kognisi Baru tentang Timbul Tenggelamnya Sivilisasi*. Bandung: Bakti Mandiri.
- Suharto, Edi. 2007. *Modal Sosial dan Kebijakan Publik, Social Capital and Public Policy*.
- Syam, Mohammad Noor. 2006. *Filsafat Ilmu*. Malang: FIP UM
- Smith, Adam. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. <http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3113/smith/dugald/>, Dowload tanggal 5 Januari 2007.
- Todaro, Michel P. 2003. *Pembangunan Ekonomi*, edisi Indonesia. Jakarta: Erlangga. (alih bahasa : Harris munandar)
- Truett, Lila J & Dale B. Truett (1987) *Microeconomics*, S.T Louis : Times Mirror/Mosby College Publising.
- UNDP. 1997. *Human Development Index*.
- _____. 2004. *Humān Development Index*.
- _____. 2008. *Human Development Index*. www.undp.ac.id.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*. Jakarta: datahukum.pnri.go.id.
- Woolcock, Michael, and Deepa Narayan. 2000. "Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy", World Bank Research Observer 15 (2): 225-50
- www.bankdata.depkes.go.id. (didonwload, Oktober 2013)
- www.litbang.depkes.go.id/, Riset Kesehatan Dasar. Jakarta. [risikesdas2010 /Laporan _risikesdas _2010.pdf](http://risikesdas2010/Laporan_risikesdas_2010.pdf).
- Wößmann, Ludger. 2002. *Ross-Country Evidence on Human Capital and the Level of Economic Development: The Role of Measurement Issues in Education Historical Social Research*, Vol. 27 — 2002 — No. 4, 47-76 C
- Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan, Defenisi, Teori & Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing.

TENTANG PENULIS

Penulis dilahirkan disebuah nagari terpencil di Kabupaten Pasaman-Sumatera Barat, tepatnya di Kampung Tombang-Nagari Muaro Sei Lolo, pada tanggal 25 Mei 1977, anak dari Imam Basa Nagari Muaro Sei Lolo dengan Nursanah, Sebagai anak ke-empat dari Pasangan Imam dan Nursanah.

Pendidikan Sarjana ditamatkan di Jurusan Pendidikan Ekonomi-FPIPS Univeristas Negeri Padang pada tahun 2001. Dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Program Megister (S2) pada Program study Perencanaan Pembangunan/Ekonomi Pembangunan (PPN) Universitas Andalas tamat tahun 2004. Januari 2005 mulai bertugas menjadi staf Pengajar di FE-UNP, dan pada pertengahan tahun 2007 ditugaskan kembali untuk mengikuti program doctoral (S3) di PPs. Univesitas Negeri Malang (UM), tamat tahun 2011.

Walaupun sibuk dalam proses perkuliahan S1, S2 dan S3, Yulhendri juga masih menyempatkan diri aktif dalam organisasi mahasiswa dan gerakan koperasi Indonesia. Dalam organisasi

mahasiswa intra kampus Yulhendri pernah aktif di HMJ Pendidikan Ekonomi, Senat Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, BPM FPIPS, Unit kegiatan Pengembangan Ilmiah dan Penelitian UKPIP, Senat Mahasiswa (SMPT-IKIP Padang) dan terakhir sempat menjadi Ketua III Dewan Eksekutif Mahasiswa DEM-UNP. Disamping aktif dalam kegiatan intra kampus, pada era reformasi 1998 Yulhendri juga sempat bersama aktivis Sumater Barat mendirikan Gerakan Ekstra Perlementar Mahasiswa Indonesia (GEPMI), Forum Air Tawar, dalam membantu menyuarakan suara dan aspirasi pada gerakan reformasi 1998. Pada saat yang sama juga secara intensif mengikuti pengajian dan diskusi keilmuan dan keislaman di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat IKIP Padang, Cabang Padang, dan Badko Sumbar.

Disamping sebagai aktivis organisasi kemahasiswaan Yulhendri juga memiliki dan kepedulian yang luas pada pemberdayaan ekonomi rakyat, minat itu dijalankan di Koperasi Mahasiswa, pernah menjadi ketua Umum KOPMA UNP, Bendahara Umum Kopindo (Koperasi Pemuda Indonesia), dan ketua Pengawas Kopindo serta juga berpartisipasi dalam pengembangan SDM Koperasi, fasilitasi dan advokasi gerakan koperasi Indonesia melalui Pimpinan Paripurna Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia), sejak tahun 2004 hingga sekarang. Disamping sebagai aktivis koperasi, Yulhendri juga dikenal sebagai salah satu relawan, fasilitator dan peneliti pada Pusat Pengkajian dan pengembangan sumber daya Padang (P3SD), ketua majelis anggota Jaringan pemberdayaan masyarakat berbasis nagari (LSM-Jembatan- Sumbar), dan juga Sekretaris Wilayah Lembaga Pengembangan Ekonomi – Nahdlatul Ulama (LPNU) Sumatera Barat, dan Bendahara Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) - Sumbar. Dan selama setahun bersama bimbingan teknologi-Direktorat

Pendidikan non formal dan informal secara intensif mendampingi program peningkatan keterampilan untuk anak putus sekolah dalam program pendidikan pra-koperasi di berbagai pelosok Nusantara.

Direktorat Pendidikan Tinggi juga memberikan kesempatan yang luas bagi penulis untuk belajar ke luar negeri dalam program Sadwich Program di The Univesity off Queensland di sebuah kota Indah di Brisbane Negara Bagian QLD (Queensland). Dalam program tersebut juga sempat belajar riset dan metodologis dan filsafat ilmu di the School of Natural and Rural Systems Management pada tahun 2008/2009. dan sepulang dari Australia, direktorat Pendidikan Tinggi juga memberkan dana hibah melalui program percepatan proses penyelesaian doktoral pada Direktorat DP2M- Dikti.

Penulis juga menyempatkan diri pada berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (training) mulai dari LKMM (Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa), Latihan kader I dan II di Padang dan di Depok-Jawa Barat. Latihan Kewirausahaan dan perkoperasian di Yogyakarta. Atas undangan perdana menteri Jepang pada program persahabatan abad 21 (21 Century youth Frienship Program) ASEAN – Jepang, penulis juga pernah belajar mempelajari pengelolaan usaha kecil dan menengah bidang makanan dan minuman, mulai dari Osaka, Kyoto, Nagasaki, hingga ke Ehime Perfecture dan sempat berdiskusi dengan para pemuda Jepang di Kota Ozu. Disamping itu juga pernah mempelajari budaya dan kebiasaan keluarga Jepang selama beberapa minggu di perkampungan Jepang di Matsuyama Jepang Selatan.

Dalam rangka melakukan pengayaan materi teori S3, menginternalisasi dan mempertinggi rasa kebangsaan. Penulis juga sempat diberikan rekomendasi dan referensi untuk menjadi tenaga

pendamping pembentukan pra – koperasi di Kementerian Pendidikan Nasional khususnya pada bidang bimbingan dan teknologi – Direktorat PNFI. Dalam kegiatan vesitasi, dan assisment tersebut penulis telah menyempatkan singgah disebagian besar pelosok nusantara dari Banda Aceh hingga sampai ke Papua. Disamping juga tugas-tugas konsolidasi organisasi gerakan koperasi yang membawahi pembinaan dan pemberdayaan koperasi pemuda Dewan Koperasi Indonesia.

Abang yang dikenal dekat dengan para mahasiswa ini, juga rajin menulis dan juga sering menjadi columnus beberapa media diantaranya Singgalang, Padang Ekspres, Haluan, Media Indonesia. Dan beliau juga pernah menjuarai lomba karya tulis Perkoperasian tingkat nasional Kementerian Koperasi dan UKM bersama Universitas Negeri Jakarta tahun 2001. Dan berkat hadiah pemenang itu jugalah SPP S2-nya bisa terbayarkan. Dalam bidang penulisan buku beliau juga bisa dan sudah beberapa kali menerbitkan buku salah satunya berjudul "Pembangunan Ekonomi" yang diterbitkan oleh UNP Press tahun 2009.

Menikah dengan pilihan hatinya Nora Susanti, S.Pd., M.Si tanggal 7 Februari 2004, telah dikarunia lima orang anak: Aulia Henora Putri (alm): Alifya Sofy Riputra panggilan IFY san (sayang ayah nak), (umur : 7 tahun) dan Sidqilansyah Rahmadi Singkwan panggilan Rama-san (5 tahun), Tan Achsan Noor Singkwan (2 tahun dan Afifah Aftani Riputri.